Dr. Sitti Mujahida Baharuddin, S.Pd., SE., MM
Andi Sulfati, SE., Ak MM., CA

EKONOMI

DI PUSARAN BADAI COVID 19

PENERBIT YAYASAN BARCODE
2020

EKONOMI

DI PUSARAN BADAI COVID 19

Penulis :

Dr. Sitti Mujahida Baharuddin, S.Pd., SE., MM
Andi Sulfati, SE., Ak MM., CA

ISBN : 978-623-285-391-1

Design Cover & Layout:

Sulaiman Sahabuddin

Cetakan pertama : 2020

15x23 cm

Diterbitkan pertama kali oleh:

YAYASAN BARCODE

Divisi Publikasi dan Penelitian

Jl. Kesatuan 3 No. 9 Kelurahan Maccini Parang

Kecamatan Makassar Kota Makassar

Email: penerbitbarcode@gmail.com

Website : www.yayasanbarcode.com

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan cara
apapun tanpa izin penerbit.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabiil'aalamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kepa Allah SWT yang telah memberikan karunia-Nya sehingga buku ini dapat terselesaikan tepat waktu ditengah tugas dan kewajiban lain yang hadir bersamaan. Penulis sangat bersyukur dan telah berupaya semaksimal mungkin untuk terbitnya buku yang berjudul "EKONOMI DI PUSARAN BADAI COVID 19" Buku ini memberikan gambaran tentang kondisi ekonomi di masa pandemi covid 19. Tak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan buku ini.

Penyusun juga berharap agar buku ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan penyusun pada khususnya. Namun demikian, penyusun menyadari bahwa buku ini belumlah sempurna. Dengan lapang dada dan kerendahan hati penyusun bersedia untuk diberi saran dan kritik yang bersifat membangun dan dapat memperbaiki buku ini.

Desember 2020

Penyusun

DAFTAR ISI

Kata Pengantar_iii

Daftar Isi_iv

BAB 1

EKONOMI DUNIA_1

BAB 2

NEGARA MAJU DAN NEGARA BERKEMBANG_7

BAB 3

BENCANA DARI MASA KE MASA_24

BAB 4

DAMPAK BENCANA TERHADAP AKTIVITAS
EKONOMI DUNIA_34

BAB 5

SINERGITAS PASCA BENCANA DI DUNIA_51

BAB 6

PANDEMIC VIRUS CORONA (DARI WUHAN
MENJALAR KE NEGARA-NEGARA DI DUNIA)_54

BAB 7

STRATEGI NEGARAM MENGHADAPI PANDEMIK
VIRUS COVID 19_76

BAB 8

INDONESIA DAN VIRUS CORONA_94

BAB 9

PANDEMIC VIRUS COVID 19 DAN
PEMBANGUNAN_102

BAB 10

**PERILAKU SOSIAL MASYARAKAT DALAM MASA
PANDEMIC COVID 19_113**

**BAB 11
PEMERINTAH DAN ANTISIPASI WABAH COVID 19_137**

**BAB 12
RESPON DAN TANTANGAN PENCEGAHAN WABAH
COVID 19 DI INDONESIA_160**

**BAB 13
PERSOALAN YANG MUNCUL SEJAK WABAH
CORONA_171**

DAFTAR PUSTAKA_183

BAB 1

EKONOMI DUNIA

Resesi ekonomi pada tingkat global dan regional tampaknya tak bisa dihindarkan. Pandemi corona (Covid-19) membuat aktivitas ekonomi berkurang drastis dan perputaran uang menyusut. Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) memproyeksikan pada level regional, ekonomi Indonesia akan tumbuh 0,5 persen pada 2020. Pertumbuhan ini dinilai IMF relatif baik di kawasan Asia, terutama negara berkembang. Thailand yang sama-sama masuk dalam ASEAN-5 diprediksi kontraksi 6,7 persen. Sementara itu, Malaysia tumbuh negatif hingga 1,7 persen.

IMF menyampaikan hal ini melalui laporannya bertajuk World Economic Outlook (WEO) April 2020. IMF memprediksi pertumbuhan ekonomi global tahun ini lebih buruk dibandingkan krisis keuangan 2008-2009, yaitu kontraksi tiga persen. Penyebabnya, pandemi virus corona menekan aktivitas ekonomi di sektor riil maupun keuangan. IMF menyebutkan ekonomi akan *rebound* pada tahun depan. Ekonomi Indonesia diprediksi bisa tumbuh hingga 8,2 persen, sementara tingkat global sebesar 5,8 persen. Namun, menurut IMF, hal ini dengan catatan skenario pandemi sudah usai pada paruh kedua 2020 dan aktivitas ekonomi kembali normal. IMF mengapresiasi respons fiskal di Indonesia. Lembaga donor tersebut menyebutkan, Pemerintah Indonesia sudah menyediakan dukungan fiskal yang sesuai target. Banyak pasar dan negara berkembang (seperti China, Indonesia, dan Afrika Selatan) sudah mengumumkan dukungan fiskal dengan jumlah signifikan untuk sektor dan pekerja terkena dampak. IMF meminta agar langkah-langkah fiskal tersebut ditingkatkan, khususnya jika pembatasan kegiatan ekonomi terus berlangsung atau *pick-up* aktivitas ekonomi terlalu lemah. Stimulus fiskal dengan basis yang luas bisa

mencegah penurunan kepercayaan diri, mendorong kenaikan permintaan, dan mencegah perlambatan ekonomi lebih dalam.

Kebijakan fiskal harus diarahkan pada dua hal, yaitu melindungi rumah tangga maupun bisnis yang paling terpapar dan menjaga hubungan ekonomi setelah krisis ini terlewati. Dalam melakukannya, kebijakan spesifik patut dibuat secara masif, tepat waktu, bersifat sementara, dan memiliki target. Untuk negara-negara berkembang Asia, IMF memproyeksikan ekonominya mampu tumbuh satu persen pada 2020. Meski lebih rendah lima poin persentase dibandingkan rata-rata dalam satu dekade terakhir, kawasan ini menjadi satu-satunya wilayah dengan tingkat pertumbuhan positif sepanjang 2020.

Kawasan zona euro diprediksi kontraksi 7,5 persen, negara berkembang di Eropa juga kontraksi 5,2 persen. Sementara itu, Sub-Sahara Afrika tumbuh negatif 1,6 persen. Ekonom yang juga menteri keuangan periode 2013-2014 Chatib Basri menyebutkan ekonomi Indonesia tahun ini mampu tumbuh dalam rentang 0,3 persen hingga 2,2 persen. Skenario ini berdasarkan perhitungan dari Australian National University dengan mempertimbangkan dampak pandemi Covid-19 dalam skala global.

Dalam skenario tersebut, Chatib menjelaskan, pandemi Covid-19 mampu menarik ekonomi Indonesia kontraksi 2,8 persen dari *baseline*. Artinya, merujuk pada realisasi pertumbuhan tahun lalu yang mencapai 5,02 persen, ekonomi Indonesia tahun ini bisa melambat menjadi 2,2 persen. Setidaknya tiga persen. Ini skenario medium. Namun, dengan skenario *high severity* atau dampak pandemi Covid-19 sangat signifikan terhadap global, ekonomi Indonesia mengalami kontraksi lebih dalam. Chatib mengatakan, penurunannya bisa mencapai 4,7 persen sehingga diprediksi ekonomi hanya tumbuh 0,3 persen sepanjang 2020. Chatib menggambarkan, dampak tersebut terbilang signifikan. Pasalnya, China yang menjadi negara awal terjadi wabah Covid-19 merupakan pusat produksi dunia. Misalnya, untuk produk komputer,

elektronik, dan produk optik, kontribusi ekspor China terhadap produksi komoditas tersebut mencapai 30 persen.

Kepala Ekonom dan Riset UOB Indonesia Enrico Tanuwidjaja lebih optimistis. Ia memprediksi ekonomi Indonesia pada 2020 mampu tumbuh 2,5 persen dan *rebound* pada 2021 dengan pertumbuhan mencapai 3,7 persen. Enrico menyebutkan, dari beberapa komponen produk domestik bruto (PDB), pertumbuhan konsumsi rumah tangga mengalami pukulan paling keras sepanjang 2020. Pertumbuhannya hanya mampu di kisaran tiga persen, turun dua basis poin dibandingkan dua tahun terakhir, yaitu lima persen. Kinerja ekspor dan impor tidak jauh berbeda. Tahun ini keduanya masing-masing diprediksi tumbuh nol persen dan kontraksi satu persen. Pada tahun lalu, realisasi ekspor tumbuh negatif 1,0 persen, sedangkan impor kontraksi hingga 7,7 persen.

A. IMF Dan Pemulihan Ekonomi

IMF menyebutkan saat ini terjadi ketidakpastian ekstrem terkait perkiraan pertumbuhan ekonomi. Situasi ekonomi bergantung pada berbagai faktor yang sulit diprediksi. Di antaranya adalah perkembangan pandemi Covid-19, intensitas dan keberhasilan upaya penanganan virus, gangguan rantai pasok yang luas, hingga pergeseran pola konsumsi masyarakat. Banyak negara menghadapi krisis *multi-layered* yang terdiri atas krisis kesehatan, gangguan ekonomi domestik, anjaknya permintaan eksternal, sampai *capital outflow*. IMF menekankan, kebijakan yang efektif sangat penting untuk mencegah risiko lebih buruk. Dibutuhkan berbagai langkah untuk mengurangi penularan dan melindungi jiwa manusia. Meski mengganggu kegiatan ekonomi untuk jangka pendek, dua langkah itu dapat dilihat sebagai investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia dan infrastruktur kesehatan. Prioritas yang harus dilakukan sekarang adalah meminimalkan dampak Covid-19, terutama dengan meningkatkan pengeluaran untuk sektor kesehatan. Kebijakan ekonomi juga harus melindungi

dampak dari penurunan aktivitas manusia, perusahaan, dan sistem keuangan. Selain itu, kebijakan tersebut mesti memastikan pemulihan ekonomi dapat berlangsung dengan cepat begitu pandemi menghilang.

Bank Indonesia (BI) menyebut pandemi virus corona yang meluas ke seluruh dunia telah berdampak pada meningkatnya risiko resesi perekonomian global pada tahun ini. Hal ini dipengaruhi oleh menurunnya permintaan serta terganggunya proses produksi seperti pembatasan mobilitas manusia. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan, pertumbuhan ekonomi negara maju seperti Amerika Serikat dan negara di Eropa akan mengalami kontraksi pada tahun ini. Meskipun, berbagai kebijakan ultra-akomodatif dari kebijakan fiskal dan moneter telah ditempuh. Risiko resesi ekonomi dunia akan terjadi pada triwulan dua dan triwulan tiga 2020, sesuai dengan pola pandemi Covid-19. Namun, pada triwulan empat 2020 diperkirakan kondisi ekonomi dunia akan kembali membaik. Menurutnya pemulihan kondisi ekonomi dunia pada kuartal empat 2020 akan tecermin berkurangnya kepanikan pasar keuangan dunia pada April 2020. Perry menekankan, berkurangnya kepanikan didukung oleh sentimen positif atas berbagai respons kebijakan yang ditempuh banyak negara. Risiko pasar keuangan dunia yang berkurang seperti tecermin pada penurunan *volatility index* (VIX) dari 85,4 pada 18 Maret 2020 menjadi 41,2 pada 14 April 2020.

Atas hal tersebut, Perry menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia juga akan mengalami penurunan signifikan pada triwulan dua dan triwulan tiga 2020. Hal ini sejalan dengan prospek kontraksi ekonomi global dan juga dampak ekonomi dari upaya pencegahan penyebaran virus corona. Perekonomian nasional diperkirakan kembali membaik mulai triwulan empat 2020 dan secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi 2020 diperkirakan dapat menuju 2,3 persen dan akan meningkat lebih tinggi pada 2021.

B. Ekonomi di Tengah Pandemi Covid-19

Proyeksi ekonomi dunia tahun ini dipastikan mengalami penurunan akibat pandemi Virus Korona (Covid-19), namun, Indonesia diprediksi masih bisa tumbuh positif oleh IMF dan World Bank. Proyeksi untuk Asia termasuk Indonesia dari dua institusi yaitu World Bank dan IMF, hanya tiga negara yang masih diperkirakan bertahan di atas 0% atau positif teritori, yaitu Indonesia, Tiongkok dan India. Dalam rapat yang dilakukan secara virtual melalui video conference itu, Menkeu mengatakan, Indonesia hanya akan tumbuh sebesar 2,3% di kuartal 2 dan 3, kemudian akan membaik di kuartal 4. Untuk Indonesia, saat ini, skenario kita sudah turun di 2,3%. Ini adalah dampak dari Covid-19 yang paling severe atau paling parah terjadi di kuartal kedua tahun ini dan mungkin akan continue di kuartal 3 dan mungkin agak mulai membaik di kuartal keempat.

Dampak Pandemi Covid-19 membuat berbagai negara mengkombinasikan kebijakan penanganan Covid-19 dan stimulus ekonomi yang besar. Ini disebabkan eskalasi penyebarannya juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi global dan Indonesia. Langkah yang dilakukan semua negara biasanya terdiri dari instrumen fiskal apakah itu memberikan insentif pajak atau tax break, memberikan tambahan belanja umumnya di bidang kesehatan dan bantuan sosial, dan juga membantu dunia usaha termasuk menjaga sistem keuangan supaya tidak mengalami potensi krisis. Ini yang dilakukan oleh semua negara melalui penjaminan, memberikan jaminan pinjaman tetap, kredit tetap mengucur atau memberikan fasilitas refinancing atau restructuring. Menkeu menambahkan, Kemenkeu bersama BI, OJK dan LPS juga sudah melakukan *forward-looking assesment* berdasarkan berbagai *contingency* atau kemungkinan termasuk kemungkinan yang lebih buruk dari kondisi baseline yang sedang ataupun sudah diperhitungkan saat ini. Kemenkeu akan bekerja semaksimal mungkin memastikan ketersediaan anggaran untuk mempercepat upaya penanganan krisis ini, dengan tetap menjaga

kesehatan dan kesinambungan keuangan negara melalui kebijakan fiskal dan APBN guna merespons kejadian Covid-19 dengan melakukan refocusing program, realokasi anggaran serta penyediaan stimulus untuk tujuan kesehatan, perlindungan masyarakat, dan dukungan dunia usaha.

BAB 2

NEGARA MAJU DAN NEGARA BERKEMBANG

Negara-negara di dunia tak hanya diklasifikasikan berdasarkan peta geografinya saja. Misalnya, negara di benua Asia, Amerika, Eropa, Afrika, maupun Australia. Namun, klasifikasi berdasarkan tingkat ekonomi juga diterapkan untuk memetakan tiap negara. Sebagai contoh yaitu negara maju dan negara berkembang. Istilah negara maju diperuntukkan bagi negara yang memiliki pendapatan menengah ke atas. Terdapat beberapa negara maju di dunia yang terkenal akan kesejahteraannya yaitu Amerika Serikat, Kanada, Swedia, Jepang, Singapura, dan masih banyak lagi. Sementara itu, yang termasuk negara berkembang adalah Malaysia, Thailand, Indonesia, India, dan banyak lainnya.

Negara Indonesia masuk ke dalam kategori negara berkembang. Alasan dari Indonesia yang masih menyandang status negara berkembang ini karena pendapatan per kapita masyarakat Indonesia yang masih masuk kategori menengah ke bawah. Populasi penduduk yang terhitung padat juga menjadi alasan mengapa Indonesia masih terjebak dalam predikat ini. Selain kedua alasan tersebut, terdapat beberapa alasan lain yang menjadi sumber Indonesia belum mampu bangkit untuk memperbaiki citra negara. Lalu, sebenarnya apa saja ciri-ciri negara berkembang?

1. Tingkat Pendapatan Perkapita Rendah

Yang disebut dengan pendapatan perkapita adalah nilai rata-rata dari pendapatan penduduk di suatu negara. Untuk mengetahui pendapatan perkapita, dapat dilakukan dengan membagi pendapatan nasional dengan jumlah penduduk negara yang dimaksud. Ciri-ciri negara berkembang yang pertama ini dilihat dari segi ekonomi.

Negara seperti Indonesia memiliki pendapatan perkapit menengah ke bawah sehingga masyarakatnya terbilang masih belum mencapai kategori sejahtera. Hampir separuh negara di dunia masuk ke dalam kategori negara berkembang.

2. Impor Lebih Besar Daripada Ekspor

Ciri-ciri negara berkembang selanjutnya adalah besarnya jumlah impor ketimbang ekspor barang yang terjadi di sebuah negara. Padahal, impor dilakukan saat suatu negara mengalami keterbatasan teknologi dan keahlian sehingga membutuhkan barang yang dibawa oleh negara lain untuk memnuhi kebutuhan. Sementara itu, dengan adanya impor, berarti negara harus mengeluarkan uang yang tidak sedikit. Pasalnya, barang yang dibutuhkan harus mengarungi samudera sehingga biaya yang dikeluarkan akan merogoh kocek.

3. Jumlah Pengangguran Tinggi

Ciri-ciri negara berkembang yang ketiga adalah jumlah pengangguran yang terbilang tinggi. Seiring dengan semakin banyaknya angka kelahiran, persaingan di dunia kerja juga pasti tinggi. Alhasil, negara tidak mampu menyediakan lapangan pekerjaan yang layak untuk menampung jumlah pengangguran yang terlampaui banyak. Hal ini sangat berkaitan dengan laju pertumbuhan penduduk di negara berkembang yang kurang terkontrol. Selain itu, tingkat pendidikan juga menjadi sumber tingginya jumlah pengangguran di negara berkembang.

4. Mengandalkan Sektor Primer

Negara maju berinovasi dengan menghadirkan berbagai macam terobosan untuk meningkatkan pendapatan perkapita. Namun berbeda dengan negara berkembang. Ciri-ciri negara berkembang yang cukup kentara adalah caranya mengandalkan sektor primer sebagai pemasukan utama. Yang dimaksud sektor primer adalah hasil olahan sumber daya alam. Mayoritas penduduk negara berkembang memiliki mata pencaharian dengan memanfaatkan hasil alam seperti petani, nelayan, dan

banyak lainnya. Penduduk negara berkembang masih sangat kurang pengetahuannya akan terobosan baru dunia teknologi dan semacamnya.

5. Tingkat Korupsi Tinggi

Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Mungkin kalimat inilah yang cocok untuk menggambarkan posisi rakyat jelata dan para petinggi yang hanya berorientasi pada aspek materiil. Di negara berkembang, tingkat korupsi yang terjadi cukup tinggi sehingga berdampak buruk pada perekonomian negara.

B. Ciri-ciri Negara Berkembang dari Segi Demografi

1. Laju Pertumbuhan Penduduk Tinggi

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, tingginya jumlah pengangguran sebagai ciri-ciri negara berkembang disumbangkan oleh ketimpangan laju pertumbuhan penduduk. Misalnya, tingginya angka kelahiran tidak sebanding dengan angka kematian. Kurangnya sosialisasi keluarga berencana juga menjadi sebab laju pertumbuhan yang tinggi. Alhasil, alih-alih tenaga kerja terpetakan secara baik, justru malah membludak karena tingginya jumlah populasi penduduk usia kerja. Negara berkembang seperti Indonesia dan India adalah contoh tingginya laju pertumbuhan penduduk yang membuat dua negara tersebut perlu mengarahkan taktik yang jitu untuk mengendalikannya.

2. Tingkat Pendidikan Rendah

Tingkat pendidikan rendah menjadi salah satu ciri-ciri negara berkembang. Rendahnya tingkat pendidikan seringkali sebanding dengan tingginya laju pertumbuhan penduduk. Maka tak heran jika dua faktor tersebut mempengaruhi pendapatan perkapita sebuah negara. Selain itu, rendahnya tingkat ekonomi negara berkembang juga menyumbang kurangnya fasilitas pendidikan yang memadai. Ditambah, para orangtua memiliki kesadaran yang rendah terhadap pentingnya pendidikan untuk masa depan.

3. Penguasaan IPTEK Minim

Rendahnya tingkat pendidikan tak ayal juga berimbas pada penguasaan IPTEK penghuni negara berkembang. Hal ini dikarenakan banyaknya masalah yang terjadi di negara berkembang, sehingga pemerintah kurang fokus untuk mengembangkan minat masyarakat pada pentingnya IPTEK.

C. BI: Pertumbuhan Ekonomi Negara Maju dan Berkembang Melambat di 2019

Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo mengatakan pertumbuhan ekonomi dunia melandai, baik negara maju maupun berkembang. Namun ketidakpastian pasar keuangan sedikit mereda. Pertumbuhan ekonomi AS 2019 diprakirakan melambat akibat pasar tenaga kerja yang semakin ketat dan dukungan fiskal yang terbatas. Menurutnya, kondisi tersebut juga dipengaruhi kebijakan moneter Bank Sentral (The Fed) Amerika Serikat (AS) lebih dovish dan diperkirakan menurunkan kecepatan kenaikan suku bunga Fed Fund Rate (FFR). Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Eropa diprediksi juga melambat pada 2019 sehingga dapat pula memengaruhi kecepatan normalisasi kebijakan moneter bank sentral Eropa (ECB).

Di negara berkembang, pertumbuhan ekonomi Tiongkok terus melambat dipengaruhi oleh melemahnya konsumsi dan ekspor netto antara lain akibat ketegangan hubungan dagang dengan AS dan dampak proses deleveraging yang masih berlanjut. Sejalan dengan prospek pertumbuhan ekonomi dunia itu, harga komoditas global diperkirakan menurun. Ini termasuk harga minyak dunia akibat peningkatan pasokan dari AS. Sementara itu, ketidakpastian pasar keuangan sedikit mereda dan mendorong aliran modal ke negara berkembang sejalan dengan lebih rendahnya perkiraan kecepatan kenaikan FFR dan berkurangnya eskalasi ketegangan hubungan dagang AS-Tiongkok.

D. Ekonomi Indonesia

Dengan kondisi tersebut, BI memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap kuat ditopang

permintaan domestik. Berbagai indikator pertumbuhan ekonomi triwulan IV-2018 menunjukkan permintaan domestik tetap kuat ditopang oleh konsumsi, baik konsumsi swasta maupun konsumsi Pemerintah. Konsumsi swasta diperkirakan tetap baik seiring terjaganya daya beli dan keyakinan konsumen serta dampak positif persiapan pemilu. Konsumsi pemerintah tumbuh kuat ditopang belanja barang dan bantuan sosial. Namun demikian, ekspor diperkirakan masih terbatas dipengaruhi pertumbuhan ekonomi dunia yang melandai dan harga komoditas ekspor Indonesia yang menurun.

Sementara itu, impor mulai menurun sejalan dengan kebijakan yang ditempuh, meskipun masih tumbuh tinggi untuk memenuhi permintaan domestik. Ke depan, Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia 2019 tetap baik yakni pada kisaran 5,0-5,4 persen, ditopang oleh terjaganya permintaan domestik dan membaiknya ekspor neto.

Aristoteles menyebut negara sebagai organisasi kekuasaan yang diciptakan oleh sekelompok manusia yang disebut bangsa. Sementara Hans Kelsen mendefinisikan negara sebagai suatu susunan pergaulan hidup bersama tanpa adanya suatu paksaan. Berdasarkan tingkat kemajuannya, negara dibagi menjadi dua, yaitu negara berkembang dan negara maju. Negara berkembang adalah negara yang baru merdeka atau sedang giat melakukan pembangunan, sementara negara maju adalah negara industri yang berhasil mengembangkan negaranya. Dalam perjalanannya, perkembangan ekonomi suatu negara bergantung pada empat sektor, yaitu sumber daya manusia, sumber daya alam, pembentukan modal, dan tingkat teknologi. Berikut ini, kita akan membahas mengenai masing-masing sektor ini, sebagai upaya mengetahui pola pertumbuhan suatu negara.

E. Sumber Daya Manusia

Individu produktif yang menjadi penggerak dalam suatu organisasi, baik institusi maupun perusahaan, memiliki fungsi sebagai aset yang harus dilatih dan

dikembangkan. Beberapa aset yang diperoleh dari sumber daya manusia seperti keahlian, kekuatan, pola pikir, dan manajerial.

F. Sumber Daya Alam

Sumber daya alam merujuk pada segala sesuatu yang berasal dari alam dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Contoh sumber daya alam adalah pertambangan, pertanian, industri, dan perikanan.

G. Pembentukan Modal

Pembentukan modal merupakan aktivitas masyarakat yang menggunakan sebagian produksinya untuk pembuatan barang modal, bukan hanya untuk pemenuhan kebutuhan atau konsumsi. Misalnya perkebunan kelapa sawit tidak hanya menyediakan minyak mentah, tapi juga minyak goreng.

H. Tingkat Teknologi

Terakhir adalah tingkat teknologi. Tingkat teknologi adalah cara seseorang mengolah sumber daya yang ada untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan manusia. Misalnya dulu orang masih memanen padi secara manual, tapi sekarang sudah ada mesin yang bisa digunakan untuk mengganti tenaga manusia.

Filosofi Pembangunan

Pembangunan nasional pada dasarnya memiliki arti penting dan strategis dalam kehidupan bangsa Indonesia. Disebabkan karena pembangunan hukum nasional merupakan upaya untuk mewujudkan cita-cita nasional sebagaimana yang disyaratkan pada pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pembangunan hukum yang dilandasi oleh nilai dasar atau nilai ideologis, nilai historis, nilai yuridis serta nilai filosofinya akan memberikan dampak positif bagi masyarakat untuk dapat menikmati rasa keadilan, kepastian

manfaat hukum yang pada akhirnya akan bermuara pada pembentukan sikap dan kesadaran masyarakat terhadap hukum.

Pentingnya hukum dibangun agar hukum dapat menjadi sarana pembangunan dan pembaharuan masyarakat yang kita harapkan. Hukum juga dapat berperan sebagai objek pembangunan dalam rangka mewujudkan hukum yang ideal sesuai dengan nilai-nilai hidup di masyarakat.

Dalam hal mengintegrasikan dimensi kependudukan dalam perencanaan pembangunan (baik nasional maupun daerah) maka manfaat paling mendasar yang diperoleh adalah besarnya harapan bahwa penduduk yang ada di daerah tersebut menjadi pelaku pembangunan dan penikmat hasil pembangunan. Itu berarti pembangunan berwawasan kependudukan lebih berdampak besar pada peningkatan kesejahteraan penduduk secara keseluruhan dibanding dengan orientasi pembangunan ekonomi yang berorientasi pada pertumbuhan (growth).

Pembangunan berwawasan kependudukan ada suatu jaminan akan berlangsung proses pembangunan itu sendiri. Pembangunan berwawasan kependudukan menekankan pada pembangunan lokal, perencanaan berasal dari bawah (bottom up planning), disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat lokal, dan yang lebih penting adalah melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan. Pembangunan harus dikembangkan dengan memperhitungkan kemampuan penduduk agar seluruh penduduk dapat berpartisipasi aktif dalam dinamika pembangunan tersebut. Sebaliknya, pembangunan tersebut baru dikatakan berhasil jika mampu meningkatkan kesejahteraan penduduk dalam arti yang luas. Dan juga keadaan dan kondisi kependudukan yang ada sangat mempengaruhi dinamika pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Jumlah penduduk yang besar jika diikuti dengan kualitas penduduk yang memadai akan merupakan pendorong bagi pertumbuhan ekonomi.

Sebaliknya jumlah penduduk yang besar jika diikuti dengan tingkat kualitas yang rendah, menjadikan penduduk tersebut sebagai beban bagi pembangunan. Apa yang dapat dipelajari dari krisis ekonomi yang berlangsung saat ini adalah bahwa Indonesia telah mengambil strategi pembangunan ekonomi yang tidak sesuai dengan potensi serta kondisi yang dimiliki.

Pembangunan harus dikembangkan dengan memperhitungkan kemampuan penduduk agar seluruh penduduk dapat berpartisipasi aktif dalam dinamika pembangunan tersebut. Sebaliknya, pembangunan tersebut baru dikatakan berhasil jika mampu meningkatkan kesejahteraan penduduk dalam arti yang luas. Dan juga keadaan dan kondisi kependudukan yang ada sangat mempengaruhi dinamika pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah.

Seiring dengan perkembangan zaman, pembangunan baik secara fisik maupun non fisik gencar – gencarnya dilakukan. Pembangunan non fisik seperti pembangunan pendidikan, kesehatan, ekonomi dan lain sebagainya memerlukan sarana dan prasarana. Prasarana dan sarana tadi memerlukan lahan dan bahan yang diambil dari permukaan bumi. Oleh karena itu, pembangunan tersebut tidak lepas dari ruang yang berada di permukaan bumi. Pendidikan, kesehatan, ekonomi dan lain – lainnya itu mengembangkan gerak, interaksi, difusi dan arus yang memerlukan ruang. Tanpa ruang pengembangan tadi tidak dapat memenuhi kriteria sebagai pembangunan.

Pembangunan fisik, seperti jalan, jembatan, lapangan terbang, gedung, pelabuhan, dan lain sebagainya jelas sekali berpijak pada ruang yang ada di permukaan bumi. Prasarana dan sarana fisik tadi mengambil lahan di permukaan bumi. Untuk membangun prasarana dan sarana, memerlukan bahan yang digali di permukaan bumi ini. Sumber daya yang menunjang, tidak dapat dilepaskan dari apa yang ada di permukaan bumi. Perluasan permukiman, kawasan industri, kawasan pariwisata, kampus pendidikan, dan lain sebagainya

mengambil ruang di permukaan bumi. Oleh karena itu, untuk keseimbangan pembangunan antara fisik dan nonfisik dan dengan alam lingkungan perlu adanya perancangan, perencanaan, dan studi kelayakan. Sehingga diharapkan pembangunan fisik maupun pembangunan nonfisik dapat berjalan dengan baik.

Pembangunan merupakan realisasi dari suatu perencanaan. Perencanaan dapat diterapkan terhadap daerah – daerah yang kosong dan terhadap daerah – daerah yang sudah didiami. Pada konsep pembangunan, proses untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat tidak berlangsung secara spontan, melainkan diusahakan atau secara lebih populer lagi “ direncanakan”. Sehingga aktualisasi perencanaan tersebut dapat direalisasikan dalam bentuk pembangunan. Oleh karena itu, dalam memperbaiki taraf hidup melalui pembangunan, tidak hanya pada salah satu aspek saja, seperti aspek materi saja, melainkan meliputi aspek non materi bahkan non fisik. Konsep pembangunan, khususnya pembangunan nasional di Indonesia menurut UU No.25/2004 yang mengatur sistem perencanaan pembangunan mengatakan bahwa hakekat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia, maka landasan pelaksanaan pembangunan nasional adalah Pancasila dan UUD 1945. Bahkan pada konsep tersebut, pembangunan itu adalah pembangunan “ manusia seutuhnya “ yang berarti pembangunan yang sesuai dengan hakekat dan harkat derajat kemanusiaan. Dengan demikian, pembangunan itu direncanakan dan dilaksanakan secara seimbang antara aspek mental-spiritual dengan aspek fisik-materialnya, tidak mengorbankan aspek mental-spiritual saja demi pembangunan fisik-material dan atau sebaliknya. Bahkan untuk bangsa Indonesia, pembangunan itu dilandasi nilai filsafat Pancasila yang telah menjadi pegangan hidup kita bersama. Pembangunan yang kadang – kadang hanya diartikan sebagai suatu kemajuan dalam aspek ekonomi dan fisik yang tampak dari luar, sedangkan aspek

mental-spiritualnya terlupakan, dapat membahayakan kehidupan bangsa dan negara ini terutama masa yang akan datang.

A. Faktor – faktor pembangunan

Menelaah faktor – faktor pembangunan dari kaca mata geografi, berarti meninjaunya dari faktor fisis dan non fisis. Dari faktor fisis dapat diperhatikan kondisi tanah, air, morfologi, iklim, sumber daya alam yang ada dalam apisan – lapisan kulit bumi kita ini. Faktor yang termasuk non fisis meliputi kondisi kependudukan, ekonomi, udaya, politik dan hal – hal yang erat hubungannya dengan perilaku kehidupan manusia. Lokasi, transportasi dan komunikasi merupakan faktor non fisis yang penting ditelaah dari padangan studi geografi.

Pembangunan menurut konsep geografi berarti pembangunan dalam ruang permukaan bumi dengan segala isinya bagi kepentingan hidup manusia di kawasan tersebut. Oleh karena tu, tidak lepas dari faktor tanah baik sebagai sumber daya maupun sebagai lahan tempat pembangunan berlangsung. Baik tanah sebagai sumber daya maupun sebagai lahan, diengaruhi juga oleh lokasinya. Lokasi merupakan sumber daya abstrak yang memiliki nilai ekoomi dan strategi. Lokasi tanah dan atau lahan yang baik memberikan dasar pesatnya pembangunan di daerah tersebut.

Air dalam arti yang luas meliputi air permukaan, air tanah, air mengalir, danau, laut sampai samudra, merupakan salah satu sumber daya yang menjamin kehidupan manusia termasuk sumber daya yang berpengaruh terhadap pembangunan yang berusaha meningkatkan kesejahteraan umat manusia. Oleh karena itu dalam pembangunan, air merupakan sumber daya yang tidak dapat diabaikan.

Morfologi yang meliputi bentuk dan tinggi rendahnya permukaan bumi merupakan faktor ang berpengaruh terhadap perilaku, kegiatan, dan tindakan manusia termasuk pembangunan yang berusaha

meningkatkan kesejahteraan manusia. Kawasan yang datar memudahkan untuk pembangunan jaringan jalan raya dan kawasan permukiman, tetapi kawasan yang terjal dan bergunung kurang menunjang bagi pembuatan jalan, tetapi sangat menunjang bagi daerah pembangkit tenaga listrik (PLTA). Sehingga secara singkat dapat dikatakan pembangunan suatu kawasan wajib memperhatikan faktor morfologi yang mungkin menghambat atau menunjang pengembangan dan pembangunan tersebut. Sumber daya alam yang terkandung di dalam lapisan bumi merupakan kekayaan yang menunjang kehidupan. Bagi kepentingan pembangunan suatu sektor tertentu, perlu ditelaah kadarnya, cadangannya untuk mendukung kelangsungan proyek tadi. Dengan demikian, pengembangan dan pembangunan yang memerlukan bahan dasar dan energi yang berasal dari sumber daya alam tadi tidak akan terlantar di tengah jalan.

Faktor non fisis utama yang menjadi faktor pembangunan adalah penduduk. Dalam pembangunan di sektor – sektor kehidupan, penduduk merupakan pelaku utama dalam kegiatan pembangunan. Tanpa adanya peran serta penduduk, maka pembangunan tidak akan berhasil. Faktor ekonomi juga berpengaruh untuk menunjang pembangunan. Faktor budaya, misalnya kemajuan iptek menjadi pendorong pembangunan di bidang fisik dan nonfisik.

Demikianlah beberapa faktor yang – faktor yang mempengaruhi dalam pembangunan di sektor – sektor kehidupan yang menjamin kesejahteraan. Diantara faktor – faktor tersebut, terjadi interaksi antara faktor satu dengan faktor yang lainnya. Proses demikian menunjukkan bahwa manusia dengan perilakunya itu merupakan suatu dinamika yang tumbuh dan berkembang dalam melaksanakan suatu pembangunan.

B. Pelaku pembangunan fisik dan pembangunan non fisik

Pelaku utama dalam pembangunan adalah pemerintah dibantu masyarakat. Sehingga pelaksana pembangunan bukan hanya dibebankan oleh pemerintah saja, namun masyarakat di berbagai daerah juga ikut berperan aktif dalam mengisi dan melaksanakan pembangunan. Adapun peran pemerintah dalam pembangunan adalah sebagai pengawas ataupun sebagai perencana dan pelaksana, sedangkan peran masyarakat adalah turut serta aktif dalam melaksanakan pembangunan. Sehingga kedua komponen tersebut saling bekerja sama agar pembangunan dapat berjalan lancar. Adapun bahan yang dapat disumbangkan dalam pembangunan, selain sumber daya alam, sumber daya manusia pun dapat juga ikut menyumbangkan dalam kegiatan pembangunan. Sumber daya manusia disini dalam arti masyarakat ikut andil dalam kegiatan pembangunan, baik pikiran maupun tenaga. Manusia dibekali oleh Tuhan dengan berbagai daya cipta, rasa, dan karsa. Oleh sebab itu peran serta manusia dalam pembangunan memberikan sumbangsih yang terbesar dalam melaksanakan pembangunan.

Sikap manusia dalam mengisi pembangunan tentu saja harus memperhatikan aspek – aspek yang berkaitan dengan pembangunan dan aspek – aspek lingkungan. Aspek lingkungan perlu diperhatikan agar manusia tidak semena – mena dalam memberlakukan alam, sehingga pembangunan yang semula direncanakan dapat terealisasi. Jangan sampai manusia melakukan suatu pembangunan, namun disisi lain tindakan manusia tidak memperhatikan aspek lingkungan akan berakibat pembangunan tersebut tidak akan berhasil ataupun menjadi sia – sia. Oleh karena itu, berhasilnya suatu pembangunan tergantung pada peran serta masyarakat, dalam arti mengisi pembangunan semaksimal mungkin bersama – sama dengan pemerintah, serta memperhatikan aspek – aspek yang berkaitan dengan pembangunan

ataupun berkaitan dengan aspek lingkungan. Hal ini dilakukan agar pembangunan yang direncanakan dapat terealisasi sehingga terciptalah kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat yang adil dan makmur.

C. Pembangunan fisik

Seperti pada pembahasan semula bahwa pembangunan merupakan realisasi dari suatu perencanaan. Mengulangi arti kata geografi pembangunan, di dalam kata pembangunan atau development dikandung unsur – unsur perubahan, tujuan, dan potensi. Unsur perubahan merupakan perubahan dari sesuatu yang kurang menuju kesempurnaan. Unsur tujuan yaitu tujuan yang hendak diarahkan oleh manusia untuk kelestarian, kesejahteraan dan kebahagiaan. Unsur potensi yaitu potensi masyarakat yang terdapat dalam masyarakat dan kemudian dapat digunakan untuk membiayai perencanaan.

Berdasarkan uraian tersebut dapat diambil suatu kesimpulan bahwa untuk merealisasikan unsur – unsur tersebut, maka perlu adanya realisasi yang nyata dalam pembangunan. Sehingga pembangunan bukan hanya difokuskan pada salah satu aspek saja, namun diharapkan dapat merata secara keseluruhan. Adapun pembangunan di Indonesia dapat dilakukan dalam dua aspek, yaitu pembangunan secara fisik dan pembangunan non fisik. Pembangunan secara fisik meliputi pembangunan jalan raya, pembangunan jembatan, pembangunan gedung, pembangunan pasar, dan lain sebagainya. Pembangunan fisik dilakukan agar masyarakat dapat menggunakan sarana infrastruktur yang ada untuk menunjang aktivitas kehidupan sehari – hari. Pembangunan jembatan di setiap daerah untuk menghubungkannya dua daerah yang dilintasi oleh sebuah sungai perlu dilakukan agar masyarakat bisa menjalin hubungan dengan daerah lain, sehingga aksesibilitas masyarakat dapat berjalan dengan baik.

Berdasarkan sifatnya pembangunan dapat diartikan dengan merombak secara bertahap, dengan menjalankan tambal sulam, dengan menciptakan sesuatu yang baru.

Pembangunan dengan merombak dilakukan dengan cara merombak yang sudah usang dan diganti dengan yang baru yang lebih sesuai dengan kehendak masyarakat, pemerintah, dan seiring dengan perkembangan zaman. Salah satu contoh pembangunan dengan merombak adalah pembangunan Pasar Gedhe di kota Surakarta. Pasar Gedhe surakarta awalnya dibangun dengan konstruksi khas belanda. Tentu saja bangunan pasar yang sudah tua umurnya, konstruksi bangunannya mulai usang, baik konstruksi pondasi, konstruksi lantai, maupun konstruksi atapnya. Kemudian pada tahun 2000, pasar tersebut dirombak dan direnovasi menjadi pasar yang modern, sehingga konstruksi bangunan yang sudah rapuh kini diganti dengan konstruksi bangunan yang kokoh. Sehingga masyarakat akan merasa nyaman dalam berbelanja di pasar tersebut.

Pembangunan dengan menciptakan sesuatu yang baru dilakukan dengan cara membangun bangunan yang baru sesuai dengan falsafah dan way of live suatu bangsa. Pembangunan dengan menciptakan sesuatu baru biasanya dilakukan oleh sebuah instansi tertentu guna menciptakan bangunan yang baru dan bermanfaat bagi kelangsungan hidup masyarakat. Salah satu contoh pembangunan dengan menciptakan sesuatu yang baru adalah pembangunan masjid mulai dari pembuatan pondasi sampai pemasangan atap masjid hingga dapat digunakan sebagai sarana peribadahan umat Islam.

Pembangunan tambal sulam dilakukan dengan memperbaiki yang rusak saja. Pembangunan tambal sulam ini dilakukan agar bangunan / infrastruktur yang rusak pada bagian tertentu dapat segera diperbaiki. Perbaikan tambal sulam berarti semua bangunan / infrastruktur tidak sepenuhnya diperbaiki, namun hanya bagian – bagian tertentu yang rusak saja. Salah satu contoh pembangunan tambal sulam adalah pengaspalan kembali jalan raya yang ada lubangnya pada bagian tertentu. Pengaspalan ini biasanya dilakukan agar pengguna jalan raya tidak merasa terganggu bahkan agar tidak menimbulkan kecelakaan di

jalan raya ketika melewati lubang jalan tersebut. Pembangunan tambal sulam ini biasanya dilakukan oleh instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dengan menunjuk dinas / instansi terkait, misalnya Dinas Pekerjaan Umum (DPU) kota / kabupaten setempat. Adapun dampak positif adanya pembangunan tambal sulam adalah bangunan yang rusak pada bagian tertentu saja biasanya cepat kembali sempurna, dalam artian tidak ada lagi lubang di jalan tersebut, sehingga pengguna jalan dapat nyaman menggunakan jalan yang dilaluinya tanpa adanya lubang – lubang di jalan tersebut. Namun pada kenyataannya, banyak sekali proyek pembangunan tambal sulam jalan raya memiliki konstruksi bangunan yang buruk. Konstruksi bangunan tersebut jalan menjadi tidak halus rata, sehingga bisa saja pengguna sepeda motor yang melintasi tergelincir akibat adanya konstruksi jalan yang tidak merata.

Jalan raya yang berlubang jika dibiarkan secara terus menerus akan berdampak pada pengguna jalan tersebut yaitu dapat menimbulkan kecelakaan. Oleh karena itu pemerintah melakukan perbaikan jalan dengan pengaspalan yang dilakukan tambal sulam, yaitu mengaspal pada bagian – bagian yang berlubang tersebut (gambar 3). Sehingga hasil dari tambal sulam adalah jalan tersebut tidak sepenuhnya rata halus, namun sedikit bergelombang meskipun sudah diaspal (gambar 4). Sehingga dapat disimpulkan bahwa pembangunan fisik tambal sulam memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positifnya adalah infrastruktur yang rusak bisa digunakan kembali oleh pengguna infrastruktur tersebut karena adanya perbaikan pada bagian – bagian tertentu. Namun dampak negatifnya adalah pembangunan tersebut kedepannya sewaktu – waktu dapat membahayakan penggunanya, dalam arti sewaktu – waktu timbul lagi kerusakan yang sama akibat konstruksi bangunan yang tidak kokoh akibat tambal sulam.

D. Pembangunan Nonfisik

Pembangunan non fisik berkaitan dengan pembangunan sumber daya manusia itu sendiri. Adapun pembangunan non fisik antara lain pembangunan di bidang kesehatan, pembangunan di bidang pendidikan, pembangunan di bidang ekonomi dan lain sebagainya. Pembangunan non fisik mengedepankan sumber daya manusia, dikarenakan dengan adanya pembangunan nonfisik menjadi dasar untuk melakukan pembangunan fisik. Jangan sampai pembangunan hanya bertumpu pada salah satu aspek saja, yaitu pembangunan fisik saja atau pembangunan non fisik saja, tetapi kedua pembangunan tersebut haruslah bersinergi satu sama lain. Pembangunan non fisik dilakukan guna meningkatkan taraf dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya, baik peningkatan dan kesejahteraan masyarakat dalam bidang pendidikan, kesejahteraan bidang kesehatan, maupun kesejahteraan dalam bidang lainnya. Oleh karena itu peran manusia dalam pembangunan nonfisik jangan dipandang sebelah mata, namun peran manusia dalam pembangunan nonfisik perlu diperhatikan.

Usaha di bidang pembangunan non fisik dapat dijalankan dengan cara membimbing atau guiding, cara persuasi melalui telinga dan mata (audio visual), dan dengan cara memberi stimulasi. Ketiga cara tersebut dilakukan agar masyarakat dapat tergugah untuk menimbulkan daya gerak serta dapat memberikan contoh konkret pembangunan yang sebenarnya, sehingga pembangunan dapat berjalan dengan baik.

Manusia selalu mengadakan adaptasi terhadap lingkungan dan aktif terhadap lingkungannya. Adaptasi dan aktivitas manusia ini mencerminkan dan juga mengakibatkan adanya perubahan, perubahan sosial, perubahan ekonomi, perubahan kultural, dan perubahan – perubahan lainnya. Oleh karena itu dalam melakukan adaptasi dan untuk menerapkan usaha di bidang pembangunan non fisik, manusia harus melihat situasi dan kondisi pada masing – masing daerah. Hal

ini dilakukan karena pembangunan nonfisik antara daerah satu dan daerah lainnya berbeda – beda. Sehingga timbul permasalahan bagaimana untuk menerapkan pembangunan nonfisik dapat berjalan baik dan merata. Jawabannya adalah tergantung masing – masing individu dalam menerima dan menerapkan tantangan pembangunan nonfisik itu sendiri.

Untuk merealisasikan pembangunan nonfisik di berbagai daerah perlu adanya beberapa cara. Salah satu cara untuk merealisasikan adalah perlu adanya penyuluh dalam memberikan penyuluhan ataupun memberikan bimbingan kepada masyarakat di setiap daerah. Sehingga diharapkan dengan adanya bimbingan dari penyuluh masyarakat mampu menerima tantangan pembangunan nonfisik.

Peran penyuluh dari dinas pertanian untuk memberikan penyuluhan mengenai sistem pertanian yang baik kepada masyarakat merupakan salah satu usaha dalam bidang pembangunan nonfisik. Begitu pula ada gambar 6, penyuluh dari dinas pendidikan, (misalnya seorang uru) memberikan ilmu baca tulis agar masyarakat desa tidak lagi buta huruf / buta aksara. Sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk merealisasikan pembangunan nonfisik perlu adanya peran pemerintah lewat dinas-dinas terkait dalam memberikan bimbingan, stimulasi, dan persuasi kepada masyarakat agar pembangunan nonfisik dapat berjalan dengan baik. Hal ini merupakan salah satu langkah agar kesejahteraan masyarakat dalam pembangunan nonfisik dapat berjalan dengan baik, sehingga kesejahteraan serta kebersamaan masyarakat untuk mensukseskan pembangunan, baik pembangunan nonfisik dapat tercapai serta dapat menyelaraskan dengan pembangunan fisik di daerah tersebut.

BAB 3

BENCANA DARI MASA KE MASA

A. Gempa, tsunami

Sebagian penduduk sedang sibuk mempersiapkan festival di pantai untuk merayakan hari ulang tahun Kota Palu. Lapak-lapak pedagang sudah berjajar di sepanjang pantai, siap menjual beragam panganan, mulai dari camilan gorengan hingga mi. Di antara mereka adalah putri Irma yang menitipkan anak-anaknya ke sang nenek sehingga dia bisa menikmati perayaan malam itu. Matahari mulai tenggelam sehingga teriknya perlahan pudar, berganti dengan sejuknya malam.

Sekitar 16 kilometer sebelah selatan dari pesisir Kota Palu, para remaja dari sekolah menengah atas asal Kecamatan Sigi Biromaru sedang berada di Gereja Jono Oge untuk mengikuti kajian Alkitab. Rencananya malam itu mereka akan bersantap bersama, mengadakan permainan kelompok, dan menonton film sebelum pergi tidur. Di Kelurahan Petobo, Ersu Fiona yang berusia 21 bulan sedang bermain dengan kakaknya, Chandra Irawan, 11, sementara sang ibu sedang sibuk mengurus adik mereka yang paling kecil.

B. Gempa mengguncang

Pada pukul 18.02 WITA, bencana terjadi. Tanah yang mereka injak tiba-tiba berguncang kuat, jalan-jalan terbelah seperti ombak, dan bangunan-bangunan ambruk. Gempa berkekuatan 7,4 pada skala Richter telah melanda Palu di Sulawesi Tengah. Gempa ini bukanlah yang pertama, tapi inilah yang terkuat. Di Kelurahan Petobo, tempat Ersu Fiona sedang bermain, tanah seketika berubah seperti lumpur hisap. Kakaknya, Chandra Irawan, menarik tangannya dan mereka langsung berlari. Di kawasan lain, sejumlah penyintas mengatakan mereka dikejar gelombang lumpur yang melahap bangunan dan menyeret manusia ke

dalamnya. Gereja tempat lebih dari 80 pelajar sedang mengikuti kajian Alkitab, bergerak sejauh 2 kilometer dari tempat asalnya.

C. 18.05 WITA

Lima menit kemudian, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis peringatan tsunami. Lembaga itu mewanti-wanti gelombang laut akan mencapai 0,5 sampai tiga meter. Antara tiga hingga enam menit berikutnya Kota Palu diterjang ombak setinggi enam meter. Masyarakat setempat hanya punya waktu 10 menit, dari saat gempa mengguncang sampai tsunami menerpa, untuk melarikan diri ke tempat tinggi. Tatkala Nur menyaksikan gelombang tinggi menuju rumahnya di pesisir, dia menarik dua anaknya dan berlari.

Kami lari menyelamatkan diri, gelombangnya mengejar kami. Kami dan gelombang seperti balapan. Saya tidak pakai sepatu dan kaki saya berdarah-darah. Gempa tersebut ternyata juga merusak jaringan listrik dan komunikasi. Itu artinya banyak orang, termasuk Nur, tidak menerima peringatan tsunami. Indonesia sebenarnya punya sistem deteksi dini tsunami, namun "sangat terbatas".

Kepala Pusat Gempa dan Tsunami BMKG, Rahmat Triyono, mengatakan kepada BBC News Indonesia bahwa dari 170 sensor gempa yang dimiliki BMKG, anggaran pemeliharaan hanya ada untuk 70 sensor. Bahkan, perangkat pemantau ombak terdekat dengan Palu, yang mendeteksi tsunami ini, berada sejauh 200 kilometer. Dan perangkat itu hanya bisa mendeteksi kenaikan ombak setinggi 6cm, yang saat itu dinilai "tidak signifikan".

D. Apa yang menyebabkan gempa?

Gempa disebabkan oleh lempengan bumi yang saling bertumbukan satu sama lain. Ini terjadi secara konstan, namun kadang tumbukannya cukup besar dan relatif dekat dengan area padat penduduk sehingga menimbulkan konsekuensi parah.

E. Gempa yang melanda Indonesia dari tahun 1990-2018

Pada 28 September di Palu, getaran-getaran kecil terjadi sepanjang hari, namun gempa 7,4 pada skala Richter berlangsung saat Patahan Palu Koro yang melintasi Kota Palu, bergeser sekitar 10 kilometer di bawah permukaan tanah. Sejak saat itu, ada sedikitnya 500 gempa susulan di Palu, yang sebagian besar di antaranya tidak dirasakan warga. Wilayah Indonesia sangat berpotensi terjadi gempa bumi karena posisinya yang berada di pertemuan tiga lempeng utama dunia, yaitu Eurasia, Indoaustralia dan Pasifik.

Selain berada di antara lempeng-lempeng utama dunia, posisi Indonesia terletak di Cincin Api Pasifik (*Ring of Fire*) yaitu daerah 'tapal kuda' sepanjang 40.000 km yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan Samudra Pasifik. Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi dan 81% dari gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang Cincin Api ini.

F. Apa yang menyebabkan tsunami?

Bagaimana bisa kenaikan permukaan laut setinggi 6cm, yang dideteksi BMKG setelah gempa, bisa membentuk gelombang setinggi 6 meter? Itu karena bentuk Teluk Palu. Wujudnya yang panjang dan menyempit menyebabkan kecepatan dan tinggi gelombang semakin bertambah saat menuju Kota Palu. Saat pertama menerjang, tsunami merontokkan Jembatan Ponulele yang menghubungkan Palu Timur dan Palu Barat. Mengambil nama mantan Gubernur Sulawesi Tengah, Aminuddin Ponulele, jembatan kuning itu merupakan ikon Kota Palu. Kini, sebagian jembatan tersebut roboh dan tenggelam. Gelombang tsunami menerjang bagian ujung Teluk Palu, kawasan yang paling banyak dihuni penduduk di Kota Palu dan seluruh Sulawesi Tengah. **Berdasarkan data statistik Pemkot Palu, ada 374.000 yang tercatat bermukim di kota tersebut pada 2016.**

1. Tanah Longsor di Kolombia

Bencana tanah longsor menerjang kota Mocoa, Kolombia, pada Jumat malam, 31 Maret 2017. Menyebabkan setidaknya 254 orang tewas, 43 di antaranya anak-anak. Longsor di Kolombia ini menjadi serangkaian bencana serupa yang melanda kawasan sisi pasifik Amerika Selatan dalam beberapa bulan sebelumnya. Bencana serupa juga terjadi di Peru dan Ekuador yang mengakibatkan sejumlah warga tewas.

2. Banjir dan Badai di Sri Lanka dan Indi

Hujan dan badai petir berturut-turut menghantam wilayah Sri Lanka dan India, Senin, 29 Mei 2017. Sedikitnya 201 orang tewas akibat banjir dan longsor serta topan di kedua negara tersebut. Banjir paling parah sejak 2003 ini juga memutus akses ke banyak desa. Sebanyak 557.500 orang diperkirakan terdampak banjir tersebut, sebagian besar di antaranya bekerja di perkebunan karet. Sementara itu, hampir 75.000 penduduk mengungsi dari rumah mereka.

3. Banjir Bandang di Sierra Leone

Banjir bandang dan longsor melanda ibu kota Sierra Leone, Freetown, pada Senin, 14 Agustus 2017. Bencana dahsyat itu menyebabkan setidaknya 312 orang tewas, sementara lebih dari 2.000 warga harus kehilangan tempat tinggal. Namun salah satu sumber melaporkan korban tewas mencapai lebih dari 600 jiwa. Bencana itu dicatatkan sebagai yang terburuk melanda Sierra Leone dalam puluhan tahun terakhir.

4. Topan Harvey dan Irma di AS

Bulan Agustus hingga September 2017 lalu menjadi waktu di mana cuaca buruk melanda Amerika Serikat dengan serangkaian badai. Dua yang tercatat paling memberikan dampak yakni badai Harvey di bulan Agustus dan badai Irma yang menerjang pada September. Badai Harvey menyebabkan kerusakan paling parah di negara bagian Texas, tepatnya di kota Houston. Kejadian ini mendesak Presiden Donald Trump mendeklarasikan darurat bencana. Bencana itu pun dicatatkan sebagai badai terhebat yang pernah melanda AS.

Selanjutnya, badai Irma menerjang Karibia, Puerto Rico dan Florida, menyebabkan jutaan warga mengungsi. Kendati tidak menimbulkan jumlah korban jiwa yang besar, namun kerugian secara materi dan ekonomi sangat dirasakan warga yang terdampak badai. Kerugian ekonomi yang diderita AS akibat bencana badai Harvey dan Irma ditaksir mencapai 150 miliar hingga 200 miliar dolar AS.

5. Gempa di Meksiko

Di bulan September, Meksiko dilanda tidak hanya sekali tetapi dua kali gempa bumi besar yang menyebabkan total lebih dari 200 korban tewas. Gempa bumi berkekuatan 8,4 skala richter terjadi pada Kamis, 7 September 2017, menjelang tengah malam. Guncangan terjadi di wilayah pantai selatan dengan pusat gempa di samudra pasifik, 87 kilometer di lepas pantai Pijijiapan. Gempa yang disebut menjadi yang terbesar dalam sejarah Meksiko ini menyebabkan setidaknya 58 korban tewas dan lebih dari 200 luka-luka. Belum pulih dari gempa pertama, Meksiko kembali diguncang gempa besar pada Rabu, 20 September 2017. Meski secara skala lebih kecil, yakni 7,1 skala richter, namun korban yang ditimbulkan jauh lebih besar, mencapai lebih dari 230 korban tewas.

6. Gempa di Perbatasan Iran-Irak

Pertengahan November, gempa mengguncang kawasan Timur Tengah, tepatnya di pegunungan yang menjadi perbatasan antara Iran dengan Irak. Kerusakan parah terjadi di wilayah Iran akibat gempa dengan magnitudo 7,3 yang mengguncang pada Minggu, 12 November 2017 itu. Setidaknya 450 orang menjadi korban tewas, sementara ribuan lainnya luka-luka. Lebih banyak lagi warga yang harus kehilangan tempat tinggal. Sedangkan di wilayah Irak, meski juga timbul korban jiwa dan materi, namun tidak sebanyak dan separah di Iran.

7. Badai Tropis di Filipina

Menjelang penghujung tahun, cuaca buruk menghantui masyarakat Filipina. Serangkaian badai tropis menimbulkan kerusakan parah dengan memicu banjir dan juga longsor. Dampak paling parah terjadi akibat badai

tropis Tembin yang menerjang pulau Mindanao pekan lalu. Laporan terakhir korban tewas telah menyentuh angka 200 orang, sementara 144 lainnya hilang. Badai juga mengakibatkan banjir dan longsor di sebuah desa pegunungan, Dalama, dan menghancurkan 103 rumah warga. Seminggu sebelumnya badai tropis Kai juga melanda Filipina bagian tengah, menyebabkan setidaknya 54 orang tewas dan 24 hilang.

Bencana alam masih akan terus terjadi di masa mendatang. Meski terkadang bisa diprediksi, namun tidak lantas menjadikan manusia dapat mencegahnya. Kita hanya bisa mempersiapkan diri menghadapi bencana. Selain itu dengan berusaha menjaga keseimbangan alam untuk memperkecil kemungkinan bencana akibat kerusakan alam.

G. Sejarah Gempa Bumi 1699 yang Mengguncang Banten dan Jakarta

Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,4 pada Jumat tanggal 2 Agustus 2019 pukul 19.03 WIB malam mengguncang Banten, terasa hingga Jakarta serta sebagian Jawa dan Sumatera. Sejarah mencatat, jauh sebelumnya, yakni tanggal 5 Januari 1699, fenomena alam serupa juga pernah terjadi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyatakan pusat gempa yang berlangsung Jumat malam lalu berada di 147 km Barat Daya Sumur-Banten dengan kedalaman 10 kilometer. BMKG juga sempat mengeluarkan peringatan dini potensi tsunami sebelum diakhiri pada jam 21.35 WIB. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa ini dipicu penyesaran oblique yaitu kombinasi gerakan mendatar dan naik. Jadi masyarakat tetap tenang, namun waspada dan juga diimbau agar tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Sementara itu, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) mencatat bahwa wilayah yang berdekatan dengan pusat gempa bumi pada Jumat malam adalah pesisir selatan Banten, Jawa Barat, dan Lampung. Berdasarkan lokasi pusat gempa bumi dan kedalamannya,

gempa bumi berasosiasi dengan aktivitas penunjaman Lempeng Indo-Australia ke bawah Lempeng Eurasia.

Sejarah Gempa Bumi 1699 Tanggal 5 Januari 1699, saat Nusantara masih diduduki VOC-Belanda yang kala itu dipimpin oleh Gubernur Jenderal Willem van Outhoorn (1691-1704), Batavia dan sekitarnya diguncang gempa bumi yang cukup besar. Penelitian berjudul “*Indonesia’s Historical Earthquakes*” dalam Geoscience Australia (2015) yang disusun Jonathan Griffin dan kawan-kawan menyebutkan, gempa pada 1699 ini merupakan gempa bumi bersejarah yang paling signifikan pada abad ke-17. Anthony Reid lewat buku *Historical Evidence for Major Tsunamis in the Java Subduction Zone* (2012) menuliskan bahwa guncangan saat itu lebih besar dan kuat dibandingkan dengan gempa bumi yang pernah terjadi. Menurut data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang disajikan dalam makalah bertajuk “*Palaeotsunami, Interdisciplinary Study of The South Java Giant Tsunami*” (2017), gempa ini terjadi ketika Batavia diguyur hujan deras pada pukul 01.30 dini hari. Di Bantam (Banten) dan sebagian daerah di Jawa bagian barat lainnya, termasuk Buitenzorg (Bogor) dirasakan gempa susulan pada pukul 06.00 pagi, demikian pula masyarakat di Lampong (Lampung) dan sekitarnya yang juga merasakan guncangan yang cukup besar.

H. Tujuh Bencana Alam Dunia di Januari 2020

Bencana alam seperti banjir, badai, hingga letusan gunung berapi sudah lumrah terjadi sepanjang peradaban umat manusia. Namun, bagaimana jika serangkaian bencana alam terjadi serentak di seluruh dunia ketika kita bahkan belum berlalu dari bulan pertama 2020? Berikut ini ketujuh bencana alam di berbagai negara di dunia yang membuktikan dahsyatnya perubahan iklim yang mengguncang tatanan kehidupan di Bumi. Umat manusia sejak lama telah mengabaikan kerusakan yang mereka perbuat di muka Bumi dan kini tiba saatnya pembalasan Ibu Pertiwi. Namun, tak sedikit yang berpura-pura

serangkaian bencana alam, kabut asap, pemanasan global, dan polusi bukan masalah besar hanya karena mereka tidak merasa terpengaruh. Faktanya, berbagai bencana di seluruh dunia menunjukkan gejala perubahan iklim yang mematikan. Dilansir dari *World of Buzz*, sebagai perspektif perbandingan untuk menunjukkan seberapa buruk situasinya, berikut ini ketujuh bencana alam yang terjadi pada Januari 2020:

1) Erupsi Gunung Taal di Filipina

Para ilmuwan telah memperingatkan sebelumnya, perubahan iklim dapat memicu letusan gunung berapi di seluruh dunia. Erupsi Gunung Taal terjadi di 60 kilometer selatan Manila, ibu kota Filipina. Salah satu gunung berapi terkecil di dunia bernama Taal itu memuntahkan awan besar abu yang menghasilkan Menara asap setinggi 14 kilometer di atas kawah. Itu bukan satu-satunya letusan gunung berapi yang terjadi karena Volcanic Ash Advisory Centers melaporkan 25 gunung berapi lain di seluruh dunia yang tengah meletus saat ini.

2) Kebakaran Australia

Kenaikan drastis suhu udara dan bencana kekeringan parah kian memperburuk situasi di Australia yang dilanda kebakaran hutan dan semak dahsyat. Beberapa orang mungkin berpendapat, kebakaran Australia terjadi karena kekeringan, bukan perubahan iklim. Namun, mereka tidak memperhitungkan bahwa perubahan iklim telah menyebabkan salah satu musim panas yang paling kering sepanjang catatan sejarah di Australia kali ini. Kebakaran hutan dan semak Australia telah menewaskan lebih dari 500 juta hewan dan meninggalkan koala dalam keadaan rentan di ambang kepunahan.

3) Gletser Selandia Baru berubah kecoklatan

Kebakaran hutan baru-baru ini yang meluluhlantakkan Australia turut menimbulkan kekhawatiran bagi negara tetangga seperti Selandia Baru. Gletser-gletser di Selandia Baru berubah menjadi kecoklatan sebagai akibat dari kebakaran Australia, sekaligus memicu kehancuran gletser dengan lebih cepat.

Gletser-gletser di Selandia Baru berubah menjadi coklat setelah terkena debu dari kebakaran hutan dan semak di Australia, yang dapat menyebabkan gletser mencair hingga 30 persen.

4) Vegetasi di pegunungan Himalaya

Perubahan iklim yang terjadi sangat cepat di pegunungan Himalaya telah menyebabkan pencairan gletser Himalaya yang menimbulkan peningkatan pertumbuhan vegetasi semak dan rumput di kawasan pegunungan. Pertumbuhan rumput sekilas merupakan hal baik, tetapi berbeda kasusnya jika itu terjadi di Himalaya. Para ilmuwan mengatakan bahwa pertumbuhan vegetasi di pegunungan Himalaya akan mempercepat laju melelehnya gletser dan meningkatkan risiko banjir.

5) Banjir di Dubai, Uni Emirat Arab

Banjir biasanya sangat jarang terjadi di Dubai, Uni Emirat Arab. Namun, saat ini kota tersebut terkena dampak banjir, yang menyebabkan banyak penerbangan telah ditunda atau dibatalkan. Banjir sangat tidak biasa di Dubai karena kota itu biasanya tidak menerima banyak hujan. Curah hujan ekstrem yang terjadi di sana terkait erat dengan perubahan iklim. Dengan tingkat curah hujan tinggi, hujan selama 3 jam saja nyaris sebanding dengan curah hujan selama satu bulan yang biasanya terjadi di sekitar Dubai.

6) Banjir di Jakarta, Indonesia

Banjir memang merupakan bencana tahunan di ibu kota Indonesia, Jakarta. Meski banjir di Jakarta sama sekali tidak mengejutkan bencana kali ini konon merupakan yang terburuk selama dekade terakhir dan telah merenggut 66 korban jiwa hingga saat ini. Banjir Jakarta sejak 31 Desember 2019 malam disebabkan oleh hujan lebat terus-menerus yang telah memicu tanah longsor dan banjir. Kematian yang terjadi selama banjir Jakarta pada awal Januari 2020 dikaitkan dengan beberapa faktor seperti hipotermia dan sengatan listrik.

7) Badai di wilayah selatan Amerika Serikat

Badai hebat melanda Negara Bagian Texas, Alabama, dan Louisiana di Amerika Serikat dan merenggut 11 korban jiwa sejauh ini. Sementara itu, wilayah selatan di negara itu menghadapi berbagai masalah banjir, angin kencang, dan badai. Menurut sejumlah laporan media, badai di kawasan itu sudah biasa terjadi pada akhir tahun, meski intensitasnya luar biasa mengejutkan. Gelombang badai dahsyat di wilayah selatan Amerika Serikat juga banyak dihubungkan dengan perubahan iklim dan pemanasan global.

Di tengah serangkaian bencana alam akibat perubahan iklim yang mengguncang berbagai belahan dunia, kita dikejutkan dengan ancaman wabah virus penyakit baru yang merebak dari Kota Wuhan di China. Meskipun belum dapat dipastikan apakah wabah virus itu terkait langsung dengan perubahan iklim, menurut catatan *World of Buzz*, penelitian selama bertahun-tahun telah menunjukkan, penyakit diperkirakan akan memburuk akibat kenaikan suhu global. Sudah saatnya kita menyerukan masyarakat dan pemerintah dunia untuk menyadari betapa mengerikannya situasi perubahan iklim bagi planet Bumi. Langkah selanjutnya yang perlu segera dilakukan adalah mengakui perubahan iklim dan melakukan langkah-langkah aktif untuk memerangnya.

Beberapa tindakan yang dapat dipraktikkan segera termasuk menggunakan energi dengan bijak, membatasi limbah seperti sedotan atau kantong plastik, melakukan berbagai tindakan untuk menyelamatkan hutan seperti menanam pohon baru dan menggunakan lebih sedikit kertas, hingga mengurangi emisi dengan lebih banyak berjalan dan bersepeda atau mengendarai transportasi publik, daripada mengemudi kendaraan bermotor pribadi. *World of Buzz* menyimpulkan, menyimak seluruh bencana individu yang terjadi di beragam negara di dunia akan menempatkan segala sesuatu ke dalam perspektif. Pencegahan setiap bencana tunggal tidak akan ada artinya tanpa melakukan perubahan sikap berarti untuk menangani bencana global perubahan iklim.

BAB 4

DAMPAK BENCANA TERHADAP AKTIVITAS EKONOMI DUNIA

A. Potensi Resesi Terdalam Ekonomi Dunia Akibat Pandemi Corona

Guncangan berskala besar dari pandemi Covid-19 dan berbagai kebijakan untuk menahan dampaknya telah menyebabkan ekonomi global dalam kontraksi sangat parah. Menurut perkiraan Bank Dunia, ekonomi global akan kontraksi hingga 5,2 persen tahun ini. Kontraksi tersebut menjadi resesi terdalam sejak Perang Dunia II dengan sebagian besar ekonomi mengalami penurunan *output* per kapita yang dalam sejak 1870.

Aktivitas ekonomi di antara negara-negara maju diperkirakan menyusut 7 persen pada tahun ini. Penyebabnya, terjadi gangguan terhadap permintaan dan penawaran, perdagangan serta keuangan dalam negeri. Sementara itu, pasar dan ekonomi negara berkembang (EMDEs) diprediksi kontraksi 2,5 persen sepanjang 2020. Ini menjadi kontraksi pertama EMDEs sebagai sebuah kelompok, dalam setidaknya 60 tahun terakhir. Pendapatan per kapita diperkirakan menurun sebesar 3,6 persen, akan membawa jutaan orang ke dalam kemiskinan ekstrim tahun ini.

Tekanan pandemi menghantam paling keras di negara-negara dengan penyebaran wabah paling parah. Mereka yang memiliki ketergantungan besar terhadap perdagangan global, pariwisata, ekspor komoditas dan pembiayaan eksternal juga terdampak signifikan. Besarnya gangguan akan bervariasi dari satu daerah dengan daerah lain. Tetapi, semua EMDEs dinilai Bank Dunia memiliki kerentanan yang semakin besar akibat guncangan eksternal. Selain itu, disrupsi pada aktivitas belajar mengajar formal dan akses layanan kesehatan primer cenderung memiliki

dampak jangka panjang pada pengembangan sumber daya manusia.

Wakil Presiden Kelompok Bank Dunia untuk Pertumbuhan, Keuangan dan Lembaga yang Adil Ceyla Pazarbasioglu mengatakan, situasi ekonomi tahun ini menjadi *outlook* yang sangat dalam. Khususnya karena krisis cenderung meninggalkan bekas luka panjang dan menimbulkan tantangan global yang besar. Pazarbasioglu menjelaskan, urutan prioritas Kelompok Bank Dunia saat ini adalah menangani kesehatan global dan keadaan darurat ekonom. Selain itu, komunitas global harus bersatu untuk menemukan cara membangun kembali pemulihan sekuat mungkin untuk mencegah lebih banyak orang jatuh ke dalam kemiskinan dan pengangguran.

Untuk asumsi dasar (*baseline*), Bank Dunia menyebutkan, pertumbuhan global dapat membaik pada 2021 dengan pertumbuhan menyentuh 4,2 persen. Sementara ekonomi maju tumbuh 3,9 persen dan EMDEs bangkit kembali sebesar 4,6 persen. Tetapi, ini dengan asumsi, pandemi dapat mereda sehingga langkah-langkah penanganan dapat berkurang dan dampak buruk pandemi berkurang pada semester kedua 2020. Bagaimanapun, Bank Dunia menekankan, prospek ekonomi masih sangat tidak pasti dan banyak downside risk yang dominan. Di antaranya kemungkinan pandemi terjadi berkepanjangan, pergolakan di pasar keuangan dan perdagangan global yang kembali bermasalah.

Apabila risiko tersebut terjadi, Bank Dunia memperkirakan ekonomi dunia dapat kontraksi hingga delapan persen pada 2020 dengan EMDEs menyusut hampir lima persen. Pemulihan terjadi pada 2021, namun dengan laju sangat lambat, yakni tumbuh satu persen. Ekonomi Amerika diperkirakan berkontraksi 6,1 persen tahun ini, mencerminkan gangguan yang terkait dengan langkah pengendalian pandemi. *Output* wilayah Eropa diprediksi menyusut lebih dalam, hingga 9,1 persen, pada 2020. Wabah yang meluas dan memakan banyak korban pada aktivitas ekonomi menjadi penyebabnya.

Ekonomi terbesar dunia, China, diprediksi mengalami pertumbuhan melambat 1 persen pada tahun ini. Tapi, ekonomi mereka diprediksi akan *rebound* menjadi 6,9 persen pada 2021, seiring pemulihan aktivitas secara bertahap di sana dan kebijakan *lockdown* mulai dicabut di beberapa negara. Dengan mengecualikan China, aktivitas ekonomi Asia Timur dan Pasifik diprediksi kontraksi sebesar 1,2 persen pada tahun ini. Ekonomi akan kembali *rebound* hingga 5,4 persen pada 2021.

Di antara ekonomi utama di wilayah Asia Timur dan Pasifik, Malaysia, Filipina dan Thailand diperkirakan akan mengalami kontraksi terdalam tahun ini. Sementara Malaysia tumbuh negatif 3,1 persen, Filipina dan Thailand masing-masing tumbuh negatif 1,9 persen dan lima persen. Kebijakan *shutdown* domestik, pengurangan aktivitas pariwisata, gangguan terhadap perdagangan dan manufaktur hingga *spillover* dari pasar keuangan terjadi di negara-negara tersebut.

B. Ekonomi Indonesia

Aktivitas ekonomi Indonesia diperkirakan konstan tumbuh 0 persen pada 2020. Ekonom senior Bank Dunia atau World Bank (WB), Ralph Van Doorn, sebelumnya menyebut, proyeksi 0 persen itu akibat implementasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) selama dua bulan terakhir. Kami perkirakan pertumbuhan ekonomi akan melambat ke 0 persen. Asumsi ini berdasarkan dua bulan implementasi dari PSBB yang efektif mulai April hingga Mei bahkan sampai Juni. Ralph mengatakan, prediksi tersebut juga merupakan imbas dari perekonomian global yang melambat, baik di negara maju maupun berkembang, sehingga berpengaruh pada harga-harga komoditas. Konsumsi akan melambat karena terjadinya PHK dihasilkan dari penurunan kegiatan ekonomi dan menurunnya kepercayaan konsumen.

Selanjutnya, Ralph memperkirakan pertumbuhan investasi turut melambat akibat ketidakpastian berakhirnya wabah Covid-19 serta penanganannya, harga komoditas

rendah, dan perlemahan ekonomi global. Lalu, impor jatuh lebih cepat daripada ekspor sehingga tecermin dalam neraca pembayaran dan peningkatan defisit transaksi berjalan. Kemudian, ia memprediksikan utang RI berada di level 37 persen dari PDB yang didorong oleh defisit lebih tinggi, pertumbuhan lebih lambat, depresiasi nilai tukar rupiah, guncangan suku bunga, serta banyaknya pinjaman untuk membiayai paket stimulus. Oleh sebab itu, Ralph menyatakan berdasarkan, berbagai pertimbangan dan prediksi tersebut, Bank Dunia telah menyiapkan skenario terburuk, yaitu perekonomian Indonesia akan berkontraksi hingga 3,5 persen dari PDB. Jika terjadi PSBB diimplementasikan selama empat bulan maka akan menyebabkan kontraksi ekonomi sebesar 3,5 persen dari PDB.

Akibat dari kontraksi ekonomi itu, Ralph juga memproyeksikan penduduk miskin Indonesia akan meningkat 2,1 persen sampai 3,6 persen. Artinya, jumlahnya bertambah 5,6 juta hingga 9,6 juta orang pada tahun ini akibat dampak pandemi Covid-19. Kami perkirakan perlambatan ekonomi menyebabkan tingkat kemiskinan naik sekitar 2,1-3,6 persen atau 5,6 juta-9,6 juta orang miskin baru relatif pada skenario jika pada 2020 tidak terjadi pandemi.

Menurut Ralph, pemerintah perlu mendukung penduduk miskin dan rentan miskin seperti penyediaan jaring pengaman sosial yang memadai serta dukungan terhadap industri dan kesehatan. Ia menilai paket stimulus fiskal yang telah dikeluarkan oleh pemerintah menunjukkan adanya pergeseran belanja seperti dari infrastruktur menuju jaring pengaman sosial dan dukungan industri. Bank Dunia pun menyetujui langkah pemerintah itu. Kami setuju ini merupakan langkah yang perlu diambil, namun mungkin tidak cukup. Sementara itu, Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Hidayat Amir, optimistis bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia akan tetap berada dalam skenario pemerintah, yaitu 2,3 persen hingga minus 0,4

persen. Kalau tadi World Bank menaruh situasi skenarionya pertumbuhan Indonesia full year nol persen, tapi kami di pemerintah Kemenkeu memprediksikan akan tetap tumbuh di kisaran 2,3 persen sampai minus 0,4 persen.

C. Mitigasi Dampak Ekonomi Virus Corona

Setelah melewati masa berat perang dagang dengan AS, Tiongkok kembali harus berhadapan dengan serangan lain. Bukan serangan senjata maupun kebijakan perdagangan, Tiongkok menghadapi serangan wabah virus Corona (2019-nCov). Virus yang mulanya mewabah di Kota Wuhan, saat ini telah menjadi epidemik menyebar ke daratan Tiongkok lain hingga ke setidaknya 26 negara lain. Setidaknya tercatat 24.953 kasus terjangkit Corona di Tiongkok dengan jumlah korban jiwa mencapai 699 orang.

Secara global, virus corona telah menyerang 33.800 orang dengan total korban 717 jiwa. Dengan masifnya serangan virus tersebut, banyaknya korban dan intensitas penambahan yang kian meningkat, serangan virus corona telah menjadi bencana kemanusiaan global awal 2020 ini. Ekonomi Tiongkok tak luput dari dampak virus Corona. Aktivitas ekonomi baik produksi maupun konsumsi diprediksi melambat. Fokus pemerintah dan warga Tiongkok tentu saat ini adalah meminimalkan dampak penularan virus serta penyelamatan; hal ihwal aktivitas ekonomi terabaikan. Indeks pasar modal bisa menjadi cerminan merosotnya aktivitas ekonomi. Tiga bursa saham Tiongkok yakni Shanghai Index, TWSE, dan Hangseng menunjukkan rapor merah dengan indeks yang menurun masing-masing sebesar -7,72%, -5,72%, dan -2,82%. Merosotnya indeks bursa saham Tiongkok kali ini lebih dalam dibanding pada saat serangan virus SARS pada 2003, yang mana Shanghai Index dan Hangseng merosot sebesar -3,4% dan -2,58%.

The *Black Swan Effect* (peristiwa langka yang tidak terduga dan berdampak besar) diprediksi masih akan membayangi pasar modal Tiongkok yang mencerminkan

peningkatan risiko perekonomian. Dalam jangka pendek, kondisi ini tentu akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi negeri itu, yang dapat dipastikan akan menurun. Lembaga pemeringkat S&P memproyeksikan pertumbuhan ekonomi bakal merosot hingga 5% pada 2020 akibat bencana tersebut. Sebagai negara dengan kekuatan ekonomi terbesar, segala sesuatu yang menghantam ekonomi Tiongkok tentu saja berdampak pada kondisi ekonomi negara lain.

Tiga Jalur

Dampak ekonomi diprediksi bersifat jangka pendek. Terdapat setidaknya tiga jalur transmisi dampak *force majeure* virus corona terhadap ekonomi Indonesia. Pertama, jalur pariwisata. Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menghentikan aktivitas penerbangan dari dan ke Tiongkok serta penghentian sementara pemberian visa bagi warga negara Tiongkok. Kunjungan wisman dari Tiongkok merupakan yang terbesar ketiga setelah wisman Malaysia dan Singapura. Merujuk pada data BPS, jumlah wisman Tiongkok per Desember 2019 secara rata-rata (2017-2019) mencapai 175.123 orang per bulan atau 1.276.586 orang per tahun. Rata-rata wisman Tiongkok menghabiskan waktu selama 6 hari di Indonesia dengan rata-rata pengeluaran harian sebesar 173,2 USD per wisman.

Dengan adanya kebijakan menutup penerbangan dari dan ke Tiongkok, maka sektor pariwisata akan kehilangan pendapatan sebesar 182 juta USD atau sebesar Rp. 2,48 Trilyun per bulan. Angka tersebut tentu baru secara nominal, namun pasti memiliki dampak pengganda (multiplier) pada tenaga kerja dan sektor-sektor turunannya yang sudah pasti menghasilkan angka yang jauh lebih besar. Lebih lagi bagi Provinsi dengan kunjungan wisman Tiongkok yang besar seperti Bali dan Sulawesi Utara.

Kedua, jalur perdagangan. Tiongkok merupakan salah satu pemain terbesar dalam peta perdagangan global dengan pangsa sebesar 13%. Tiongkok juga menjadi salah satu pangsa ekspor produk Indonesia dan sumber barang

impor terbesar. Selama ini, komoditas ekspor unggulan Indonesia menjadi salah satu penopang industri Tiongkok, seperti CPO, karet dan barang mineral tambang. Ketika ekonomi Tiongkok mengalami stagnasi, maka permintaan ekspor produk Indonesia berpotensi berkurang.

Hal tersebut tentu saja berdampak pada kinerja ekspor Indonesia. Pasalnya, selama ini Tiongkok menjadi tujuan ekspor non-migas utama dengan pangsa 16,6% atau senilai 25,85 miliar USD. Setelah menurun sebesar 4,2% pada 2019 akibat perang dagang AS-Tiongkok, kinerja ekspor Indonesia juga berpotensi terdampak negatif, minimal pada kuartal I-II 2020 ini. Tiongkok juga menjadi pemasok barang impor utama ke Indonesia dengan nilai 44,58 miliar atau 29,95% dari total impor, yang didominasi oleh barang elektronik, barang-barang mesin, dan kimia. Jika akses dari dan ke Tiongkok dibatasi, maka tentu akan berdampak terhadap arus barang impor yang menjadi bahan baku atau pendukung industri domestik.

Lebih lagi, Tiongkok juga banyak memasok komoditas bahan pangan seperti bawang putih dan buah-buahan berpotensi dihentikan sementara pasokan impornya. Dengan demikian, potensi lonjakan inflasi akan terjadi, utamanya berasal dari komoditas bawang putih. Bawang putih dapat dikatakan merupakan bahan wajib berbagai produk olahan makanan di Indonesia. Dengan permintaan yang tinggi serta terbatasnya pasokan, maka tak jarang bawang putih sering berkontribusi pada kenaikan laju inflasi kelompok pengeluaran bahan makanan.

Ketiga, jalur investasi dan keuangan. Meski tidak terkait langsung, namun sektor keuangan sedikit banyak juga berpotensi terdampak. Sejak virus corona merebak awal Januari lalu, IHSG menunjukkan tren yang menurun. Bahkan pada 3 Februari lalu, IHSG ditutup pada level 5.884,17 dan merupakan level terendah sepanjang 6 bulan terakhir.

Peningkatan risiko keuangan global akibat pelemahan bursa keuangan Tiongkok turut mempengaruhi kepercayaan investor, sehingga arus modal keluar tak

terhindarkan. Meski tidak sepenuhnya dipengaruhi oleh dampak Corona, namun kejadian di Tiongkok tersebut cukup berkorelasi dengan kondisi IHSG di Indonesia. Ketika Bank Sentral Tiongkok mulai menambah likuiditas melalui operasi pasar dengan dana sebesar USD 173 miliar, IHSG mulai menunjukkan kinerja yang positif hingga mencapai level 5.999,61. Pada saat bersamaan, meski dibarengi dengan rilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia yang menurun, laju IHSG tetap saja positif. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa IHSG lebih peka terhadap isu eksternal, yang tak lain adalah virus corona.

Simulasi dan Mitigasi

Keselamatan warga negara tetap menjadi prioritas utama, namun menjaga stabilitas ekonomi tetap harus diperhatikan. Pemerintah Indonesia wajib melakukan upaya simulasi dan mitigasi dampak ekonomi dari merosotnya aktivitas ekonomi di Tiongkok. Dengan dilakukannya simulasi dampak ekonomi, maka upaya mitigasi akan cenderung lebih presisi. Dalam jangka pendek, upaya mitigasi yang perlu dilakukan adalah meminimalkan potensi negatif inflasi yang ditimbulkan melalui jalur perdagangan. Rencana larangan impor bawang putih perlu ditinjau kembali. Jika memang secara standar kesehatan impor produk bahan pangan tidak berpotensi menyebarkan virus corona, maka impor bawang putih dan komoditas lain tetap dapat dilakukan, tentu dengan standar pengawasan yang lebih ketat.

Promosi pariwisata perlu lebih ditingkatkan lagi, utamanya ke negara-negara Timur Tengah yang secara ekonomi berpotensi dan daerah yang relatif sangat minim laporan kasus virus corona di kawasan tersebut. Dalam jangka panjang, Indonesia diharapkan dapat mengurangi ketergantungan ekonomi terhadap Tiongkok. Negara tersebut dinilai sangat rentan terhadap berbagai gejolak, baik politik-internasional, ekonomi, maupun bencana sosial utamanya wabah penyakit.

D. Bencana Alam dan Pengaruhnya Terhadap Perekonomian

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa bencana alam dapat menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja (Raker) Gubernur Seluruh Indonesia dengan tema Optimalisasi Peran Pemerintah Daerah dalam Penanganan Radikalisme, Terorisme dan Bencana di Hotel Bidakara Jakarta. Menkeu memberikan contoh bagaimana bencana alam seperti tsunami di Aceh dan gempa di Jogja berpengaruh terhadap perekonomian, yaitu potensi hilangnya Pendapatan Domestik Bruto. Gempa di Indonesia bisa berpotensi menyebabkan hilangnya GDP kita sampai 3%, 30 Billion US Dollar. Kalau kita ingat Aceh waktu tsunami itu telah membuat bencana costnya adalah 4,5 billion Dollar. Yogyakarta waktu mengalami earthquake kehilangan 30% dari GDP daerahnya. Dalam paparannya yang bertajuk Kebijakan Pendanaan Penanggulangan Bencana dan Terorisme, Menkeu menjelaskan secara geografis Indonesia selalu beresiko terhadap gempa bumi yang sifatnya seismik dan vulkanik. Indonesia juga negara yang diapit oleh dua samudra besar dunia. Curah hujan Indonesia yang sekitar 2000 mm per tahun juga termasuk yang tertinggi di seluruh dunia untuk negara kepulauan.

Oleh karena itu potensi terjadinya bencana alam seperti banjir gempa dan gempa bumi itu, kombinasi yang harus terus-menerus menjadi perhatian kita. Kita harus hidup dengan memasukkan bahwa potensi risiko ini selalu hadir di negara kita dan bagaimana kita bisa mendesain program pembangunan yang tetap resilient, istilahnya berdaya tahan. Menkeu menambahkan, untuk tahun 2018 pemerintah telah memiliki rencana Prioritas Penanggulangan Bencana diantaranya adalah penguatan kapasitas sarana prasarana untuk menangani bencana, pemulihan dana daerah bencana, penataan lingkungan dan ruang serta penguatan kelembagaan terutama di daerah.

E. Pemerintah Waspada Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia

Peningkatan negara yang terdampak virus Covid-19 di seluruh dunia seperti Amerika, Spanyol dan Italia membuat situasi ekonomi dunia semakin memburuk. Beberapa lembaga bahkan memprediksikan perlemahan ekonomi dunia, antara lain International Monetary Fund (IMF) yang memproyeksikan ekonomi global tumbuh minus di angka 3%. Menteri Keuangan (Menkeu) menjelaskan Pendapatan Negara pada bulan Maret 2020 tumbuh positif. Meskipun kemudian Pemerintah waspada terhadap dampak pandemi di bulan mendatang, mengingat wabah ini baru mulai meluas di Indonesia pada minggu kedua Maret 2020. Untuk Indonesia kita lihat sudah ada 5.516 kasus baru Covid-19 sesuai data kemarin dan masih terkonsentrasi mayoritas ada di Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta. Ini yang menyebabkan bahwa DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur, serta Banten adalah tempat terbesar dari penularan positif dari kasus Covid-19. Menkeu juga menambahkan bahwa pulau Jawa adalah pulau yang memberikan kontribusi sangat besar bagi perekonomian Indonesia. Lebih dari 57% ini nanti akan mempengaruhi cukup besar dari sisi prospek ekonomi dan kegiatan dari ekonomi masyarakat.

F. Pendapatan Negara Masih Mampu Tumbuh Positif Akhir Triwulan I Namun Tekanan Di Depan Harus Diwaspadai

Menkeu mengungkapkan pendapatan negara dan hibah pada akhir Triwulan I 2020 telah mencapai Rp375,95 triliun. Capaian pendapatan negara tersebut tumbuh 7,75% (yoy) jauh lebih baik dibandingkan pertumbuhan di bulan Februari lalu sebesar minus 0,5% (yoy). Namun demikian, kita melihat refleksi penerimaan negara di bulan Maret yg tumbuh 7,7% terlihat cukup baik dibandingkan tahun lalu yang tumbuh 4,46%, meskipun basis *supporting*-nya bukan basis ekonomi secara luas.

Hal ini menunjukkan dukungan berbagai sumber pendapatan negara dalam upaya memperkuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tengah tekanan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Realisasi Pendapatan Negara yang bersumber dari Penerimaan Perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) masing-masing secara nominal telah mencapai Rp.279,89 triliun dan Rp.95,99 triliun. Sementara itu, realisasi dari Hibah pada periode yang sama baru mencapai Rp0,08 triliun. Penerimaan Perpajakan dan PNBP tumbuh masing-masing sebesar 0,43% dan 37% (yoy).

Sementara itu, secara keseluruhan pertumbuhan komponen penerimaan Pajak hingga akhir bulan Maret 2020 masih bersumber dari pajak atas konsumsi rumah tangga, meskipun penerimaan pajak juga masih dibayangi tekanan akibat tren pelemahan industri manufaktur dan aktivitas perdagangan internasional, serta pelemahan aktivitas ekonomi akibat penyebaran Covid-19. Kemudian, seiring adanya aturan terkait *Work From Home* (WFH) baik untuk sektor pemerintah maupun sektor swasta, maka mulai terjadi perlambatan kegiatan usaha di akhir bulan Maret 2020 yang berpotensi menurunkan penyerahan dalam negeri yang kemudian akan menekan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Dalam Negeri (PPN DN) di bulan April 2020. Kondisi tersebut kemungkinan akan berlanjut dan semakin berkontraksi di bulan Mei, mengingat di bulan April sebagian daerah sudah melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa wilayah terdampak. Sejalan dengan penerapan WFH dan PSBB tersebut, Pemerintah memberikan fasilitas perpajakan berupa relaksasi pembayaran PPh Pasal 29 OP dan pelaporan SPT PPh OP, yang mana berimbas pada belum optimalnya realisasi penerimaan PPh Pasal 29 OP. Penerimaan Kepabeanan dan Cukai secara nominal utamanya masih didukung oleh penerimaan dari Cukai dan Bea Masuk (BM). Dilihat dari pertumbuhannya, penerimaan Kepabeanan dan Cukai tumbuh mencapai 23,60% (yoy), yang terutama berasal dari pertumbuhan

penerimaan Cukai yang tercatat sebesar 36,50% (yoy). Di sisi lain, realisasi penerimaan Bea Keluar (BK), pertumbuhannya secara kumulatif masih tumbuh negatif 32,56% (yoy). Kontraksi pada pertumbuhan pajak perdagangan internasional terjadi akibat turunnya volume impor, penurunan harga komoditas, dan melambatnya aktivitas ekspor barang mentah sebagai dampak mewabahnya Covid-19 di berbagai negara.

Realisasi PNBP sampai dengan Triwulan I Tahun 2020 tumbuh positif sebesar 36,80 % dibandingkan periode yang sama tahun 2019 (Rp70,16 triliun). Secara lebih terperinci, pencapaian realisasi triwulan ini terutama bersumber dari PNBP SDA migas tercatat sebesar Rp28,64 triliun (22,5% dari APBN 2020) atau tumbuh 7,42% (yoy). Penerimaan PNBP nonmigas sampai akhir Maret mengalami penurunan sebesar 22,41%. Sementara itu, capaian pendapatan dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan hingga Maret 2020 menunjukkan pertumbuhan 907.314,82% dibandingkan periode yang sama tahun 2019. Demikian juga dengan pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) hingga Maret 2020 mencatatkan pertumbuhan positif 37,17% dibandingkan periode yang sama tahun 2019 yaitu dari Rp9,38 triliun menjadi Rp12,87 triliun.

G. Akselerasi Belanja Maret 2020

Menkeu menyampaikan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat sampai dengan Maret 2020 tumbuh sebesar 6,58% (yoy) dari tahun sebelumnya. Karena adanya Covid-19 dan adanya prioritas yang lebih ditujukan kepada kesehatan, bansos, dan pemulihan ekonomi diperkirakan belanja modal akan mengalami perlambatan. Realisasi Belanja Negara tersebut meliputi realisasi Belanja Pemerintah Pusat dan realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Meningkatnya kinerja realisasi Belanja Pemerintah Pusat tersebut utamanya dipengaruhi oleh kinerja realisasi belanja modal sebesar Rp11,95 triliun dan bantuan sosial sebesar Rp47,17 triliun. Realisasi belanja modal hingga Maret 2020 mengalami peningkatan

sebesar 32,06% (yoy), sedangkan realisasi bantuan sosial tumbuh sebesar 27,61% (yoy) jika dibandingkan tahun sebelumnya sebagai upaya Pemerintah untuk melaksanakan program-program jaring pengaman sosial. Peningkatan kinerja realisasi belanja tersebut mencerminkan komitmen Pemerintah untuk melakukan percepatan belanja produktif serta peningkatan pelayanan, termasuk melindungi masyarakat miskin dan rentan.

Realisasi TKDD sampai dengan Maret 2020 mencapai Rp174,50 triliun yang meliputi Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp167,30 triliun dan Dana Desa Rp7,20 triliun. Realisasi TKDD sampai dengan Maret 2020 lebih rendah sekitar Rp16,82 triliun atau 8,79% (yoy) apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019. Secara umum hal ini terutama disebabkan belum optimalnya penyaluran dana TKDD sampai dengan Triwulan I 2020 karena adanya proses pemenuhan persyaratan penyaluran TKDD oleh Pemerintah Daerah. Realisasi TKD sampai dengan Maret 2020 lebih rendah Rp13,94 triliun atau sekitar 7,69% bila dibandingkan realisasi TKD pada periode yang sama tahun 2019. Rendahnya realisasi TKD tersebut terutama disebabkan karena: (1) Realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) hanya sekitar 38,39% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. (2) Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) hanya sekitar 6,10% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini terutama disebabkan karena adanya penyaluran DAU yang berbasis kinerja, sehingga penyaluran hanya dapat dilakukan setelah Menkeu (c.q Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan) menerima laporan belanja pegawai dari daerah sebagaimana amanah dari Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 139 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus.

Sementara itu, realisasi penyaluran Dana Desa sampai dengan Maret 2020 sebesar Rp7,20 triliun. Secara spesifik, kinerja penyaluran TKDD sampai dengan Maret 2020 juga dipengaruhi oleh faktor lain yaitu dampak

mewabahnya pandemi Covid-19 di ibukota dan berbagai daerah di Indonesia, sehingga turut mempengaruhi implementasi penyaluran TKDD di daerah karena Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah masih terfokus pada penanganan dampak akibat Covid-19 tersebut. Pada dasarnya pemotongan TKDD tersebut digunakan untuk penanganan Covid-19 secara terkoordinasi di Pemerintah Pusat, antara lain untuk pengadaan Alat Pelindung Diri (APD), pembayaran insentif dan santunan kematian tenaga medis, berbagai jenis bantuan sosial, dan insentif untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dengan demikian, uang pemotongan tersebut pada dasarnya juga kembali kepada masyarakat di daerah. Selain itu, telah dikeluarkan pula Surat Keputusan Bersama Menkeu dan Menteri Dalam Negeri yang isinya mengatur penyesuaian APBD. Hal ini utamanya agar daerah melakukan penghematan di seluruh aspek (belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal) dan merealokasinya untuk fokus kepada belanja penanganan Covid-19 serta bantuan sosial dan insentif untuk mengatasi dampak ekonomi di daerah. Dalam pelaksanaan bantuan sosial ini, harus dilakukan koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pencapaian sasarannya.

H. Pengelolaan Fiskal Untuk Menjaga Keberlanjutan Keuangan Negara

Pemerintah berkomitmen untuk menjaga keberlanjutan fiskal di tahun 2020, dimana realisasi defisit APBN hingga Maret 2020 mencapai 0,44% Produk Domestik Bruto (PDB). Sementara itu posisi defisit keseimbangan primer pada Maret 2020 telah turun hampir Rp30 triliun dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Dengan kondisi tersebut, realisasi pembiayaan APBN melalui utang hingga Maret 2020 juga mengalami penurunan sebesar 57,17% jika dibandingkan realisasi pada periode tahun sebelumnya. Penurunan tersebut juga didorong oleh adanya tekanan di pasar keuangan pada

bulan Maret, yang berdampak pada menurunnya likuiditas karena meningkatnya volatilitas pasar keuangan yang ditunjukkan oleh peningkatan *yield*, turunnya IHSG, dan melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS. Dalam menghadapi kondisi tersebut, Pemerintah menjalankan strategi pengelolaan pembiayaan utang secara hati hati (*prudent*) dan terukur. Sejalan dengan hal ini, Pemerintah telah mengubah jadwal penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) dalam valuta asing, dari semula di bulan Maret menjadi di bulan April 2020.

I. Kebijakan Penanganan Pandemi ke Depan Dalam Menjaga Keuangan Negara

Menkeu menyatakan bahwa stimulus yang sudah disampaikan kepada seluruh dunia usaha dan masyarakat itu sifatnya *broadbase*. Jadi APBN meng-*cover* kebutuhan kesehatan, bidang sosial, dan bidang ekonomi yang semuanya mengalami dampak seperti domino efek, kesehatan memukul sosial, sosial memukul ekonomi dan nanti ekonomi juga pasti akan mempengaruhi dari sektor keuangan, terutama dari lembaga-lembaga keuangan bank dan bukan bank. Menkeu juga menambahkan dari sisi sosial masyarakat Kementerian Keuangan mencoba meluncurkan stimulus/kebijakan-kebijakan untuk bisa mengurangi dampak *shock* Covid-19 yang sangat besar ini. Untuk masyarakat, tentu tidak bisa seluruhnya *shock* di *absorb* oleh APBN. Namun APBN berusaha untuk bisa mendukung ketahanan sosial masyarakat. Dari sisi sosial ekonomi APBN mencoba untuk memberikan dukungan agar *shock* itu tidak merusak atau dalam hal ini menyebabkan kebangkrutan yang sifatnya masif.

Pemerintah menyadari bahwa dampak kerusakan akibat wabah Covid-19 akan amat masif ke depannya sehingga kewaspadaan dan kehati-hatian dalam penetapan kebijakan serta pengelolaan Keuangan Negara akan dilakukan ke depan. Kebijakan *extraordinary* kemudian dilakukan Pemerintah untuk mengurangi dampak akibat penyebaran virus Covid-19 di Indonesia melalui penerbitan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 (PERPPU 1/2020) yang baru saja disahkan pada bulan April 2020.

Dalam rangka menunjang perekonomian, pemerintah telah menerbitkan PMK-23/2020 dan PMK 28/2020 yang mengatur mengenai insentif fiskal dalam rangka menghadapi pandemic Covid-19. Dengan adanya insentif fiskal ini, diperkirakan penerimaan pajak di bulan April akan menurun. Terkait dengan (PERPPU 1/2020) yang antara lain mengatur penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan untuk tahun pajak 2020 (SPT PPh Badannya disampaikan di April 2021), diperkirakan akan terjadi penurunan angsuran PPh Pasal 25 badan mulai bulan Mei 2020. Lebih lanjut Pemerintah berkomitmen untuk menjaga industri dalam negeri ditengah pandemi Covid-19. Melalui PMK-30/2020, Pemerintah memberikan relaksasi penundaan pembayaran cukai akibat tersendatnya logistik di lapangan karena Covid-19. Pemerintah berharap dengan adanya penundaan ini dapat membantu arus kas perusahaan sehingga perusahaan dapat terus menjalankan usahanya. Keberlangsungan industri sangat penting untuk mengatasi terhambatnya penyediaan logistik dan penyerapan tenaga kerja agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja. Selain itu Pemerintah juga telah mengantisipasi keadaan kahar ini dengan berbagai kebijakan yang relevan seperti relaksasi aturan impor untuk bahan baku pembuatan alat kesehatan.

Insentif fiskal dan prosedural dari segi kepabeanan dan cukai juga dilakukan Pemerintah untuk mereduksi dampak pandemi Covid-19 ini yang terdiri atas larangan sementara atas ekspor Alat Kesehatan, relaksasi *Free Alongside Ship* (FAS) Impor, pembebasan cukai alkohol dalam rangka penanganan Covid-19, relaksasi ijin impor untuk Alat Kesehatan, relaksasi PPh impor untuk perusahaan Kemudahan Impor Untuk Tujuan Ekspor (KITE), percepatan layanan *online* untuk penanganan Covid-19, relaksasi pelunasan cukai dan produksi rokok, percepatan logistik dengan sistem *National Logistik*

Ecosystems (NLE), dan relaksasi penjualan lokal dari perusahaan KB/KITE.

J. Dampak Covid-19 Terhadap Sektor UKM di Indonesia

Pandemi virus Corona bukan hanya sekedar bencana kesehatan, virus yang dikenal sebagai Covid-19 ini telah menimbulkan kekacauan di sektor ekonomi. Tidak hanya industri besar, pandemi virus Corona telah membuat pelaku UKM di Indonesia mulai gelisah. Terlebih baru-baru ini, sebuah studi menyebut jika Covid-19 akan membuat Indonesia mengalami penurunan persentase pertumbuhan ekonomi sebesar 0.1% di tahun 2020. Secara garis besar, berikut merupakan dampak nyata yang disebabkan Covid-19 terhadap sektor UKM di Indonesia.

K. Penurunan Aktivitas Jual-Beli

Anjuran *social distancing* demi menghindari penularan virus Corona yang lebih luas, sedikit banyak turut andil menurunkan aktivitas jual-beli di tengah masyarakat. Contohnya pelaku usaha warteg di Jakarta. Menurut ketua Komunitas Warteg Nusantara (Kowantara), Mukroni, virus Corona telah membuat omset pengusaha warteg di Indonesia, khususnya Jabodetabek mengalami penurunan hingga 50 persen. Namun beruntung, menurut penelitian yang dilakukan *Center for Economic and Social Studies* (CESS) dan *The Center for Micro and Small Enterprise Dynamic* (CEMSED), UKM di Indonesia tergolong unik karena selalu punya kemampuan untuk berkembang dan bertahan selama krisis. Hal ini terbukti dengan inisiatif para pengusaha warteg yang lebih memilih untuk tetap beroperasi, namun mengubah cara berjualan dengan hanya melayani pembelian kemasan (untuk dibawa pulang), tidak melayani pembelian makan di tempat.

BAB 5

SINERGITAS PASCA BENCANA DI DUNIA

A. Bentuk Sinergi Pemerintah Pulihkan Wilayah Terkena Bencana

Indonesia menjadi salah satu negara yang sangat rawan terhadap berbagai bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir dan lainnya. Hal ini karena secara geografis Indonesia di kelilingi "cincin api (ring of fire)" sehingga potensi terjadi bencana bisa terjadi sewaktu-waktu. Bahkan belum lama ini, Indonesia diguncang bencana hebat berupa gempa bumi dan tsunami di Palu - Donggala, Sulawesi Utara dan gempa bumi yang juga terjadi di Lombok, Nusa Tenggara Barat. "Belum selesai penanganan bencana di Lombok yang berkekuatan sekitar 7 skala richter (SR), Indonesia kembali diguncang gempa kekuatan 7,4 SR kali ini di Palu, jadi lebih besar dari Lombok," kata Kadiv Humas Polri, Setyo Wasisto dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Karo Penmas Devisi Humas Polri, Dedi Prasetyo, pada acara Forum Promoter Sinergi Sistem Mitigasi Dalam Upaya Meminimalisasi Dampak Bencana Alam. Dikatakan Setyo bahwa dalam penanganan bencana di Lombok ataupun di Palu sempat terjadi chaos kecil karena tidak meratanya bantuan paska bencana yang terjadi terutama di Palu. Hal ini karena banyaknya infrastruktur yang rusak, korban berjatuhan dan juga pasokan BBM dan listrik juga mati. Sementara di saat seperti ini, masyarakat yang selamat dari bencana sangat berharap kebutuhan dasarnya terpenuhi.

Saat bencana terjadi sinergi sistem yang belum maksimal akibatkan penanganan korban tidak cepat, kurangnya alat berat atau tidak tersedia alat berat yang mengharuskan mendatangkan dari berbagai daerah sehingga membuat lambat evakuasi. Bahkan penjarahan terjadi karena tidak meratanya penyaluran bantuan. Ini

terjadi karena koordinasi tidak lancar akibat lumpuhnya jalur telekomunikasi. Terkait dengan gempa bumi, berdasarkan data dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Indonesia memiliki 295 sumber gempa patahan aktif. Akibatnya potensi terjadi gempa sangat besar, namun sayangnya tidak ada satu teknologi pun yang mampu memprediksi kapan terjadinya gempa bumi. Sehingga saat gempa terjadi banyak korban jiwa berjatuh dan berbagai macam bangunan serta infrastruktur porak poranda seperti yang baru saja terjadi di Palu dan Lombok belum lama ini. Jadi kita harus hidup harmoni dengan alam, kita harus siap menghadapi ancaman bencana. Sebab kita punya 295 sesar aktif atau patahan, semua harus kita siapkan menghadapi bencana yang bisa terjadi sewaktu-waktu. Ditengah ancaman gempa bumi yang beruntun, masih ada sejumlah permasalahan serius yang harus dituntaskan kedepan. Salah satunya adalah banyaknya bangunan rumah tinggal yang tidak menerapkan konsep bangunan tahan gempa.

Akibatnya saat gempa terjadi rumah roboh dan menimpa penghuninya sehingga menimbulkan korban jiwa. Parahnya lagi, bencana gempa bumi biasanya diikuti oleh bencana susulan seperti tsunami, kebakaran, tanah longsor sehingga menimbulkan lebih banyak korban jiwa. Khusus di Palu kemarin, bencana susulan tidak hanya berupa tsunami namun juga likuifaksi. Hal ini lah yang membuat bencana di Palu kemarin menjadi salah satu bencana terbesar yang terjadi di Indonesia dengan korban meninggal dunia hingga ribuan orang. Sejarah gempa di Indonesia itu terlalu banyak, pelajarannya adalah banyak bangunan yang tidak punya besi tulangan sehingga ketika gempa terjadi rumah dan bangunan itu menjadi pembunuh utama bagi pemiliknya. Sementara itu, Kepala Subdirektorat Konstruksi Berkelanjutan Kementerian PUPR, Brawijaya, menambahkan pemerintah telah berupaya keras untuk dapat melakukan tanggap darurat terhadap bencana yang terjadi di Lombok ataupun di Palu dan di daerah bencana lainnya.

Salah satu tupoksi dari Kementeriannya terkait dengan bencana diantaranya adalah penyediaan fasilitas umum (fasum) atau fasilitas sosial (fasos) pada masa tanggap darurat. Selain itu melakukan rehabilitasi bangunan-bangunan umum seperti jalan, jembatan dan lainnya. Terkait bencana gempa di Lombok, Brawijaya menyatakan bahwa pihaknya sudah melakukan berbagai upaya seperti menginventarisir kerusakan bangunan, membantu pembangunan bangunan sementara hingga mempersiapkan rehabilitasi atau rekonstruksi paska bencana.

Pada masa darurat, Kementerian PUPR juga selalu aktif menyediakan air baku dan juga alat-alat berat untuk keperluan evakuasi. Khusus di Lombok, pihaknya sudah menyelesaikan pembangunan 34 jenis sarana prasarana dan fasilitas umum seperti sekolah mulai dari tingkatan TK hingga SMK, pembangunan MCK komunal hingga pembangunan perumahan warga dengan model Risha (Rumah instan sederhana). Sementara untuk di Palu sendiri, saat ini masih dalam tahap recovery dan pendataan secara detail oleh pemerintah terutama terkait berapa jumlah infrastruktur dan rumah yang rusak. Pihaknya juga akan melakukan penanganan yang sama seperti yang dilakukan di Lombok. Kita akan bangun rumah model risha juga sebab model ini terbukti tahan gempa. Tahun 2013 lalu kita bangun di Palu dan ternyata tetap utuh dan kondisinya baik meskipun kemarin terjadi gempa dan likuifaksi. Brawijaya menyatakan masih ada kendala dalam hal penanganan bencana terutama di Palu - Donggala, Sulawesi Tengah. Diantaranya adalah koordinasi pengamanan barang yang masih memerlukan penguatan. Oleh sebab itu dia berharap Polri dapat membantu menangani masalah pengamanan barang agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Polri juga diminta mengawal seluruh proses recovery atau rehabilitasi paska bencana di Palu - Donggala agar berjalan dengan lancar. Contohnya saat dilakukan penambangan pasir untuk kebutuhan pembangunan Risha, harus ada pengawalan yang ketat dari Polri agar material yang diangkut tetap dalam kondisi aman termasuk pengamanan terhadap para pekerjanya.

BAB 6

PANDEMIC VIRUS CORONA (DARI WUHAN MENJALAR KE NEGARA-NEGARA DI DUNIA)

A. Virus Corona Menyebar ke Seluruh Dunia

Virus corona jenis baru atau Covid-19 telah menginfeksi lebih dari 1 juta orang di seluruh dunia. Pada Jumat tanggal 3 April 2020, pukul 19.15 tercatat di Worldometers ada 1.033.210 kasus dengan 54.442 kematian. Sementara itu di peta penyebaran virus corona John Hopkins ada 1.030.628 kasus dengan 54.137 kematian. Amerika Serikat saat ini adalah yang memiliki kasus terbanyak, yakni 245.573 kasus. Sementara itu New York mencatat kematian terbanyak dengan 1.562 orang. Bagaimana perjalanan virus corona mulai dari ditemukannya di China hingga kini menyebar di hampir seluruh negara di dunia?

1. Patogen muncul

Dilansir Bloomberg, menurut sebuah makalah yang diterbitkan 24 Januari dalam jurnal medis The Lancet, pasien virus corona pertama yang diketahui di Wuhan mulai mengalami gejala pada 1 Desember 2019. Pada 16 Desember, dokter di Rumah Sakit Pusat Wuhan mengirim sampel dari pasien lain dengan demam persisten untuk pengujian laboratorium. Hasilnya menunjukkan virus mirip SARS. Lalu pada 30 Desember Kepala Departemen ER Rumah Sakit Ai Fen memposting gambar laporan laboratorium di media sosial China. Hal itu lalu diposting ulang dan menyebar di kalangan dokter. Mereka kemudian ditegur polisi setempat karena menyebarkan desas-desus. Barulah pada akhir Desember, virus itu muncul di media pemerintah China dengan berita pejabat pemerintah menyelidiki puluhan kasus pneumonia misterius di Wuhan. Mereka tidak menguraikan lebih jauh soal virus itu. Namun

itu membuka celah orang di China dan luar China mempelajari virus tersebut. Pada 3 Januari, Singapura, Hong Kong, dan Taiwan terpukul oleh pandemi SARS. Pemeriksaan orang yang sakit demam mulai diberlakukan di bandara untuk kedatangan dari Wuhan.

2. Virus tersebar di luar Wuhan

Pada 11 Januari, sebuah tim ilmuwan di Shanghai mengurutkan genom lengkap dari virus dan menerbitkannya di virological.org, sebuah forum diskusi online untuk para ahli epidemiologi. Genom tersebut membantu ilmuwan dari seluruh dunia mengidentifikasi virus pada pasien. Setelah itu Thailand mengonfirmasi kasus pertamanya pada 13 Januari dan 3 hari kemudian disusul Jepang dengan 1 kasus. Setelahnya kasus dilaporkan di Beijing dan provinsi Guangdong selatan pada 20 Januari. Pada hari yang sama pakar penyakit menular China Zhong Nanshan membenarkan di televisi pemerintah bahwa virus itu menyebar di antara manusia. Segera setelahnya, kasus meningkat dengan cepat. Pemerintah China mulai memerintahkan langkah-langkah untuk mengendalikan penyebaran penyakit. Pada 23 Januari Wuhan dikunci atau lockdown. Itu sehari sebelum liburan Tahun Baru Imlek selama sepekan. Transportasi dihentikan dan orang dibatasi untuk keluar masuk. Karantina diperluas hingga kota-kota sekitar Wuhan dan akhirnya semua provinsi Hubei yang pada akhirnya mengunci 60 juta orang.

3. Meluas ke Asia

WHO mendeklarasikan epidemi itu sebagai darurat kesehatan global pada 30 Januari. Hal itu memungkinkan negara-negara membuat berbagai kebijakan seperti pembatasan perjalanan. Filipina melaporkan kematian pertamanya. Itu adalah kematian pertama di luar China. Setelahnya, gelombang infeksi mulai menyapu Asia. Di Jepang, lebih dari 3.600 penumpang kapal pesiar Diamond Princess dikarantina 2 minggu di atas kapal sejak 5 Februari karena khawatir virus corona menyebar ke daratan. Penyakit itu menyebar di kapal dan akhirnya

menginfeksi sekitar 600 penumpang dan 6 meninggal. Ketakutan menyebar di kapal-kapal lain dari seluruh dunia. Banyak kapal tidak diizinkan berlabuh. Korea Selatan sempat mencatat epidemi terbesar kedua di Asia setelah satu pasien ditemukan dari sekte keagamaan. Namun, tes cepat membuat wabah di Korsel terkendali dalam beberapa minggu meski tanpa karantina, lockdown atau penutupan bisnis.

4. Episentrum wabah bergeser ke Eropa

Perancis melaporkan kematian pertama pada 14 Februari dan menjadikan pertanda virus itu masuk ke Eropa. Italia menjadi pusat wabah Eropa setelah virus itu menguasai wilayah utara negara pada pertengahan Februari. Kota-kota di Italia lockdown sejak 22 Februari dan berlaku nasional pada 9 Maret. Negara tetangganya, Spanyol, kemudian muncul sebagai pemilik jumlah kematian tertinggi kedua di dunia. Keadaan darurat diumumkan pada 14 Maret.

5. Meluas ke Amerika

AS melaporkan kematian Covid-19 pertamanya pada 29 Februari, tetapi deteksi rendah selama beberapa waktu karena tingkat pengujian yang rendah. Pada pertengahan Maret superstar Hollywood Tom Hanks terinfeksi virus corona. WHO tak lama kemudian secara resmi menyatakan pandemi. Presiden AS Donald Trump menyatakan darurat nasional pada 13 Maret. Setelah pengujian diperluas, kasus di AS melonjak dan Negara Bagian New York menjadi pusat wabah atau episentrum selanjutnya. Pada 30 Maret kasus yang dilaporkan melebihi provinsi Hubei, China. Saat itu rumah sakit di New York melaporkan kekurangan peralatan penting seperti ventilator, APD, dan peralatan lain.

China melaporkan tidak ada kasus baru yang ditemukan pada 19 Maret. Namun kekhawatiran datang dari imported case atau kasus dari orang yang baru masuk ke negara tersebut. India melakukan lockdown nasional yang terbesar di dunia. Lebih dari 1,3 miliar orang terkunci. Epidemiolog mengatakan bahkan setelah negara-negara

memberantas wabah pertama mereka, virus itu kemungkinan akan kembali dalam gelombang-gelombang selanjutnya seperti pandemi flu 1918. Hal yang membuat kekhawatiran bahwa epidemi akan berlanjut beberapa bulan mendatang adalah adanya sekelompok orang terinfeksi tidak menunjukkan gejala sama sekali dan kemungkinan akan menyebarkan virus ke orang lain.

B. Virus corona: Wuhan kendurkan 'lockdown' saat dunia berperang melawan pandemi Covid-19

Sebagai langkah awal, larangan perjalanan di seluruh provinsi Hubei, di mana Wuhan berada, akan dicabut mulai tengah malam pada hari Selasa (31/03) mendatang- bagi penduduk yang sehat. Satu kasus virus baru di Wuhan dilaporkan pada hari Selasa (24/03) setelah hampir seminggu tidak ada kasus baru yang muncul. Langkah China ini dilakukan, sementara negara-negara di seluruh dunia tengah sibuk memerangi virus corona dengan melakukan 'lockdown' atau memberlakukan pembatasan yang ketat. Inggris kini tengah sibuk melawan virus Covid-19 yang kasusnya meningkat tajam dalam beberapa hari belakangan. Inggris telah mengeluarkan peraturan yang melarang orang bertemu lebih dari dua orang, dan menutup toko-toko yang menjual bukan barang kebutuhan pokok. Sementara itu, para ahli kesehatan mengatakan warga Amerika harus membatasi interaksi sosial mereka atau jumlah yang terinfeksi akan membanjiri sistem perawatan kesehatan di Amerika Serikat.

Tentara Spanyol yang membantu memerangi pandemi virus corona telah menemukan pasien-pasien lanjut usia di panti jompo yang telah ditinggalkan dan dalam beberapa kasus, ada dari mereka yang meninggal di tempat tidur, kata Kementerian Pertahanan Spanyol. Gelanggang es di Madrid, Spanyol, digunakan sebagai kamar mayat sementara untuk korban Covid-19 akibat meningkat tajamnya jumlah korban meninggal dunia. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah mengeluarkan peringatan bahwa pandemi Covid-19 akan semakin cepat

menyebarkan, dengan lebih dari 300.000 kasus yang telah terkonfirmasi. WHO pun mendesak negara-negara untuk mengadopsi pengujian yang ketat dan strategi pelacakan kontak guna menekan penyebaran virus corona.

Kota Wuhan telah ditutup dari seluruh dunia sejak pertengahan Januari lalu. Namun, para pejabat kini mengatakan siapa pun yang memiliki kode 'hijau' pada aplikasi kesehatan di ponsel mereka diizinkan untuk meninggalkan kota itu mulai 8 April mendatang. Sebelumnya, pihak berwenang melaporkan adanya sebuah kasus baru virus corona di Wuhan, mengakhiri lima hari tanpa ada laporan kasus baru yang muncul. Laporan itu muncul setelah petugas kesehatan mengonfirmasi bahwa mereka tidak menghitung kasus yang positif corona melainkan yang belum dirawat di rumah sakit atau tidak menunjukkan gejala penyakit. Angka resmi pemerintah China menyebutkan ada 78 kasus baru yang dilaporkan di daratan China dalam periode 24 jam. Semua, kecuali empat dari mereka, disebabkan karena terpapar oleh wisatawan yang terinfeksi yang datang dari luar negeri. Infeksi virus corona "gelombang kedua" juga mempengaruhi negara-negara seperti Korea Selatan dan Singapura, yang telah berhasil menghentikan penyebaran penyakit dalam beberapa minggu terakhir. Korea Selatan telah mengalami penurunan jumlah kasus baru, dan Selasa lalu menjadi hari terendah jumlah kasus baru sejak 29 Februari lalu.

C. China berupaya memperbaiki reputasi

China menganggap negara itu- hampir sebagai negara "pasca corona" atau telah melewati fase tertinggi dari pandemik corona. Dalam seminggu terakhir, kami telah mendengar petugas-petugas medis di Wuhan memperingatkan Inggris dan negara lain agar melakukan upaya yang lebih besar untuk melindungi petugas kesehatan garis depan. Dan meminta negara-negara lain untuk belajar dari kesalahan yang dilakukan petugas medis Wuhan yang tidak mengenakan pakaian pelindung yang tepat saat merawat pasien. Namun, ada juga laporan di

media pemerintah China tentang jumlah korban meninggal di Italia melebihi jumlah korban di China. Laporan ini juga dikombinasikan dengan beberapa komentar dari tokoh media termuka yang menunjukkan rasa tidak suka, atau merasa menang. Pada saat bersamaan, terjadi kepaniknkan ancaman "gelombang kedua" kasus virus corona impor yang berasal dari pelancong luar negeri. Ini telah memicu pandangan benar atau salah bahwa beberapa negara lain tidak menganggap serius ancaman virus corona karena mereka tidak melakukan apa yang China lakukan. (Hampir semua kasus di Beijing yang diumumkan kepada publik adalah warga negara China yang pulang ke rumah). Sementara itu, bukan dari pejabat senior, beberapa tokoh diplomatik China yang terkenal menggunakan media sosial untuk menyebarkan teori bahwa Amerika mungkin telah menggunakan virus corona sebagai senjata dan menaruhnya ke China. Atau mengatakan bahwa Italia mungkin telah memiliki kasus virus corona lebih awal dibandingkan China. China menabur benih keraguan dan mempertanyakan kebenaran yang diasumsikan saat mereka berusaha memperbaiki reputasinya sebagai negara asal Covid-19.

➤ **Informasi terbaru apa yang terjadi di Asia?**

- Hampir seluruh wilayah India berpenduduk 1,3 miliar orang menjalani karantina atau 'lockdown'. Layanan bus, kereta api dan alat transportasi lainnya dihentikan sementara. Pada Senin lalu, pihak berwenang mengatakan penerbangan domestik juga akan dihentikan. Negara ini melaporkan ada 485 kasus corona dan sembilan orang meninggal. Perdana Menteri Narendra Modi akan membahas masalah ini lagi malam ini.
- Negara tetangga India, Pakistan mengumumkan peningkatan kasus dua kali lipat lebih banyak- menjadi 878 kasus pada Senin malam. Pembatasan masih diberlakukan meskipun pemerintah telah berhenti memberlakukan 'lockdown' secara nasional. Namun beberapa provinsi telah mengumumkannya secara

independen. Tentara dikerahkan untuk membantu menegakkan larangan tersebut.

- Bangladesh, yang melaporkan ada 33 kasus dengan tiga kematian, juga mengerahkan angkatan senjatanya untuk membantu mengatur 'social distancing' dan meningkatkan tindakan-tindakan pencegahan dari paparan Covid-19. Para tentara juga ditugaskan untuk memonitor ribuan orang asing yang dikarantina. Di seluruh Asia selatan, ada kekhawatiran bahwa jumlah kasus sebenarnya bisa jauh lebih tinggi daripada yang dilaporkan.
- Indonesia, terdapat 49 kematian akibat Covid-19, tertinggi di Asia Tenggara- telah mengubah Wisma Atlet yang dibangun untuk tempat tinggal para atlet saat Asian Games 2018 lalu menjadi rumah sakit darurat untuk pasien virus corona. Keadaan darurat juga telah diumumkan di Jakarta pada Senin lalu
- Di Thailand, keadaan darurat selama sebulan yang akan mencakup batasan jam malam dan pos-pos pemeriksaan akan dimulai pada Kamis mendatang. Pemerintah mendapatkan kritikan tajam karena gagal mengambil tindakan tegas sejauh ini. Akibatnya, empat orang telah meninggal dan hampir 900 orang dinyatakan positif corona.
- Nasib Olimpiade 2020 di Jepang akan dibicarakan oleh perdana menteri Jepang dan Komite Olimpiade Internasional.
- Myanmar telah mengumumkan terdapat dua kasus virus corona.

D. Pertempuran Eropa melawan virus semakin intensif

Perdana Menteri Inggris Boris Johnson mengumumkan pada Senin malam bahwa, orang hanya akan diizinkan meninggalkan rumah mereka, untuk tujuan yang sangat terbatas. Larangan itu yaitu, berbelanja untuk kebutuhan dasar, olahraga, memenuhi segala kebutuhan medis, atau bepergian ke tempat kerja jika bekerja dari rumah tidak mungkin. Jumlah orang yang telah meninggal

di Inggris naik menjadi 335, terhitung Senin, 26 Maret lalu. Di Italia, negara yang paling terpukul di dunia akibat corona, pihak berwenang mengumumkan 602 orang telah tewas dalam 24 jam terakhir, sehingga total korban tewas di sana menjadi 6.077 orang. Tetapi, peningkatan kasus harian menjadi yang terkecil sejak Kamis, dan meningkatkan harapan bahwa pembatasan ketat yang diberlakukan oleh pemerintah mulai menunjukkan dampaknya. Spanyol, bagaimanapun, mengatakan Selasa lalu bahwa jumlah kematiannya telah meningkat 514 menjadi 2.696 orang. Hampir 40.000 terinfeksi, sekitar 5.400 di antaranya adalah petugas kesehatan.

➤ **Rangkaian Peristiwa Pertama Covid-19**

Berawal dari kasus lokal, Covid-19 menyebar ke seluruh dunia silih berganti dengan cara penularan yang disebut kasus impor dari luar wilayah asal atau transmisi lokal antarpenduduk. Sejauh ini, berbagai peristiwa yang pertama kali terjadi berkaitan dengan Covid-19 agaknya belum memberikan gambaran utuh tentang virus ini. Kesimpulan sejauh ini, analisis para ahli menduga bahwa Covid-19 lebih kuat bertahan hidup di daerah bersuhu rendah dan kering walaupun virus ini juga mewabah di negara-negara dengan kondisi suhu dan kelembaban udara yang sebaliknya. Virus ini juga lebih rentan menyebabkan kematian pada penduduk usia lanjut. Namun, ada juga penduduk di kelompok usia ini yang berhasil sembuh dan seorang bayi juga meninggal karena Covid-19.

Rangkaian peristiwa pertama juga menunjukkan upaya para ahli untuk menemukan antivirus ini secepat mungkin. Sejauh ini, upaya tersebut belum memberikan hasil sesuai harapan. Menilik ke belakang, rentetan awal munculnya Covid-19 sudah tidak asing di telinga masyarakat dunia. China tercatat sebagai negara yang pertama kali melaporkan kasus Covid-19 di dunia. Untuk pertama kalinya, China melaporkan adanya penyakit baru ini pada 31 Desember 2019. Pada pengujung tahun 2019 itu, kantor Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) di China mendapatkan pemberitahuan tentang adanya sejenis

pneumonia yang penyebabnya tidak diketahui. Infeksi pernapasan akut yang menyerang paru-paru itu terdeteksi di kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Menurut pihak berwenang, beberapa pasien adalah pedagang yang beroperasi di Pasar Ikan Huanan. Seiring waktu, penelusuran menyebutkan, kasus Covid-19 sudah muncul sebelumnya. Merujuk pada laporan WHO ke-37 tentang situasi Covid-19, 26 Februari 2020, kasus Covid-19 pertama yang dikonfirmasi di China adalah pada 8 Desember. Hanya saja, informasi tersebut juga bergantung pada inisiatif negara-negara yang memberikan informasi penyakit kepada badan kesehatan global tersebut

Adapun sebuah laporan yang diterbitkan dalam laman jurnal medis *The Lancet* oleh dokter China dari Rumah Sakit Jin Yin-tan di Wuhan, yang merawat beberapa pasien yang paling awal, menyebutkan tanggal infeksi pertama yang diketahui pada 1 Desember 2019. Informasi awal mula munculnya Covid-19 masih terus berjalan ke belakang. Pada 16 Desember, dokter di Rumah Sakit Pusat Wuhan mengirim sampel dari pasien lain dengan demam persisten untuk pengujian laboratorium. Hasil-hasil itu menunjukkan virus menyerupai sindrom pernapasan akut parah (*severe acute respiratory syndrome/SARS*). Pada 30 Desember 2019, Ai Fen, dokter yang juga kepala departemen ruang gawat darurat rumah sakit tersebut, mengunggah gambar laporan laboratorium di media sosial Tiongkok. Gambar itu diposting ulang dan diedarkan oleh dokter lain, Li Wenliang. Kemudian, mereka ditegur polisi setempat karena dianggap "menyebarkan desas-desus". Li Wenliang kemudian dikenal sebagai *whistleblower* kasus Covid-19

E. Lonjakan pertama

Menurut data Pemerintah China yang dilihat *South China Morning Post*, seorang penduduk Provinsi Hubei berusia 55 tahun kemungkinan menjadi orang pertama yang terjangkit Covid-19 pada 17 November 2019. Sejak tanggal itu dan seterusnya, satu hingga lima kasus baru dilaporkan

setiap hari. Angka penduduk di China yang terjangkit Covid-19 menunjukkan tren eksponensial. Pada 15 Desember 2019, jumlah total infeksi mencapai 27. Peningkatan kasus Covid-19 harian mencapai dua digit untuk pertama kalinya dilaporkan juga terjadi di China pada 17 Desember 2020. Tiga hari berikutnya, jumlah total kasus penduduk China terkonfirmasi Covid-19 telah mencapai 60 orang. Kasus Covid-19 tembus 1 juta, tersebar di sejumlah negara. Sampai dengan tanggal tersebut pukul 09.36, data Johns Hophkins University mencatat jumlah pasien positif virus korona mencapai 1.015.403 orang. Angka total kematian 53.030 orang dan 210.579 orang yang terpapar Covid-19 berhasil sembuh.

F. Status dan pelaporan

Sejak 3 Januari, China telah secara teratur memberi tahu WHO serta negara-negara dan wilayah terkait, Hong Kong, Makau, dan Taiwan, tentang wabah pneumonia tersebut. Perkembangan dan pelaporan secara teratur menjadi perhatian WHO. Akhirnya, lembaga kesehatan dunia tersebut mengumumkan darurat kesehatan masyarakat global pada 30 Januari 2020. Beberapa waktu kemudian, tepatnya 11 Februari 2020, WHO mengumumkan virus baru ini disebut "Covid-19". Perkembangan kasus Covid-19 dan pelaporan yang dilakukan rutin di China juga menjadi perhatian dunia. Salah satunya Johns Hopkins University. Pada 22 Januari, Data and Statistic Center for Systems Science and Engineering Johns Hopkins University mempresentasikan untuk pertama kalinya peta interaktif dunia Covid-19.

Universitas di Baltimore, Negara Bagian Maryland, AS, menyajikan angka-angka aktual yang mencakup laju penyebaran dan kematian akibat Covid-19 setiap negara di dunia. Untuk menyusun peta interaktif dunia itu, para pakar John Hopkins University mengompilasikan data dari berbagai sumber yang relevan, yakni WHO, badan-badan kesehatan, dan pemberitaan media.

G. Penyebaran di Dunia

Kasus covid-19 pertama di luar China dilaporkan di Thailand pada 13 Januari 2020. Masih di Benua Asia, pada 29 Januari 2020 Covid-19 mencapai Timur Tengah untuk pertama kalinya saat jumlah kasus Covid-19 bertambah dan menyebar ke lebih banyak negara. Saat itu Uni Emirat Arab melaporkan kasus impor dalam keluarga empat orang. Empat hari sebelum Covid-19 mencapai kawasan Timur Tengah, dua benua sekaligus juga melaporkan masuknya virus yang sama. Perancis menjadi negara pertama di Benua Eropa yang mengonfirmasi tiga kasus Covid-19 tanggal 25 Januari 2020. Pada tanggal yang sama, kasus pertama Covid-19 juga merambah Benua Australia. Kasus Covid-19 dikonfirmasi oleh Victoria Health Authorities tanggal 25 Januari. Departemen Kesehatan Commonwealth berhubungan erat dengan otoritas kesehatan Victoria dan telah memberi tahu WHO. Pasien, seorang pria dari Wuhan, terbang ke Melbourne dari Guandong pada 19 Januari.

Dalam perkembangannya, Covid-19 menyebar ke Benua Afrika. Tanggal 14 Februari 2020, kementerian kesehatan dan WHO mengumumkan bahwa kasus virus korona orang asing pertama kali dikonfirmasi di Mesir, negeri yang terletak di Benua Asia dan Afrika. Dalam pernyataan bersama WHO, Juru Bicara Kementerian Kesehatan Mesir Khaled Mogahed mengatakan bahwa kasus tersebut dinyatakan positif covid-19 setelah ia menjalani tes laboratorium. Hanya berselang 11 hari, 25 Februari 2020, Kementerian Kesehatan, Penduduk, dan Reformasi Rumah Sakit Aljazair melaporkan kasus Covid-19 pertama di negara Benua Afrika itu. Otoritas kesehatan melaporkan bahwa tes menunjukkan orang dewasa Italia, yang tiba di Aljazair pada 17 Februari 2020, telah dinyatakan positif Covid-19.

H. Ini Perkembangan dari Waktu ke Waktu Krisis Korona di Dunia

ORGANISASI Kesehatan Dunia (WHO) telah menyatakan pandemi global atas virus korona baru yang menyebabkan penyakit yang dikenal sebagai covid-19 yang telah menyebar ke setidaknya 177 negara dan wilayah, menewaskan lebih dari 17.000 orang dan menginfeksi lebih dari 390.000, menurut Johns. Universitas Hopkins. Berikut kronologi krisis covid-19 berawal : Pada 31 Desember tahun lalu Tiongkok memberi tahu WHO tentang beberapa kasus pneumonia yang tidak biasa di Wuhan, sebuah kota pelabuhan yang berpenduduk 11 juta orang di provinsi Hubei tengah. Virus itu tidak diketahui. Beberapa dari mereka yang terinfeksi bekerja di Pasar Grosir Makanan Laut Huanan di kota itu, yang ditutup pada 1 Januari. Ketika para ahli kesehatan bekerja untuk mengidentifikasi virus di tengah kekhawatiran yang meningkat, jumlah infeksi melebihi 40. Pada tanggal 5 Januari Pejabat Tiongkok mengesampingkan kemungkinan bahwa ini adalah kambuhnya virus sindrom pernafasan akut (SARS) yang parah - penyakit yang berasal dari Tiongkok dan menewaskan lebih dari 770 orang di seluruh dunia pada 2002-2003. Pada 7 Januari Para pejabat mengumumkan mereka telah mengidentifikasi virus baru, menurut WHO. Virus novel bernama 2019-nCoV dan diidentifikasi sebagai milik keluarga coronavirus, yang meliputi SARS dan flu biasa. Virus korona adalah umum dan menyebar melalui berada di dekat orang yang terinfeksi dan menghirup tetesan yang dihasilkan ketika mereka batuk atau bersin, atau menyentuh permukaan tempat tetesan ini mendarat dan kemudian menyentuh wajah atau hidung seseorang.

Pada 11 Januari Tiongkok mengumumkan kematian pertamanya karena virus itu, seorang lelaki berusia 61 tahun yang telah membeli barang-barang dari pasar makanan laut. Pengobatan tidak memperbaiki gejalanya setelah ia dirawat di rumah sakit dan ia meninggal karena gagal jantung pada malam hari tanggal 9 Januari. Pada 13 Januari WHO melaporkan sebuah kasus di Thailand, yang

pertama di luar Tiongkok, pada seorang wanita yang datang dari Wuhan. Pada 16 Januari Kementerian kesehatan Jepang melaporkan kasus yang dikonfirmasi pada seorang pria yang juga mengunjungi Wuhan. Pada 17 Januari Ketika kematian kedua dilaporkan di Wuhan, otoritas kesehatan di AS mengumumkan bahwa tiga bandara akan mulai menyaring penumpang yang datang dari kota. Pihak berwenang di Amerika Serikat, Nepal, Prancis, Australia, Malaysia, Singapura, Korea Selatan, Vietnam, dan Taiwan mengkonfirmasi kasus selama beberapa hari berikutnya. Pada 20 Januari Tiongkok melaporkan kematian ketiga dan lebih dari 200 infeksi, dengan kasus-kasus juga dilaporkan di luar provinsi Hubei termasuk di ibu kota Beijing, Shanghai dan Shenzhen. Sementara itu, seorang ahli Tiongkok tentang penyakit menular mengkonfirmasi penularan dari manusia ke manusia ke penyiar CCTV negara bagian, meningkatkan kekhawatiran akan terjadi wabah besar ketika jutaan orang bepergian untuk liburan Tahun Baru Imlek.

Negara-negara Asia meningkatkan langkah-langkah untuk memblokir penyebaran virus, memperketat pengawasan di bandara terutama kedatangan dari daerah-daerah berisiko tinggi Tiongkok. Pada 22 Januari Jumlah kematian di Tiongkok melonjak menjadi 17 dengan lebih dari 550 infeksi. Banyak bandara Eropa meningkatkan pemeriksaan pada penerbangan dari Wuhan. Wuhan ditempatkan di bawah karantina efektif pada 23 Januari dan keberangkatan lewat udara dan kereta api ditangguhkan. Langkah-langkah yang sama diumumkan untuk dua kota lagi di provinsi Hubei: Xiantao dan Chibi. Beijing membatalkan acara untuk Tahun Baru Imlek, mulai 25 Januari, sementara para pejabat melaporkan kematian pertama di luar Hubei. WHO mengatakan pada tanggal 23 Januari bahwa wabah itu belum merupakan keadaan darurat publik yang menjadi perhatian internasional dan tidak ada "bukti" dari penyebaran virus antara manusia di luar Tiongkok. Pada 24 Januari Angka kematian di Tiongkok mencapai 26 orang dan pemerintah melaporkan lebih dari

830 infeksi. Shanghai Disneyland ditutup dan kota-kota lain mengumumkan penutupan tempat hiburan. Beijing mengatakan bagian dari Tembok Besar dan landmark terkenal lainnya juga akan ditutup. Pada 25 Januari Pembatasan perjalanan diberlakukan pada lima kota lagi di Hubei, menjadikan jumlah keseluruhan orang yang terkena dampak menjadi 56 juta.

Sementara itu Hong Kong menyatakan darurat virus, membatalkan perayaan Tahun Baru Imlek dan membatasi perjalanan ke daratan Tiongkok. Pada 26 Januari Jumlah korban tewas naik menjadi 56, dengan hampir 2.000 kasus dikonfirmasi karena pembatasan perjalanan ditingkatkan dan Hong Kong menutup taman hiburan Disneyland dan Ocean Park. Kasus-kasus baru dikonfirmasi di AS, Taiwan, Thailand, Jepang, dan Korea Selatan. Pada 27 Januari Jumlah korban tewas di Tiongkok naik menjadi 106, dengan 100 di provinsi Hubei, otoritas melaporkan. 4.515 orang lainnya di Tiongkok dilaporkan terinfeksi.

Ada 2.714 kasus yang dikonfirmasi di provinsi Hubei, naik dari 1.423 sehari sebelumnya. Pada 30 Januari WHO menyatakan virus korona sebagai darurat global ketika jumlah kematian di Tiongkok melonjak menjadi 170, dengan 7.711 kasus dilaporkan di negara itu, tempat virus itu telah menyebar ke 31 provinsi. India dan Filipina mengkonfirmasi kasus pertama virus tersebut, dengan satu pasien yang terinfeksi di setiap negara. Pada 31 Januari Jumlah kasus yang dikonfirmasi di Tiongkok melonjak menjadi 9.809. Rusia, Spanyol, Swedia, dan Inggris mengonfirmasi kasus virus pertama mereka. Pada 1 Februari Jumlah kematian di Tiongkok naik menjadi 259, dengan 11.791 infeksi di negara itu, menurut angka baru yang dirilis oleh otoritas kesehatan setempat. Kasus-kasus baru dikonfirmasi di Australia, Kanada, Jerman, Jepang, Singapura, AS, UEA dan Vietnam. Pada 2 Februari Kematian pertama di luar Tiongkok, seorang lelaki Tongghoa dari Wuhan, dilaporkan di Filipina. Korban tewas

di negi tirai bambu naik menjadi 304, dengan 14.380 infeksi dilaporkan.

Pada 3 Februari Tiongkok melaporkan 57 kematian baru, sehingga jumlah kematiannya menjadi setidaknya 361. Jumlah kasus meningkat menjadi 17.205 di seluruh negeri. Pada 4 Februari Tiongkok mengatakan jumlah kematian meningkat menjadi 425 orang dan jumlah orang yang terinfeksi mencapai 20.438 di daratan. Hong Kong juga melaporkan satu kematian, membawa kematian global menjadi 427. Kasus pertama dikonfirmasi di Belgia pada seseorang yang dipulangkan dari Wuhan. Pada 5 Februari Lebih banyak penerbangan yang mengevakuasi warga AS yang kembali dari Wuhan dan WHO menegaskan kembali bahwa "tidak ada pengobatan efektif yang diketahui" untuk virus corona. Sementara itu, dilaporkan lagi dari Tiongkok 490 kematian dan 24.324 kasus infeksi. Pada 6 Februari Jumlah korban tewas di daratan Tiongkok bertambah menjadi setidaknya 563, dengan lebih dari 28.000 kasus dikonfirmasi. Sementara itu, pihak berwenang di Malaysia melaporkan penularan dari manusia ke manusia pertama yang diketahui di negara itu dan jumlah orang yang terinfeksi di Eropa mencapai 30. Pada 7 Februari Li Wenliang, seorang dokter yang termasuk orang pertama yang membunyikan alarm atas virus korona, meninggal, dan Hong Kong memperkenalkan hukuman penjara bagi siapa pun yang melanggar aturan karantina. Tiongkok Daratan mengkonfirmasi jumlah kematian telah mencapai setidaknya 636, dengan 31.161 kasus infeksi dan para peneliti negara itu menyatakan bahwa trenggiling mungkin merupakan salah satu mata rantai dalam infeksi hewan-manusia.

Pada 8 Februari Seorang warga negara AS meninggal di Wuhan. Seorang pria Jepang berusia 60-an dengan dugaan infeksi coronavirus juga meninggal di rumah sakit di Wuhan, kata kementerian luar negeri Jepang. Korban tewas di Tiongkok mencapai 722, dengan 34.546 infeksi dikonfirmasi. Pada 9 Februari Jumlah korban tewas di Tiongkok melampaui epidemi SARS 2002-

03, dengan 811 kematian tercatat dan 37.198 infeksi. Tim investigasi yang dipimpin oleh para ahli dari WHO berangkat ke Cina. Pada 10 Februari Tiongkok memiliki 908 kematian yang dikonfirmasi dan total 40.171 infeksi - 97 kematian baru dilaporkan setelah hari paling mematikan dari wabah tersebut. Presiden Xi Jinping muncul di depan umum untuk pertama kalinya sejak epidemi dimulai, mengunjungi sebuah rumah sakit di Beijing dan mendesak kepercayaan diri dalam pertempuran melawan virus itu. Pada 11 Februari WHO mengumumkan bahwa virus korona baru akan disebut "COVID-19". Sementara itu, kematian di Tiongkok mencapai 1.016, dengan 42.638 infeksi tercatat.

Pada 12 Februari Ada 175 orang terinfeksi di atas kapal pesiar Diamond Princess, berlabuh di Yokohama, kata kementerian kesehatan Jepang. Korban tewas di daratan Tiongkok mencapai 1.113, dengan 44.653 infeksi tercatat. Pada 13 Februari Korea Utara memberlakukan karantina selama sebulan pada semua pengunjung asing dan lainnya yang diduga menderita covid-19, kata kantor berita resmi Korea Tengah. Korban tewas di daratan Tiongkok mencapai 1.300, dengan hampir 60.000 infeksi tercatat. Sementara itu, Jepang mengkonfirmasi kematian pertamanya dari virus. Pada 14 Februari Mesir menjadi negara pertama di Afrika yang melaporkan suatu kasus dan Perancis melaporkan kematian pertama Eropa akibat virus tersebut. Tiongkok melaporkan 121 kematian lagi, sehingga jumlah keseluruhan di seluruh daratan menjadi hampir 1.400. Pada 15 Februari Jumlah korban tewas di daratan Cina melonjak melewati 1.500, dengan 66.492 infeksi dikonfirmasi di daratan China. Di tempat lain, AS bersiap untuk mengevakuasi warganya dari kapal pesiar yang dikarantina di dermaga Jepang.

Sementara itu, pidato 3 Februari oleh Presiden Tiongkok Xi Jinping, yang diterbitkan oleh media pemerintah, mengindikasikan pemerintah tahu tentang ancaman virus itu jauh sebelum alarm publik dinaikkan. Pada 16 Februari Taiwan mencatat kematian pertama

seorang sopir taksi di usia 60-an karena virus korona. Pihak berwenang melaporkan bahwa 1.665 orang telah meninggal di daratan Tiongkok dengan 68.500 kasus infeksi dilaporkan. Pada 17 Februari Ada 1.770 kematian dilaporkan di Tiongkok daratan dan 70.548 kasus. Jepang mengkonfirmasi 99 kasus baru virus di atas kapal pesiar Diamond Princess yang dikarantina. Tanggal 18 Februari Terlihat angka infeksi harian Tiongkok turun di bawah 2.000 untuk pertama kalinya sejak Januari, dengan komisi kesehatan negara itu melaporkan 72.436 infeksi di daratan dan 1.868 kematian. Sementara itu, Rusia mengatakan akan melarang masuknya warga negara Tiongkok mulai 20 Februari. Pada 19 Februari Iran melaporkan dua kematian akibat virus korona, beberapa jam setelah mengkonfirmasi kasus pertamanya. Angka infeksi harian Tiongkok turun di bawah 2.000 untuk hari kedua berturut-turut, dengan komisi kesehatan negara itu melaporkan 74.185 infeksi di daratan dan 2.004 kematian. Pada tanggal 20 Februari Korea Selatan melaporkan kematian pertamanya dari virus korona. Sementara itu, Tiongkok melaporkan korban tewas telah meningkat menjadi 2.118 sementara jumlah total kasus mencapai 74.576. Komisi kesehatan negara itu melaporkan infeksi harian turun ke level terendah dalam hampir sebulan, akibat pihak berwenang hanya menghitung kasus yang dikonfirmasi oleh pengujian genetik di Hubei. Pada 21 Februari Korea Selatan melaporkan kematiannya yang kedua dan 100 kasus baru yang dikonfirmasi dari virus korona, menjadikan totalnya menjadi 204. Di Tiongkok daratan, jumlah korban tewas mencapai 2.236 ketika kasus-kasus infeksi yang dikonfirmasi naik di atas 75.400. Juga, Israel melaporkan kasus korona pertama yang dikonfirmasi setelah seorang wanita yang kembali dari kapal pesiar dinyatakan positif. Di Italia, wilayah Lombardy melaporkan penularan virus lokal pertama dengan tiga kasus baru sehingga total di negara itu menjadi enam infeksi. Pada 22 Februari Korea Selatan mengalami lonjakan terbesar dalam satu hari dengan 229 kasus baru virus. Italia melaporkan dua kematian pertamanya,

sementara Iran mengkonfirmasi kematian kelima di antara 10 infeksi baru. Kematian keenam kemudian dikonfirmasi, meskipun tidak jelas apakah kasus ini termasuk dalam 28 kasus yang dikonfirmasi di negara itu. Di Tiongkok daratan, jumlah infeksi baru turun secara signifikan dengan 397 kasus dilaporkan.

Pada 23 Februari Melihat beberapa negara menutup perbatasan mereka dengan Iran ketika jumlah infeksi dan kematian di negara itu bertambah. Di Italia, para pejabat mengkonfirmasi kematian ketiga, sementara pihak berwenang setempat membawa Karnaval Venesia ke penutupan awal dan menanggihkan acara olahraga dalam upaya untuk memerangi penyebaran virus di negara yang paling parah dilanda Eropa. Pada 24 Februari Kuwait, Bahrain, Irak, Afghanistan dan Oman semuanya melaporkan kasus virus pertama mereka. Sementara itu, jumlah kasus di Korea Selatan meningkat menjadi 833 kasus dengan tujuh kematian. Korban tewas di Tiongkok naik menjadi 2.595 di antara 77.262 kasus yang dikonfirmasi. Kematian ketujuh dilaporkan di Italia utara. Pada 25 Februari Wakil menteri kesehatan Iran, yang sehari sebelumnya memberikan briefing pers tentang wabah itu, mengkonfirmasi bahwa ia menderita virus korona. Total resmi negara mencapai 95 kasus dengan 15 kematian.

Sementara itu, kasus-kasus Tiongkok yang dilaporkan terus meningkat, dengan 518 infeksi baru dan 71 kematian baru dikonfirmasi. Kasus yang dikonfirmasi Korea Selatan naik menjadi 977 sementara Italia mencapai 229. Pada 26 Februari, jumlah kematian global mendekati 2.800 dengan total sekitar 80.000 kasus infeksi yang dilaporkan secara global. Norwegia, Rumania, Yunani, Georgia, Pakistan, Makedonia Utara, dan Brasil semuanya mendeteksi kasus pertama dari virus corona. Pada 27 Februari Estonia, Denmark, Irlandia Utara, dan Belanda melaporkan kasus virus korona pertama mereka. Jumlah infeksi melewati 82.000 di seluruh dunia, termasuk lebih dari 2.800 kematian. Italia telah melihat lonjakan infeksi yang melonjak menjadi 650, sementara 3 orang lagi

meninggal dengan penghitungan kematian sekarang di 17. Sementara itu di AS, pemerintah sedang mempertimbangkan untuk menggunakan Undang-Undang Produksi Pertahanan yang akan memberikan Presiden Donald Trump kekuatan untuk memperluas produksi industri bahan atau produk utama untuk keamanan nasional. Pada 28 Februari Lithuania dan Wales melaporkan kasus virus korona pertama mereka, dengan Belanda dan Georgia melaporkan kasus kedua mereka. Pada 29 Februari Korea Selatan melaporkan jumlah kasus terkonfirmasi harian tertinggi, 813, sehingga total negara menjadi 3.150 dengan 17 kematian.

Iran juga melaporkan jumlah kasusnya telah melonjak 388 kasus menjadi 593 dalam 24 jam, dengan jumlah kematian mencapai 43. Sementara itu, Qatar mengkonfirmasi kasus pertama di negara itu. Pada 2 Maret Kementerian kesehatan Arab Saudi mengumumkan kasus virus korona pertamanya. Korban melakukan perjalanan dari Iran ke kerajaan Teluk melalui Bahrain, Saudi Press Agency yang dikelola negara melaporkan. Tunisia dan Yordania juga melaporkan kasus pertama mereka ketika wabah terus menyebar di Timur Tengah. Pada 3 Maret Italia mengumumkan jumlah kematian di negara itu mencapai 77, sama dengan total kematian di Iran, yang mencapai 77. Pada 7 Maret Virus korona telah menewaskan hampir 3.500 orang dan menginfeksi 102.000 orang lainnya di lebih dari 90 negara. Komisi Kesehatan Tiongkok melaporkan 99 kasus baru, turun dari 143 kasus sehari sebelumnya, dengan total 80.651 kasus secara nasional. Data resmi, sementara itu, menunjukkan ekspor Tiongkok anjlok 17,2 persen dalam dua bulan pertama tahun ini setelah wabah itu membuat banyak negara terhenti.

Di Iran, salah satu negara yang paling terpuuk dengan 4.747 kasus dilaporkan dan 124 kematian, anggota parlemen yang baru-baru ini dipilih Fatemeh Rahbar meninggal karena virus korona. Pada 8 Maret Pihak berwenang Saudi memberlakukan lock down wilayah Qatif timur dalam upaya mengatasi virus yang menyebar cepat.

Riyadh juga mengatakan akan menanggukkan semua sekolah dan universitas di seluruh negeri hingga pemberitahuan lebih lanjut. Di Italia, pemerintah memberlakukan karantina ketat di negara bagian Lombardy dan 14 wilayah lainnya di utara, yang memengaruhi total 16 juta orang. Pada 9 Maret Iran membebaskan sekitar 70.000 tahanan karena wabah koronavirus di negara itu, kata kepala peradilan Iran Ebrahim Raisi, tanpa menyebutkan apakah atau kapan mereka yang dibebaskan perlu kembali ke penjara. Jerman melaporkan dua kematian pertamanya, dengan setidaknya 1.100 kasus dikonfirmasi di negara itu. Pada 10 Maret Iran dan Italia mencatat korban tewas tertinggi dalam satu hari. Sebanyak 54 orang meninggal di Iran selama 24 jam, sementara di Italia, 168 kematian baru dicatat dari koronavirus. Lebanon dan Maroko melaporkan kematian pertama mereka akibat virus itu, sementara Republik Demokratik Kongo, Panama dan Mongolia mengkonfirmasi kasus infeksi pertama mereka. Pada 11 Maret WHO menyatakan wabah virus korona sebagai pandemi, ketika Turki, Pantai Gading, Honduras dan Bolivia mengkonfirmasi kasus pertama mereka. Di Qatar, infeksi melonjak drastis dari 24 menjadi 262 dalam satu hari. Pada 12 Maret, angka kematian global melampaui 4.600 dengan infeksi melebihi 126.100 kasus. China melaporkan 15 kasus baru, jumlah terendah sejak pelaporan harian tentang infeksi dimulai tujuh minggu lalu. Pada 15 Maret Spanyol melaporkan sekitar 2.000 kasus virus korona baru dan lebih dari 100 kematian selama 24 jam terakhir. Angka-angka baru meningkatkan angka kematian covid-19 Spanyol menjadi 288, dengan lebih dari 7.700 orang terinfeksi. Kazakhstan, Filipina dan Austria mengumumkan pembatasan ketat dalam upaya untuk menahan wabah koronavirus. Pada 16 Maret Walikota New York, Bill de Blasio memerintahkan penutupan bar, teater, dan bioskop kota itu, karena jumlah kasus terus meningkat di AS. Pada hari yang sama, lebih banyak kasus dilaporkan di Turki dan Pakistan, sementara Iran mendaftarkan total 14.991 infeksi dan 853 kematian. Wilayah Teluk menandai

kematian pertamanya karena coronavirus di Bahrain. Di Afrika, Somalia mengkonfirmasi kasus pertama dari coronavirus baru. Dua negara Amerika Selatan, Chili dan Guatemala, mengumumkan bahwa mereka telah menutup perbatasan mereka sebagai bagian dari langkah-langkah yang bertujuan mengendalikan virus. Pada 17 Maret Italia melaporkan 345 kematian akibat virus korona baru di negara itu selama 24 jam terakhir dengan total korban jiwa 2.503 - meningkat 16 persen. Jumlah total kasus di Italia naik menjadi 31.506 dari yang sebelumnya 27.980, naik 12,6 persen - tingkat kenaikan paling lambat sejak penularannya terungkap pada 21 Februari. Turki, sementara itu, melaporkan kematian pertamanya terkait pandemi, seorang yang berusia 89 tahun. Pada 18 Maret Perdana Menteri Australia Scott Morrison menyatakan untuk pertama kalinya "darurat biosekuriti manusia" di negara itu. Morrison mengatakan bahwa travel advisory telah ditingkatkan ke level tertinggi dan mengatakan kepada orang Australia: "Jangan bepergian ke luar negeri, jangan pergi ke luar negeri." Italia, sementara itu, mencatat 475 kematian baru, korban satu hari tertinggi di negara mana pun, menjadikan totalnya menjadi 2.978. Total jumlah infeksi di negara ini mencapai 35.713. Untuk pertama kalinya sejak awal epidemi, tidak ada kasus domestik baru yang dilaporkan di Tiongkok. Pada 19 Maret Italia mengambil alih posisi Tiongkok sebagai negara dengan kematian akibat virus korona terbanyak, mencatat 3.405 meninggal dibandingkan dengan 3.245 di Tiongkok. Korban tewas di Spanyol melonjak 209 hingga 767 kematian dari hari sebelumnya. Peningkatan infeksi sekitar 25 persen tercatat, menjadikan total negara menjadi 17.147. Pada 20 Maret Kematian terkait virus korona melonjak melewati 10.000 di seluruh dunia. Jumlah kasus di Jerman naik 2.958 semalam menjadi 13.957. Spanyol, sementara itu, mengatakan korban tewas karena covid-19 telah meningkat menjadi 1.002.

Di Tiongkok, bagaimanapun, tidak ada kasus domestik baru yang dilaporkan untuk hari kedua berturut-

turut meskipun masih ada kekhawatiran tentang orang yang terinfeksi yang terbang ke negara itu dan mengimpor gelombang kedua penyakit. Pada 21 Maret Eropa tetap menjadi episentrum virus korona dengan Italia melaporkan 793 kematian baru, peningkatan harian terbesar, menjadikan jumlah total kematian menjadi 4.825 di tengah 53.578 kasus. Spanyol adalah negara paling parah kedua di Eropa dengan lebih dari 21.000 infeksi dan sedikitnya 1.000 kematian. Untuk membantu setiap negara Eropa mengatasi pandemi, Uni Eropa telah mengambil langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk menunda aturan tentang defisit publik, memberikan negara kebebasan untuk menyuntikkan pengeluaran ke dalam ekonomi sesuai kebutuhan. Sementara itu, dua kematian pertama telah dilaporkan di Singapura. Pada 22 Maret Angka kematian global naik di atas 13.000 sementara jumlah infeksi melebihi 311.000. Pemerintah di seluruh dunia terus melakukan lock down dengan jam malam terbaru mulai berlaku di India. Wilayah Palestina yang terkepung di Gaza mendaftarkan dua kasus virus korona pertamanya. Pada 23 Maret Italia melaporkan 602 kematian baru, sehingga total menjadi 6.077 dengan jumlah kasus di negara itu, naik menjadi 63.928. Sementara itu, di AS, jumlah kasus melonjak melewati 35.000, dengan jumlah kematian 495, menurut data Universitas John Hopkins. Pada 24 Maret Spanyol melaporkan 6.600 kasus virus korona baru, sehingga jumlah total infeksi menjadi 39.673, sementara kematian meningkat menjadi 2.696 dari 2.182 hari sebelumnya. India memberlakukan lock down untuk seluruh negeri.

BAB 7

STRATEGI NEGARAM MENGHADAPI PANDEMIK VIRUS COVID 19

Pandemi Virus Corona COVID-19 sudah menyebar di sekitar 173 negara. Pakar kesehatan internasional pun mengimbau dua pendekatan utama yang bisa dilakukan, untuk menghentikan laju penyebaran Virus Corona jenis baru itu. Dalam beberapa hari terakhir, warga sudah mendengar istilah *social distancing* dan *lockdown*, sebagai upaya pencegahan penyebaran. Keduanya memiliki perbedaan arti yang harus dipahami, selain juga memiliki kelebihan dan kelemahannya dalam keberhasilan mengatasi Virus Corona COVID-19. *Social distancing* adalah usaha untuk meminta warga tidak melakukan kontak fisik yang terlalu dekat antara satu sama lain, karena kedekatan jarak berpotensi menyebarkan virus lewat tetesan air liur. Pergeseran dari pendekatan *social distancing* ke *lockdown* terjadi di beberapa negara, di mana menurut pakar hal ini dilakukan ketika kasus sudah mencapai 1.000, maka negara sudah harus mempertimbangan dengan serius untuk kemungkinan lockdown.

A. Empat Strategi Pemerintah Atasi COVID-19

Pemerintah Pusat melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 membuat empat strategi yang akan secara konsisten dilakukan untuk menguatkan kebijakan *physical distancing* sebagai strategi dasar demi mengatasi pandemi Virus Corona COVID-19. Juru bicara Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Ahmad Yurianto, mengungkapkan strategi pertama sebagai penguatan strategi dasar itu adalah dengan gerakan masker untuk semua yang mengampanyekan kewajiban memakai masker saat berada di ruang publik atau di luar rumah.

Karena kita tidak tahu apa orang di sekitar kita menderita COVID-19 tanpa gejala atau biasa disebut tanpa gangguan. Karenanya dengan pakai masker, kita yakini kita gak rentan pada penularan COVID-19 ini.

Strategi kedua, lanjut Yuri, adalah penelusuran kontak (*tracing*) dari kasus positif yang dirawat dengan menggunakan *rapid test* atau tes cepat. Di antaranya adalah pada orang terdekat, tenaga kesehatan yang merawat pasien COVID-19, serta pada masyarakat di daerah yang ditemukan kasus banyak. Inilah gunanya pemerintah tentukan kebijakan untuk lakukan *screening* atau pemeriksaan penapisan dengan *rapid test*. Alat *rapid test* Sudah didistribusikan lebih dari 450 ribu kit ke seluruh Indonesia. Tujuannya untuk penjarangan kasus penelusuran kontak pada tenaga kesehatan dan komunitas di wilayah yang banyak sekali kasus positif. Ini strategi awal yang dilakukan terkait tes.

Strategi ketiga adalah edukasi dan penyiapan isolasi secara mandiri pada sebagian hasil *tracing* yang menunjukkan hasil tes positif dari *rapid tes* atau negatif dengan gejala untuk melakukan isolasi mandiri. Isolasi ini bisa dilakukan mandiri atau berkelompok seperti diinisiasi oleh beberapa kelompok masyarakat. Ini positif patut diapresiasi. Sehingga saudara kita bisa lakukan dengan baik tanpa ada stigmatisasi dan upaya mengucilkan. Dari kelompok inilah, lanjut dia, jika kemudian dilakukan tes ulang ditemukan positif atau keluhan klinis yang memburuk, baru akan dilakukan pengecekan antigen melalui metode PCR demi efektifitas pemeriksaan.

Sampai sekarang kita sudah laksanakan pemeriksaan lebih dari 15 ribu. Ketersediaan Reagen untuk PCR sudah ada sampai 200 ribu. Tes PCR kita tes untuk menegakkan diagnosa dari mekanisme *screening* yang terarah sehingga persentase positif dari PCR ini relatif tinggi. Karena kita melakukan tidak dengan metode acak, tapi terpilih dan terstruktur dimulai dari awal. Strategi keempat adalah isolasi Rumah Sakit yang dilakukan kala isolasi mandiri tidak mungkin dilakukan, seperti karena ada

tanda klinis yang butuh layanan definitif di Rumah Sakit. Termasuk, dilakukan isolasi di RS Darurat baik di Wisma Atlet ataupun di Pulau Galang yang akan diikuti beberapa daerah untuk melakukan isolasi kasus positif dengan gejala klinis ringan hingga sedang yang tidak mungkin melaksanakan isolasi mandiri. Puncaknya adalah RS rujukan, untuk penanganan kasus dengan keluhan sedang hingga berat yang butuh peralatan bantu yang spesifik termasuk ventilator. Strategi ini kita lakukan dalam rangka mengefektifkan, mengefisiensikan dan tepat sasaran saat kita gunakan Sumber Daya yang kita miliki. Inilah langkah-langkah yang dilakukan dan akan terus konsisten dilakukan.

Kendati demikian mengingatkan bahwa ujung tombak penanggulangan ini adalah masyarakat. Bagaimana pondasi mencegah penularan diperkuat. Sehingga hal-hal yang harus dilakukan adalah gunakan masker kain, karena masker bedah dan N95 hanya untuk petugas medis. Cuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Hindari kerumunan, jaga kesehatan diri sendiri, jangan lakukan perjalanan ke manapun, ke luar rumah hanya diperlukan, selebihnya di rumah. Kita bisa lindungi diri kita, keluarga kita, tetangga kita dan bangsa kita. Hanya kita dan kita sajalah yang bisa lindungi bangsa ini hadapi COVID-19.

B. Strategi Ekonomi Beberapa Negara Hadapi Wabah Virus Corona

Setidaknya ada dua "perang" yang dihadapi negara-negara di dunia saat menghadapi pandemi global virus corona, yakni melawan virus itu sendiri dan berusaha mengendalikan krisis ekonomi di dalam negeri. Setelah kami pernah menyajikan strategi di bidang kesehatan dari sejumlah negara untuk menangani virus corona, kali ini kami memberikan gambaran strategi ekonomi dari beberapa negara, sebagai upaya untuk dapat bertahan dari ancaman ekonomi.

Berikut adalah strategi ekonomi yang digunakan Australia serta beberapa negara di Asia, seperti Indonesia.

✓ **Strategi "hibernasi" dari Australia**

Dalam dua pekan terakhir, Australia sudah mengeluarkan serangkaian kebijakan baru di bidang ekonomi demi berupaya memperkecil dampak pandemi virus corona terhadap perekonomian secara keseluruhan. Pemerintah Australia menggunakan istilah "hibernation" untuk menjelaskan apa yang mereka lakukan sekarang. Istilah ini digunakan untuk menjelaskan binatang yang tidur di tempat persembunyian mereka selama musim dingin dan baru akan keluar setelah musim dingin berakhir. Pemerintah Australia menggunakan hal yang sama dengan berusaha "menidurkan" perekonomian yang memang sudah melesu sejak wabah virus corona.

Selama perekonomian sedang "tidur", pemerintah memberikan bantuan keuangan langsung kepada para pekerja, agar setelah pandemi berlalu perusahaan bisa mempertahankan pegawainya. Pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan yang keseluruhan nilainya lebih dari AU\$213,7 miliar, atau hampir dua ribu triliun rupiah, yang dibagi ke dalam tiga paket kebijakan. Paket terbesar diumumkan akhir Maret kemarin, yakni sebesar A\$130 miliar, dimana karyawan akan mendapatkan subsidi upah sampai AU\$1.500, atau hampir Rp15 juta per dua minggu yang akan dibayar selama enam bulan. Diperkirakan sekitar 6 juta pekerja di Australia akan mendapatkan subsidi tersebut, jumlah yang cukup tinggi dari 26 juta penduduk saat ini. Pertengahan bulan Maret, Australia mengeluarkan paket ekonomi senilai AU\$17,6 miliar kepada mereka yang selama ini sudah mendapat tunjangan sosial, termasuk pensiunan, veteran, pengasuh orang tua atau yang sakit, serta anak-anak muda yang sedang mencari kerja, dengan bantuan sebesar AU\$750 yang akan dibayarkan per 31 Maret.

✓ **Paket ekonomi di Jepang**

Partai Liberal Demokratik Jepang telah mengusulkan paket ekonomi terbesar dalam sejarah negara tersebut sebesar ¥ 60 triliun, atau sekitar Rp9.200 triliun di tengah ancaman resesi ekonomi akibat virus corona.

Menurut proposal yang dikeluarkan Selasa kemarin (31/03), ¥ 20 triliun dari jumlah tersebut adalah stimulus kebijakan fiskal, sedangkan lebih dari ¥ 10 triliun, yang setara dengan potongan lima persen dari tarif pajak penjualan negara akan dibagikan kepada masyarakat dalam bentuk tunai, subsidi, dan kupon. Perdana Menteri Shinzo Abe meminta agar paket ekonomi virus corona nilainya lebih besar, dibandingkan paket yang pernah dikururkan saat menghadapi krisis keuangan global. Menurut analisa Bloomberg, peluncuran paket ekonomi "ukuran raksasa" tidak akan menjadi yang terakhir, setelah melihat menurunnya pemasukan Jepang dari luar negeri.

Pukulan ekonomi Jepang juga makin terasa setelah pesta olahraga Olimpiade di Tokyo 2020 ditunda karena pandemi global virus corona. Pukulan ekonomi Jepang juga makin terasa setelah pesta olahraga Olimpiade di Tokyo 2020 ditunda karena pandemi global virus corona. Komuter dari Malaysia dari Johor menuju Singapura beberapa jam sebelum Malaysia memberlakukan 'lockdown' karena wabah virus corona, 17 Maret 2020.

Bantuan stimulus, khususnya dalam bentuk tunai hanya untuk meringankan kesulitan yang dihadapi oleh kelompok berpenghasilan rendah selama periode pengawasan pergerakan rakyatnya, Tetapi penting untuk dicatat bahwa sebagian besar intervensi ini adalah pembayaran satu kali kepada orang-orang yang terkena dampak, sementara ekonomi kemungkinan besar akan lebih menderita dalam jangka waktu yang lama. Apakah pemerintah siap menghadapi konsekuensi nyata dari orang yang kehilangan pekerjaan?, dengan merujuk pada potensi meningkatnya pengangguran setelah pandemi usai.

C. Evaluasi Manajemen dalam Penanganan Pandemi COVID-19

Pandemi COVID-19 mengakibatkan banyak negara berada dalam situasi krisis yang luar biasa. Selain karena sifat pandemi yang tidak terduga, krisis ini juga diakibatkan penyebarannya yang sangat cepat meluas melintasi batas-

batas wilayah dan negara. Upaya yang dilakukan oleh negara dalam situasi krisis seperti itu adalah pertama, menerapkan undang-undang darurat (*martial law*) dalam berbagai tingkatan sesuai dengan kebutuhannya. Kedua, melakukan mitigasi dan kebijakan untuk mendorong upaya-upaya pencegahan. Wabah COVID-19 mendesak banyak negara untuk menerapkan manajemen krisis (*state crisis management*). Di Vietnam, beberapa hari setelah WHO menyatakan COVID-19 sebagai pandemi global, Perdana Menteri Vietnam Nguyen Xuan Phuc menandatangani keputusan yang menyatakan epidemi nasional pada 2 Maret 2020. Penandatanganan keputusan tersebut diikuti dengan penutupan beberapa wilayah yang terkontaminasi COVID-19 dan penutupan sekolah secara agresif dan cepat. Dalam memerangi COVID-19, Vietnam bahkan membangkitkan nasionalisme warganya. Pemerintah mengibaratkan virus sebagai musuh asing dan menyerukan persatuan penduduk untuk mengalahkannya, dengan moto "memerangi epidemi ibarat berperang melawan musuh.

Pemerintah Vietnam melalui Kementerian Kesehatan dengan cepat mengambil inisiatif untuk meluncurkan situs dan aplikasi seluler, tidak hanya untuk memudahkan proses medis tetapi juga untuk menyebarkan informasi yang akurat dengan cepat. Aparat pemerintah yang membidangi teknologi digital membantu membendung penyebaran desas-desus dan berita palsu, di samping penegakan hukum terhadap orang-orang yang menyebarkan informasi tidak akurat atau terlibat dalam kegiatan mengeruk keuntungan dalam situasi krisis. Media pemerintah juga terus-menerus meliput *hotspot* pandemi seperti Tiongkok, Italia, Spanyol, dan Amerika Serikat untuk meningkatkan kesadaran publik tentang keseriusan ancaman COVID-19 serta untuk menunjukkan pentingnya intervensi yang kuat dari pemerintah.

Jepang menerapkan *state emergency* pada akhir Maret 2020 yang berlaku untuk Tokyo, Chiba, Kanagawa, Saitama, Osaka, dan Hyogo di barat dan Fukuoka di selatan atau tujuh dari 47 prefektur (setingkat provinsi) di Jepang.

Namun demikian, kebijakan tersebut lebih banyak berisi instruksi dan himbauan tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam masa pandemi. Pelanggaran yang dilakukan dalam implementasi kebijakan tidak dikenai hukuman, kecuali penimbunan barang, terutama yang terkait dengan bantuan dan juga persediaan peralatan medis.

Tindakan kebijakan manajemen krisis yang dilakukan Jepang dalam penanganan pandemi COVID-19 antara lain berupa: (1) keadaan darurat memungkinkan para pemimpin prefektur (setingkat gubernur) meminta penduduk untuk tinggal di rumah; (2) pemimpin prefektur dapat meminta penutupan sekolah, beberapa pusat perawatan anak dan senior atau komunitas; (3) penutupan toko-toko dan bisnis yang dianggap tidak penting; (4) penundaan atau pembatalan penyelenggaraan acara yang melibatkan banyak orang; (5) Kepala Prefektur dapat meminta penggunaan properti pribadi untuk membangun rumah sakit dan fasilitas medis lainnya. Baik di Jepang maupun Vietnam, fokus utama strategi manajemen krisis dalam penanganan COVID-19 adalah sektor kesehatan sebagai langkah awal. Hal ini tercermin dari berbagai kebijakan kesehatan dalam penanganan COVID-19 sebagaimana telah diuraikan di atas.

D. Ketidakjelasan fokus hingga kontroversi

Berbeda dengan Jepang dan Vietnam yang merespon cepat dan membuat kebijakan yang fokus pada mitigasi dan pencegahan penyebaran COVID-19, respon Indonesia justru sebaliknya. Saat pandemi COVID-19 merebak di Wuhan, respon pertama yang dilakukan pemerintah Indonesia melalui Menteri Kesehatan adalah meminta masyarakat untuk melakukan shalat istigash dalam menghadapi pandemi COVID-19. Tidak ada upaya untuk melakukan deteksi dini maupun kebijakan-kebijakan yang mengarah pada upaya mitigasi dan pencegahan. Pemerintah malah lebih banyak bicara dampak ekonomi. Hal ini terlihat dari pernyataan Presiden Joko Widodo yang

meminta jajarannya untuk menyiapkan instrumen moneter dan fiskal untuk memperkuat daya tahan dan daya saing negara.

Presiden Jokowi juga menekankan untuk memaksimalkan kegiatan konferensi dalam negeri, *Meeting, Incentive, Convention dan Exhibition* (MICE), serta meningkatkan promosi untuk wisatawan yang mencari alternatif destinasi karena pembatalan kunjungan ke negara-negara yang terkontaminasi COVID-19 saat itu, seperti Tiongkok, Jepang, dan Korea. Jika dalam masa pandemi banyak negara melakukan penutupan lalu lintas manusia, Pemerintah Indonesia justru menggelontorkan anggaran sebesar 103 miliar rupiah untuk promosi wisata, 25 miliar rupiah untuk mengembangkan destinasi pariwisata, dan 72 miliar rupiah untuk *influencer* dalam rangka mendorong peningkatan wisatawan ke Indonesia pada saat itu. Instrumen moneter dan fiskal tersebut pada akhirnya disahkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Keberadaan Perppu itu sendiri menuai kontroversi di kalangan masyarakat dan anggota DPR, terutama pasal 27 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 27 ayat (1) menyebutkan bahwa kebijakan bidang perpajakan, keuangan daerah, bagian pemulihan ekonomi nasional biaya penanganan pandemi COVID-19 dan penyelamatan perekonomian bukan merupakan kerugian negara. Sedangkan pasal 27 ayat (2) menyebutkan bahwa pejabat yang melaksanakan Perppu tersebut tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana asalkan dalam melaksanakan tugas didasarkan pada itikad baik dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hingga kini, Perppu tersebut masih dalam

proses *judicial review* meskipun telah disahkan menjadi Undang-Undang pada tanggal 12 Mei 2020 oleh DPR-RI.

Satu-satunya kebijakan yang terkait mitigasi dan penanganan COVID-19 dalam aspek kesehatan adalah dikeluarkannya Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (Kepmenkes) tentang penetapan infeksi virus corona sebagai penyakit yang dapat menimbulkan wabah dan penanggulangannya. Setidaknya terdapat lima poin yang disebutkan dalam Kepmenkes tersebut, yaitu (1) Infeksi COVID-19 ditetapkan sebagai penyakit yang dapat menimbulkan wabah; (2) Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah Pusat dan Daerah dalam kesiapsiagaan, deteksi, edukasi, dan peningkatan informasi terkait COVID-19; (3) Pentingnya komunikasi intensif seluruh pemangku kepentingan dalam pencegahan COVID-19; (5) Pembiayaan penanggulangan COVID-19 yang dibebankan pada Kementerian Kesehatan. Kepkemenkes tersebut berlaku sejak tanggal 2 Maret 2020.

Pada 13 Maret 2020, Pemerintah membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) untuk mengoordinasikan kegiatan antarlembaga dan mencegah serta menanggulangi dampak COVID-19. Gugus Tugas ini sekaligus sebagai rujukan utama pemerintah atas semua informasi yang terkait dengan COVID-19. Gugus Tugas ini berada dalam lingkup Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan melibatkan kementerian, lembaga, dan unit pemerintah lain seperti Kementerian Kesehatan, Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Tentara Nasional Indonesia (TNI), serta pemerintah daerah. Oleh banyak kalangan, pembentukan gugus tugas dianggap positif lantaran dapat mengatasi perbedaan pernyataan di antara elite pemerintah yang seringkali berbeda satu sama lainnya terkait persoalan COVID-19.[8]

Seiring dengan naiknya jumlah penderita COVID-19, pemerintah mulai menerapkan kebijakan yang lebih ketat sebagai upaya pencegahan penularan virus tersebut, yang dikenal dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar

(PSBB). Isi kebijakan ini pada dasarnya adalah upaya pembatasan lalu lintas manusia untuk mengurangi penyebaran COVID-19 terutama yang diakibatkan oleh transmisi (penularan) lokal. Sebelum kebijakan PSBB diputuskan, ada wacana di kalangan elite maupun publik untuk menetapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan dan juga penerapan keadaan darurat sebagai strategi manajemen krisis yang dilakukan oleh pemerintah. Namun wacana kedua kebijakan tersebut lagi-lagi menimbulkan perdebatan, baik terkait konsekuensi hukum, ekonomi, sosial, dan politik atas masing-masing regulasi tersebut jika diimplementasikan.

Meskipun PSBB telah diberlakukan, penerapan strategi manajemen krisis yang dilakukan pemerintah dalam penanganan COVID-19 dapat dikatakan kurang efektif. Hal ini terlihat dari masih banyaknya kontroversi yang terjadi baik antara pemangku kepentingan maupun publik dalam penerapan berbagai kebijakan sebagaimana tabel di bawah ini:

No	Kebijakan	Keterangan
1	Kartu Pra Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dicurigai sarat Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN); 2. Tidak efektif karena kebutuhan masyarakat saat pandemi adalah <i>fresh money</i> dan bukan pelatihan daring.
2	Interpretasi yang berbeda di antara elite pemerintah dan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam penerapan PSBB	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ojek daring tidak boleh membawa penumpang. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 18 ayat 6 Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 33 Tahun 2020. Dalam pasal itu, angkutan roda dua berbasis aplikasi dibatasi penggunaannya hanya untuk pengangkutan barang. Sementara itu, pada 14 April

		<p>2020, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengizinkan ojek daring untuk kembali mengangkut penumpang di wilayah yang menerapkan PSBB. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2020 tentang pengendalian transportasi dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19.</p> <p>2. Larangan mudik mulai 7 Mei 2020. Kemenhub menerapkan larangan mudik di tengah pandemi untuk masyarakat yang sudah ditetapkan sejak 24 April hingga 31 Mei 2020. Adapun aturan ini berlaku untuk semua moda transportasi darat. Tidak hanya itu, larangan ini juga memberlakukan sanksi bagi pelanggar, yakni berupa teguran dan putar balik kendaraan yang mencoba keluar dari wilayah PSBB layaknya Jabodetabek atau pidana dan denda sebesar Rp 100 juta. Tidak berlangsung lama, aturan tersebut kemudian diubah dan direncanakan bahwa semua moda transportasi dapat kembali beroperasi pada 7 Mei 2020, namun dengan pembatasan kriteria. Menteri Perhubungan (Menhub) Budi</p>
--	--	---

		<p>Karya Sumadi mengungkapkan bahwa kebijakan ini ditujukan agar perekonomian nasional tetap berjalan.</p> <p>3. Pemerintah membolehkan warga berusia di bawah 45 tahun kembali beraktivitas. Hal itu disampaikan oleh Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Doni Monardo melalui konferensi video Senin (11/5/2020). Padahal sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta segenap masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penularan virus corona salah satunya dengan mengurangi aktivitas di luar rumah. Adapun aktivitas yang dimaksud yakni kerja dari rumah, belajar dari rumah, dan ibadah dari rumah.[9]</p>
3	Bantuan Sosial (Bansos)	<p>Dicurigai banyak yang tidak tepat sasaran akibat kesalahan data maupun unsur kesengajaan. Konflik akibat data bansos yang tidak sesuai mengakibatkan beberapa daerah seperti Papua, Kota Tanjung Balai, hingga Provinsi DI Yogyakarta harus menunda pemberian bansos tersebut[10]. Sebagai contoh, di Maluku Tengah warga menyegel kantor desa dan melakukan protes lantaran pembagian bansos untuk warga terdampak dirasa tidak adil.</p>

Kurang efektifnya penerapan strategi manajemen krisis yang dilakukan oleh pemerintah sebagaimana diuraikan di atas pada dasarnya dipengaruhi oleh beberapa faktor. *Pertama*, buruknya komunikasi publik yang dilakukan pemangku kepentingan atas pandemi yang sedang berlangsung serta kebijakan-kebijakan yang menyertainya. *Kedua*, perbedaan persepsi dalam menerjemahkan kebijakan-kebijakan terkait penanganan COVID-19 baik oleh para pemangku kepentingan di pusat maupun daerah. *Ketiga*, perbedaan persepsi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang diakibatkan oleh perbedaan kepentingan dan faktor politik maupun ketidakjelasan arahan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah.

E. Strategi Manajemen Krisis ke Depan.

Ke depan, untuk lebih mengefektifkan strategi manajemen krisis setidaknya ada beberapa langkah yang perlu dilakukan:

1. Melakukan penilaian risiko sebagai langkah awal dalam menyusun kebijakan;
2. Menyiapkan struktur kelembagaan yang tepat, mandat yang jelas didukung oleh kebijakan yang komprehensif dan undang-undang, serta alokasi sumber daya untuk semua kapasitas ini melalui anggaran reguler juga instrumental untuk kesiapan menyeluruh terhadap krisis;
3. Membangun sistem deteksi krisis dapat dilakukan melalui berbagai sumber, seperti jaringan pemantauan dan sistem peringatan dini, otoritas publik, media komunitas, sosial media, dan sektor swasta;
4. Memantau perkembangan krisis untuk memahami karakteristik krisis yang terjadi dan memastikan operasional kebijakan yang terukur. Dalam hal ini seringkali dibutuhkan organisasi intelijen yang tepat untuk membangun rencana kontingensi yang tepat pada situasi tanggap darurat;

5. Regulasi dan kebijakan dalam situasi krisis juga perlu dikoordinasikan, dipantau, dan diadaptasi saat krisis berkembang. Oleh karenanya, mekanisme pengawasan taktis dan strategis perlu dibangun hingga tingkat terendah dalam struktur birokrasi yang ada; serta
6. Membuat prosedur operasi standar (SOP) dengan mengatur operasi dan mengoordinasikan berbagai informasi dan protokol komunikasi serta mekanisme implementasinya, termasuk di dalamnya melakukan mobilisasi sarana tanggap darurat tambahan jika diperlukan.

Selain memastikan kerja sama dan mengerahkan pengambilan keputusan, kepemimpinan memainkan peran kunci komunikasi pada masa krisis. Respon pemerintah yang cepat dalam waktu yang tepat serta kapasitas aktor dan kelembagaan yang memadai menjadi faktor penting bagi keberhasilan strategi negara dalam masa krisis. Pada akhirnya, mekanisme umpan balik untuk mengevaluasi semua kebijakan dan tindakan yang telah diambil pada masa krisis juga harus dilakukan secara reguler. Hal ini selain untuk menarik pelajaran juga membantu meningkatkan kesiapsiagaan dan proses tanggap darurat jika krisis yang sama terjadi.

F. 5 Strategi Kendalikan Wabah Virus Corona

Penyebaran virus corona di seluruh dunia membawa dampak besar: tersebarnya panik, ribuan kasus setiap hari, penutupan kota dan negara, pembatalan penerbangan, festival dan berbagai kegiatan lainnya. Eropa kini menjadi pusat penyebaran. Asia berangsur pulih sebagian, tapi sebagian lagi sedang bersiap menghadapi gelombang besar. Namun di tengah berita-berita ini sekelompok negara berhasil mengendalikan penyebaran virus - yang sudah menginfeksi lebih dari 200 ribu orang dan menewaskan lebih dari 11.000 orang lainnya.

Ada beberapa negara yang berhasil mengambil langkah untuk mengendalikan wabah ini, dan menurut saya kita bisa belajar dari mereka, kata ahli penyakit menular

Tolbert Nyenswah, Profesor di Johns Hopkins University Bloomberg School of Public Health. Di China kasus sudah berkurang, tapi langkah sangat agresif yang mereka lakukan tak mudah ditiru oleh negara-negara demokratis. Di beberapa negara lain telah melakukan langkah berbeda yang sama agresifnya, dan mereka berhasil. Taiwan, misalnya, dengan jumlah penduduk 23,6 juta dan bertetangga dengan China, hingga melaporkan 67 kasus dan satu kematian selama lebih dari dua bulan mereka melawan virus corona. Sementara itu Hong Kong (dihuni 7,5 juta penduduk dan berbatasan langsung dengan China) mencatat adanya 155 infeksi dan empat kematian selama dua bulan. Jepang yang populasinya 120 juta, kasusnya tak melebihi 800, sedangkan Korea Selatan melaporkan 8.000 kasus, tetapi mereka berhasil menekan infeksi baru dan jumlah kematian turun drastis dalam minggu-minggu terakhir. Menurut Prof Nyenswah, hasil-hasil di negara-negara ini tidak hanya tergantung dari lokasi geografis atau jumlah penduduk (sekalipun itu memainkan faktor besar dan bisa sangat berpengaruh), tetapi lebih banyak dari kebijakan yang inovatif, kesiapan dan respons yang cepat. Apa langkah-langkah yang lebih efektif?

1. Tes, tes, dan lebih banyak tes Badan Kesehatan Dunia

(WHO) dan para ahli yang ditanya oleh BBC Mundo sepakat bahwa deteksi cepat merupakan faktor utama dalam menahan penyebaran pandemi. Kita tak bisa mengambil langkah atau tahu dampak sesungguhnya dari virus ini jika kita tak tahu berapa orang yang telah terinfeksi. Krys Johnson, pakar penyakit menular di Temple University, Amerika Serikat, sepakat bahwa faktor ini membuat hasil berbeda antara satu negara dengan negara lainnya. Pengetesan memperlihatkan hasil yang lebih baik, sementara di tempat lain kasus meningkat dengan pesat. Korea Selatan mengetes lebih dari 10.000 orang sehari yang berarti orang yang mereka tes dalam dua hari lebih banyak daripada orang yang dites di Amerika dalam sebulan. Direktur WHO Tedros Adhanom

Ghebreyesus mengatakan bahwa tes bagi siapapun yang punya gejala merupakan "tulang punggung" bagi penghentian penyebaran pandemi ini. Namun ia mengingatkan, banyak negara yang terus melakukan pemeriksaan hanya terhadap pasien yang punya gejala serius. Ini bisa membuat catatan statistik keliru bahkan membiarkan orang dengan gejala ringan, padahal terinfeksi, terus menyebarkan virus.

2. Isolasi mereka yang terinfeksi

Johnson berkata bahwa pemeriksaan kesehatan tak hanya berujung pada isolasi mereka yang sakit dan mencegah virus berkembang lebih luas, tapi juga membuka jalan untuk mendeteksi kemungkinan infeksi yang belum berkembang menjadi gejala. Korea Selatan dan China telah melakukan kerja luar biasa dalam melacak, mengetes, dan mengendalikan warga mereka. China sangat waspada dalam mendeteksi kasus-kasus potensial yang bisa jadi merupakan salah satu penyebab turun drastisnya infeksi baru yang dilaporkan. Orang demam dikirim ke 'klinik demam' dan dites untuk flu dan covid-19. Ketika hasilnya positif covid-19, mereka diisolasi di tempat yang disebut 'hotel karantina' untuk mencegah penularan ke anggota keluarga. Tak seperti China, di Taiwan, Singapura dan Hong Kong, sekalipun tak ada situs karantina, aturan yang ditegakkan adalah mengatur agar orang tetap berada di rumah dengan menerapkan denda yang kadang besarnya bisa mencapai Rp47 juta.

Namun menurut Nyenswah, melacak potensi infeksi merupakan landasan utama dari strategi ini. Ia mengingatkan bahwa pemerintah Taiwan dan Singapura mengembangkan strategi untuk melacak orang yang kontak dengan pasien yang sakit. Siasat itu dilakukan mulai dari melakukan wawancara hingga melihat kamera keamanan dan catatan perjalanan, hotel, serta pengujian kepada mereka yang mungkin terpapar. Contohnya, pada tanggal 12 Maret, di Hong Kong diduga ada 445 kasus dan dilakukan 14.900 tes di antara orang yang kontak untuk

mendeteksi kemungkinan infeksi. Hasilnya, diketahui 19 orang positif.

3. Persiapan dan reaksi cepat

Menurut Nyenswah, yang pernah melawan Ebola di Afrika Barat, salah satu elemen dasar untuk pengendalian virus adalah bertindak cepat sebelum penularan meluas di komunitas. Negara seperti Taiwan dan Singapura memperlihatkan langkah cepat untuk mendeteksi dan mengisolasi kasus baru. Ini bisa jadi faktor penentu dalam mengendalikan penyebaran. Dalam artikel yang diterbitkan di *Journal of the American Medical Association*, respons di Taiwan memperlihatkan bahwa pengendalian mereka berasal dari cara yang telah mereka kembangkan untuk peristiwa sejenis. Pada 2003 mereka membuat komando terpusat untuk mengendalikan epidemi. Badan ini, yang mencakup beberapa agensi penyelidikan dan pemerintahan, dibentuk sesudah krisis yang disebabkan oleh SARS. Sejak itu mereka melakukan berbagai langkah persiapan dan penyelidikan untuk menanggapi kemungkinan epidemi.

Persiapan dan langkah cepat sangat penting dalam tahap awal wabah. Di Eropa dan Amerika Serikat, kita menyaksikan kurangnya persiapan dan lambatnya tanggapan. Sebelum dipastikan terjadinya penularan antara manusia di pertengahan Januari, Taiwan telah mulai memeriksa semua penumpang dari Wuhan, tempat pertamakali wabah terjadi. Hong Kong mulai menerapkan deteksi temperatur mulai tanggal 3 Januari dan menerapkan karantina 14 hari bagi turis yang masuk wilayah mereka. Setiap dokter diinstruksikan melaporkan semua pasien yang demam atau punya masalah pernapasan akut serta sejarah bepergian ke Wuhan.

4. Jaga jarak

Menurut Nyenswah, ketika penularan pertama dilaporkan di sebuah komunitas, langkah pencegahan sudah sulit diterapkan. Maka langkah berikutnya, seperti menjaga jarak (*social distancing*), lebih efektif untuk mencegah pihak yang paling rentan terhadap penularan. Sekali ada

penyakit ini di satu negara, langkah pencegahan tidak lagi tepat. Anda harus mulai mengambil langkah yang tepat atau kehilangan kemungkinan penghentian yang efektif terhadap wabah ini. Kecepatan penerapan instruksi untuk jaga jarak seperti di Hong Kong dan Taiwan adalah kunci untuk mengurangi penularan. Hong Kong telah meminta orang dewasa untuk bekerja dari rumah sejak akhir Januari serta menutup sekolah dan kumpul-kumpul. Langkah ini ditiru di banyak negara, tapi menurut Johnson, kuncinya adalah seberapa cepat keputusan itu dibuat. Singapura misalnya tak pernah menutup sekolah karena adanya dampak ekonomi bagi keluarga yang punya anak kecil. Strategi yang dilakukan, menurut koran The Straits Times adalah mengetes dan mengawasi murid dan pengajar setiap harinya.

5. Mempromosikan gaya hidup higienis

Sejak wabah virus corona mulai dilaporkan terjadi di luar China, WHO berkeras menyarankan untuk jaga jarak, mencuci tangan secara rutin dan gaya hidup higienis guna mencegah penyebaran virus. Banyak negara di Asia yang belajar dari pengalaman SARS di tahun 2003. Disana juga ada kesadaran menjalankan hidup higienis tak hanya untuk menghindar penyakit, tapi juga agar tak menulari orang lain. Sangat penting dalam kasus ini. Di Taiwan, Singapura dan Hong Kong, banyak tersedia cairan anti bakter di jalan. Pemakaian masker juga biasa dilakukan, bahkan sebelum wabah virus corona. Pemerintah Taiwan mempromosikan cuci tangan lewat internet sembari memperkuat mekanisme pembersihan jalan dan tempat-tempat umum. Ini satu faktor yang kadang terlupa di tengah langkah-langkah drastis yang sedang diambil. Menurut saya langkah-langkah yang dilakukan oleh warga seperti cuci tangan terbukti merupakan salah satu yang paling efektif.

BAB 8

INDONESIA DAN VIRUS CORONA

Covid-19 merupakan nama penyakit yang disebabkan oleh virus corona. Nama ini diberikan oleh WHO (*World Health Organization*) sebagai nama resmi penyakit ini. Covid sendiri merupakan singkatan dari Corona Virus Disease-2019. Covid-19 yaitu penyakit yang disebabkan oleh virus corona yang menyerang saluran pernafasan sehingga menyebabkan demam tinggi, batuk, flu, sesak nafas serta nyeri tenggorokan. Menurut situs WHO, virus corona adalah keluarga besar virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Pada manusia corona diketahui menyebabkan infeksi pernafasan mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih parah seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS), dan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Virus ini mampu mengakibatkan orang kehilangan nyawa sehingga WHO telah menjadikan status virus corona ini menjadi pandemi dan meminta Presiden Joko Widodo menetapkan status darurat nasional corona. Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat terkait pandemi virus corona sejak akhir Maret 2020. Ia kemudian mengeluarkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk menekan penyebaran virus corona. Jokowi juga menetapkan pandemi virus corona sebagai bencana nasional non-alam. Mantan wali kota Solo itu akhirnya melarang masyarakat untuk mudik ke kampung halaman terhitung 24 April sampai 31 Mei mendatang.

A. Proses Penularan Covid-19

Menularnya Covid-19 membuat dunia menjadi resah, termasuk di Indonesia. Covid-19 merupakan jenis virus yang baru sehingga banyak pihak yang tidak tahu dan tidak mengerti cara penanggulangan virus tersebut.

Pemerintah dituntut untuk sesegera mungkin menangani ancaman nyata Covid-19. Jawaban sementara terkait dengan persoalan tersebut ternyata telah ada dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. Dimana dalam undang-undang tersebut telah memuat banyak hal terkait dengan keekarantinaan kesehatan, pihak yang berwenang menetapkan kedaruratan kesehatan masyarakat, dan lain sebagainya. Dalam undang-undang tersebut juga menentukan apa saja peraturan pelaksanaan sebagai tindak lanjut ketentuan dalam keekarantinaan kesehatan. Namun peraturan pelaksanaan sebagai ketentuan lanjutan dari UU Keekarantinaan Kesehatan belum ada padahal peraturan pelaksanaan tersebut sangat perlu untuk segera dibentuk.

Menurut WHO, Covid-19 menular dari orang ke orang. Caranya dari orang yang terinfeksi virus corona ke orang yang sehat. Penyakit menyebar melalui tetesan kecil yang keluar dari hidung atau mulut ketika mereka yang terinfeksi virus bersin atau batuk. Tetesan itu kemudian mendarat di benda atau permukaan yang disentuh dan orang sehat. Lalu orang sehat ini menyentuh mata, hidung atau mulut mereka. Virus corona juga bisa menyebar ketika tetesan kecil itu dihirup oleh orang sehat ketika berdekatan dengan yang terinfeksi corona.

B. Cara Menanggulangi dan Mencegah Covid-19 Yang Benar

Seiring mewabahnya virus Corona atau Covid-19 ke berbagai negara, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan protokol kesehatan. Protokol tersebut akan dilaksanakan di seluruh Indonesia oleh pemerintah dengan dipandu secara terpusat oleh Kementerian Kesehatan. Adapun salah satu protokolnya yaitu jika merasa tidak sehat dengan kriteria demam lebih dari 38⁰ C, batuk, flu, nyeri tenggorokan maka beristirahatlah yang cukup di rumah dan minumlah air yang cukup. Gunakan masker,

apabila tidak memiliki masker, hendaknya mengikuti etika ketika batuk dan bersin yang benar dengan cara menutup hidung dan mulut dengan tisu, lengan atas bagian dalam. Bila merasa tidak nyaman dan masih berkelanjutan dan disertai sesak nafas maka segerakan diri untuk memeriksakan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Dan usahakan untuk tidak menaiki kendaraan massal. Sebagaimana protokol diatas maka dapat diambil kesimpulan mengenai penanggulangan dan pencegahan Covid-19 secara umum yang benar adalah sebagai berikut:

- ✓ Rajin mencuci tangan
- ✓ Kurangi berinteraksi dengan orang lain
- ✓ Gaya hidup sehat (makan, tidur, olahraga) untuk imunitas tubuh
- ✓ Jaga jarak aman (1 meter) dengan orang yang batuk/bersin
- ✓ Hindari kerumunan
- ✓ Hindari menyentuh mata, hidung dan mulut
- ✓ Hindari bepergian ke daerah terjangkit atau bila sedang sakit
- ✓ Etika batuk dan bersin, hindari meludah di tempat umum
- ✓ Olah daging mentah dengan hati-hati
- ✓ Hindari memakan daging hewan yang sakit/ mati karena sakit
- ✓ Bila ada gejala, segera berobat dan gunakan masker bila sedang sakit
- ✓ Serta selalu berdoa kepada Tuhan yang Maha Melindungi

C. Bentuk Partisipasi Dalam Memerangi Covid-19

Di tengah gencarnya kebijakan Merdeka Belajar era Menteri Nadiem Makarim, negara digegerkan dengan wabah virus corona (Covid-19). Kebijakan yang diberlakukan saat ini adalah belajar di rumah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Presiden Jokowi di istana bogor pada tanggal 15 Maret 2020 yaitu "Dengan kondisi

ini saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah." Hal ini sudah berjalan sejak satu bulan lebih. Dimana sekolah diliburkan, tetapi proses belajar mengajar tetap berjalan melalui kegiatan di rumah. Guru mengajar dari rumahnya masing-masing, para siswa belajar di rumahnya masing-masing. Pembelajaran di rumah bisa menggunakan model pembelajaran mandiri, pembelajaran online, pembelajaran berbantu ICT, atau bentuk lain.

Salah satu dari bentuk partisipasi dalam memerangi Covid-19 yaitu mendukung kebijakan pemerintah akan hal tersebut dengan tetap belajar di rumah, kerja dari rumah dan ibadah di rumah. Hal ini bertujuan mengurangi dan mengantisipasi penyebaran virus corona. Adapun pembelajaran online atau pembelajaran daring merupakan sistem yang menggantikan pembelajaran sistem tatap muka dengan via online dengan mengakses internet baik melalui Hp ataupun laptop. Tujuannya agar proses pembelajaran tetap berjalan walau dalam keadaan seperti ini. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kita termasuk orang yang ikut berpartisipasi dalam memerangi Covid-19 ini. Namun terdapat cara yang dapat dilakukan agar pembelajaran online tetap berjalan efektif. Diantaranya:

- Tetap mengoptimalkan manajemen waktu agar waktu belajar tetap teratur
- Mempersiapkan peralatan-peralatan yang dibutuhkan saat pembelajaran online berlangsung seperti Hp ataupun laptop
- Belajar dengan serius dan fokus
- Tetap menjaga komunikasi dengan pengajar dan teman-teman kelas

Dengan demikian, pembelajaran online yang dilakukan akan mampu memberikan nilai positif terhadap proses pembelajaran. Karena hal ini juga mampu memberikan pengalaman baru serta pembelajaran yang menggambarkan bahwa teknologi juga dapat bermanfaat baik bagi penguannya.

Virus corona: Dampaknya 'lebih buruk daripada krisis finansial 2008' dan pertumbuhan ekonomi dunia bisa tinggal separuh

Berbagai indikator memperlihatkan dampak ekonomi penyebaran virus ini lebih besar daripada krisis ekonomi global tahun 2008.

Dampak ekonomi wabah virus corona bisa lebih buruk daripada yang diperkirakan sebelumnya.

Menurut Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD), pertumbuhan ekonomi bisa turun menjadi yang terburuk sejak 2009.

Ekonomi China, yang merupakan negara manufaktur raksasa dunia saat ini, juga mengalami penurunan drastis.

Rantai pasokan terganggu menyebabkan pelambatan produksi.

OECD memperkirakan bahwa pertumbuhan dunia di tahun 2020 ini akan berkisar pada angka 2,4%, turun dari angka 2,9% pada bulan November.

Namun menurut mereka, apabila wabah ini menjadi lebih intensif lagi, pertumbuhan bisa hanya tinggal 1,5%, hampir separuh dari tahun lalu.

Ini dinyatakan sesudah Bank of England menyatakan akan membantu menstabilkan pasar, yang mengalami kerugian minggu lalu.

Menurut perkiraan OECD, ekonomi global akan pulih lagi ke angka pertumbuhan 3,4% pada tahun 2021.

Ini dibuat dengan asumsi epidemi di China akan mencapai puncaknya pada kuartal pertama tahun ini, dan wabah di tempat lain berlangsung ringan dan bisa dikendalikan.

Namun gambaran ini bisa lebih buruk seandainya virus menyebar luas di Asia, Eropa dan Amerika Utara.

Terendah sejak 2008

Sepanjang bulan Februari, ekonomi China mengalami pertumbuhan terendah sejak tahun 2005 seiring langkah pemerintah menangani penyebaran virus.

Menurut data dari Kantor Statistik Nasional China (ONE), patokan Purchasing Managers' Index (PMI) dari sektor manufaktur jatuh 14,3 poin ke 35,7 setelah sebelumnya mencapai angka 50 poin pada bulan Januari tahun ini.

Angka ini merupakan rekor terendah. Sebelumnya angka terendah terjadi pada November 2008 ketika dunia terlanda krisis finansial global.

Angka PMI dihitung dengan data dari survei bulanan ke perusahaan sektor swasta dan menjadi indikator kunci bagi kesehatan ekonomi suatu negara serta bisa menggerakkan pasar keuangan.

Sektor manufaktur dunia saat ini sepertiganya berada di China. China juga menjadi eksportir terbesar dunia, maka kejatuhan angka PMI meera akan memiliki dampak kepada negara-negara lain.

China adalah eksportir terbesa di dunia dan penurunan di negara itu berdampak global.

Minggu lalu, prediksi dampak penanganan virus corona terhadap perdagangan dan ekonomi global sudah diumumkan.

Lembaga konsultan Capital Economics yang berkantor di London memperkirakan wabah ini akan menghabiskan biaya hingga US\$280 miliar, hanya pada tiga bulan pertama tahun 2020.

Angka ini lebih besar daripada anggaran tahunan Uni Eropa, setara kira-kira pendapatan Microsoft atau Apple, dan delapan kali lipat anggaran tahunan pemerintah Nigeria.

Tak ada buruh

Pembatasan yang sedang diterapkan di negeri yang disebut "pabrik dunia" ini sudah mempengaruhi beberapa perusahaan seperti Apple, Diageo, Jaguar, Land Rover dan Volkswagen, yang tergantung pada produksi dan konsumsi China.

Data kantor statistik China memperlihatkan bahwa pabrik kesulitan pekerja.

Menurut Bloomberg Economics, pabrik di China hanya beroperasi 60% hingga 70% dari kapasitas mereka minggu ini.

Kebanyakan pabrik tergantung pada 300 juta buruh yang dari berbagai kota di China, yang sepertiganya masih belum bekerja lagi karena adanya karantina.

Para pemimpin China sudah meminta kepada pemerintah daerah, pabrik dan buruh untuk mulai segera bekerja lagi, terutama di daerah-daerah yang tak terlalu terdampak.

Namun hingga kini tanggapan masih lambat.

Pasokan iPhone terpengaruh

China adalah raksasa industri. Tetapi sektor *smartphone* menjadi salah satu yang paling terdampak, karena negara ini adalah produsen dan pengeksport perangkat terbesar di dunia.

Daftar ponsel yang mengalami kekurangan suku cadang termasuk iPhone Apple, salah satu *smartphone* terlaris di planet ini.

Perusahaan teknologi itu mengumumkan pada 17 Februari bahwa produksi dan penjualan produk andalannya itu telah terdampak wabah - dan menyatakan bahwa pasokan iPhone di seluruh dunia "akan sementara dibatasi".

Riset pasar oleh Canalsys telah memperkirakan penurunan hingga 50% dalam pengiriman telepon pintar di China antara Oktober 2019 dan Maret 2020.

Penyusutan ekonomi pertama sesudah Revolusi Budaya?

Di China, virus corona ini sudah punya dampak negatif terhadap konsumsi domestik, salah satu landasan model ekonomi yang dipromosikan Presiden Xi Jinping.

Toko-toko banyak yang tutup karena permintaan yang rendah. Ini disebabkan banyak pelanggan masih memilih untuk tinggal di rumah dan tidak banyak berbelanja, seperti dilaporkan Capital Economics.

Menurut asosiasi produsen makanan China, 93% restoran tutup selama epidemi - juga selama Tahun Baru Imlek yang merupakan perayaan terbesar di China yang bertepatan dengan dimulainya wabah.

Sektor ini diperkirakan merugi hingga 500 miliar yuan (sekitar Rp1.000 triliun) menurut data yang dikumpulkan EFE dari Beijing.

Ekonom Larry Hu, dari Macquarie Capital di Hong Kong, memperkirakan ekonomi China bisa mengalami penyusutan dalam trimester pertama.

Ini akan menjadi yang pertamakalinya terjadi sejak Revolusi Budaya, seperti dilaporkan oleh surat kabar South China Morning Post (SCMP).

Belum ditentukan

Pertumbuhan ekonomi China tahun 2019 merupakan yang terendah selama tiga dekade dan pemerintah berkeras bahwa pembangunan ekonomi dan sosial mereka tetap bisa memenuhi target, sekalipun ada epidemi.

Pihak pemerintah China biasanya mengumumkan target-target ini - semisal GDP atau inflasi - pada bulan Maret selagi ada rehat dalam sidang parlemen tahunan.

Namun karena wabah, pengumuman ini ditunda hingga waktu yang belum ditentukan.

Para ahli telah memperkirakan dampak ekonomi yang kuat dari wabah koronavirus.

Ketidakpastian

International Monetary Fund (IMF) menurunkan perkiraan pertumbuhan Produk Domestik Bruto, PDB, China di tahun 2020 dari 6% menjadi 5,6%.

Menurut mereka, virus corona telah menghadapkan ekonomi global pada "ketidakpastian yang mendesak" dan menjadi ancaman bagi pemulihan karena adanya kemungkinan dampak terhadap rantai pasokan global.

Di tengah situasi tidak pasti ini, pihak berwenang China berusaha menyampaikan pesan-pesan yang menenangkan.

Akhir pekan lalu misalnya, mereka menyatakan sekitar 90% perusahaan milik negara telah memulai kembali kegiatannya, menurut surat kabar SCMP. "Khususnya di sektor gas, minyak, komunikasi, listrik dan transportasi telah beroperasi lebih dari 95%, dan beberapa sudah mencapai 100%," menurut laporan komisi pengawas dan pengelola aset negara.

Seorang broker di New York Stock Exchange khawatir terhadap efek peningkatan penyebaran virus corona. Sekalipun indikator-indikator ini berada di zona merah, penurunan produksi di China punya dampak positif. Berdasar pengamatan satelit pengawas polusi NASA, terdeteksi penurunan nitrogen dioksida di China yang menandakan turunnya tingkat polusi di sana.

BAB 9

PANDEMIC VIRUS COVID 19 DAN PEMBANGUNAN

Pembangunan infrastruktur di tengah pandemi Covid-19 dinilai perlu memperhatikan beberapa hal, terutama untuk menunjang pemulihan ekonomi nasional. Seperti diketahui, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan realokasi anggaran dan refocussing kegiatan akibat pandemi Covid-19. Sebelum adanya realokasi, anggaran Kementerian PUPR mencapai Rp120,21 triliun. Alokasi yang cukup besar disebabkan pembangunan infrastruktur masih menjadi fokus pemerintahan Presiden Joko Widodo di periode kedua. Namun, adanya pandemi Covid-19 membuat anggaran Kementerian PUPR dipangkas Rp44,58 triliun, sehingga tersisa Rp75,63 triliun pada 2020. Pengamat Tata Kota dari Universitas Trisakti Yayat Supriatna mengatakan dengan anggaran yang tersisa, strategi kebijakan pembangunan infrastruktur harus mampu memilih jenis infrastruktur untuk pemulihan ekonomi terlebih dahulu.

Pasalnya, pemerintah bekerja berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang masih dalam konteks kondisi normal dengan kebijakan jangka panjang dan target capaian pembangunan yang telah ditentukan sebelumnya. Kalau kondisi ekonomi belum pulih dan APBN yang berdarah-darah seperti ini maka harus ada perubahan dikaitkan dengan skala prioritas untuk tujuan pemulihan ekonomi. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk pembangunan infrastruktur paling strategis dalam menunjang pemulihan ekonomi.

Pertama, infrastruktur ketahanan pangan. Yayat mengatakan akibat Covid-19, persoalan pangan jadi masalah besar. Oleh karena itu, program cetak sawah baru perlu dikaji kembali kemungkinannya. Jika berpikir ke

depan, jelasnya, ada kemungkinan kerentanan kebutuhan pangan secara nasional. Apalagi impor pangan dari negara seperti China dan Vietnam juga dinilai masih akan sulit dilakukan di tengah ketidakpastian soal kapan vaksin Covid-19 ditemukan. Harus sinergi Kementerian PUPR dan Kementerian Pertanian terkait persoalan pangan, harus ada upaya perbaikan sarana irigasi, bendungan untuk mendukung percepatan, pembenahan di sektor ketahanan pangan.

Kedua, antisipasi perubahan dikaitkan dengan kenormalan baru terutama pola sistem bekerja sehingga dibutuhkan infrastruktur penunjang di sektor energi dan telekomunikasi. Adanya *work from home*, peran Kementerian PUPR, mendukung sistem energi dan telekomunikasi.

Ketiga, dukungan infrastruktur untuk fasilitas kesehatan. Menurutnya, ketika upaya pemulihan dilakukan terlihat bahwa fasilitas kesehatan di Indonesia masih sangat kurang. Sinergi antara Kementerian PUPR dan Kemenkes, bagaimana membangun faskes yang cepat, itu ahlinya di PU. Selain itu, dia menyatakan diperlukan juga infrastruktur yang mendukung pola hidup bersih dan sehat seperti penyediaan air.

Secara keseluruhan, dengan adanya pandemi Covid-19, pembangunan infrastruktur perlu melakukan *refocussing*. Jika sebelumnya, fokus pada mendorong pertumbuhan pembangunan dan percepatan. Namun, ke depan yaitu fokus pada infrastruktur pemulihan. Menurutnya, dengan defisit anggaran 6 persen hingga 7 persen memerlukan waktu untuk bisa pulih lagi sesuai amanat Undang-Undang yaitu defisit 3 persen. Saat ini, sektor seperti pariwisata hingga perdagangan menunggu waktu untuk dapat pulih kembali setelah terdampak Covid-19. Pemulihan ini yang harus dilakukan. Bagaimana pun PUPR harus bersinergi dengan aspek ekonomi dan kesehatan, mau tidak mau infrastruktur terkait kesehatan harus jadi bagian yang tidak terpisahkan dari strategi penanganan yang dibuat Kementerian PUPR.

A. Dampak Covid-19 Terhadap Pembangunan Di Indonesia Berbasis Ekonomi

Di tahun 2020 ini, Indonesia sedang dilanda gawat darurat oleh wabah virus Corona yang merupakan salah satu virus mematikan. Virus tersebut, merupakan perpindahan yang ber asal dari Wuhan, Cina di tahun 2019 silam, dimana, menurut informasi virus ini di latar belakang oleh hewan, kemudian menular di kehidupan manusia. Apa yang telah kita ketahui sekarang bahwa, virus tersebut memiliki dampak yang sangat besar dan meluas, tidak hanya merugikan sisi kesehatan, tetapi juga terhadap sektor pembangunan - pembangunan di Indonesia saat ini, seperti hal nya pada sektor perekonomian di Indonesia.

Sudah dapat kita amati dan rasakan. Sekarang, seluruh penjuru Bangsa Indonesia mengalami permasalahan ekonomi yang sangat serius, banyak sekali perusahaan-perusahaan yang mengambil kebijakan untuk menutup sementara kegiatan perusahaan selama waktu yang masih belum bisa ditentukan. Terdapat pula perusahaan yang masih berjalan produksinya akan tetapi mengambil kebijakan dengan mengurangi pegawai atau karyawan mereka dengan cara PHK tanpa memberikan pesangon, atau memindahkan ke lapangan pekerjaan yang baru. Banyak sekali para buruh, pegawai diluar sana yang menangis dan menahan tekanan batin yang kehilangan pekerjaan. Tingginya angka pengangguran waktu demi waktu semakin meningkat, dan angka tingkat kemiskinan juga ikut bertambah, dan ini mempengaruhi perkembangan negara Indonesia.

Dari kebijakan memberhentikan buruh dan pegawai juga akan berdampak kepada sektor finansial keluarga masing-masing, namun, dengan COVID-19 ini membuat banyak sekali kepala keluarga yang mengalami kesulitan dalam persoalan perekonomian berupa, penurunan pendapatan keluarga dan tekanan konsumsi akibat kehilangan pekerjaan secara mendadak. Selain pada sektor perekonomian keluarga, juga berdampak kepada angsuran - angsuran yang harus dibayar pada setiap bulannya, apabila

sudah tidak memiliki penghasilan, maka para dibitur akan semakin tertekan akibat tidak mampu untuk membayar angsuran setiap bulannya.

B. Redam Corona, Pemerintah Genjot Pembangunan Infrastruktur

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan pemerintah terus menggenjot pembangunan infrastruktur di daerah demi menggerakkan perekonomian yang tengah lesu akibat virus corona. Dia menilai pemerintah harus fleksibel dalam mendukung kegiatan perekonomian. Namun, dia menyebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang terbatas mengharuskan sinergi pemerintah pusat dan daerah untuk mencari pendanaan lainnya. Contohnya adalah pendanaan lewat skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Pelemahan perekonomian (akibat virus corona) tentu Indonesia tidak terkecuali, tapi kami harus yakin bahwa APBN harus tetap bisa fleksibel. Dalam arti, memberi dukungan terhadap ekonomi dan kegiatan masyarakat.

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (PUPR) Eko Heripoerwanto menyebut KPBU diperlukan karena dari total seluruh proyek yang menjadi target PUPR 2020 hingga 2024, pemerintah hanya mampu mendanai 30 persen dari total keseluruhan. Kebutuhan pembangunan PUPR hingga 2024 yang senilai Rp2.000 triliun hanya dapat dibiayai APBN sebesar Rp600an triliun. Sehingga, skema pendanaan KPBU dinilai tepat untuk menjawab lesunya pendanaan infrastruktur yang menjadi prioritas kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia mengaku keseriusan pemerintah merealisasikan skema pendanaan KPBU mulai menunjukkan hasil.

Jumlah keterlibatan swasta tercermin dari proyek-proyek jalan tol PUPR. Katanya, terdapat 58 ruas jalan tol PUPR yang dikelola oleh BUMN sementara 17 lainnya kini dikelola oleh swasta. Proyek yang dirilis PUPR saja ada

223 proyek, penanggungjawab proyek tidak hanya PUPR tapi bisa jadi Gubernur atau Wali Kota masing-masing daerah. Saat ini pendanaan sudah berbeda dengan awal dibentuknya KPPU. Di kesempatan yang sama, Suhasil menyatakan fleksibilitas APBN akan diterapkan Kementerian Keuangan menyusul berbagai persoalan ekonomi yang terus datang sejak awal tahun. Mulai dari perang dagang antara AS-China, merebaknya kasus virus corona, hingga penurunan harga minyak mentah dunia.

Dia menyebut pemerintah akan terus mendorong stimulus untuk menopang dunia usaha di tengah lesunya ekonomi saat ini. Diketahui, harga minyak mentah dunia jatuh ke posisi terendah lebih dari 11 tahun terakhir pada perdagangan minggu lalu. Minyak mentah berjangka Brent terjun US\$4,72 atau 9,4 persen ke posisi US\$45,27 per barel. Sementara, seperti dilansir Antara, Senin (9/3), harga minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) anjlok US\$4,62 atau 10,1 persen menjadi US\$41,28 per barel. Harga ini merupakan yang terendah sejak Agustus 2016 lalu. Jokowi Waspada

C. Dampak Corona terhadap Ekonomi Berkelanjutan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mewaspadai dampak lanjutan virus corona Covid-19 terhadap perekonomian pada 2021. Pandemi corona memukul perekonomian Indonesia dan membuat target pembangunan Indonesia tahun ini tak tercapai. Bank Dunia dan IMF pun memprediksi pandemi tersebut akan membuat resesi ekonomi global. Kita harus tetap waspada akan dampak lanjutan Covid-19 pada ekonomi di 2021.

Atas dasar itu, Jokowi meminta tim kabinetnya menghitung secara cermat potensi, peluang, dan berbagai risiko yang ada, baik domestik maupun global. Dia juga mengingatkan agar pemerintah fokus menjalankan reformasi struktural. Menurut Jokowi, reformasi struktural merupakan misi besar pemerintah saat ini. Reformasi untuk percepatan dan pemerataan pembangunan, baik itu reformasi regulasi, reformasi birokrasi, reformasi dalam

peningkatan produktivitas dan transformasi ekonomi. Itu misi besar kita. Pemerintah dalam APBN 2020 mematok target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3%. Adapun, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2019 berada di posisi 5,02%. Dengan pandemi corona, target pertumbuhan diperkirakan meleset. Kita harus bicara apa adanya, target pembangunan dan pertumbuhan ekonomi akan terkoreksi cukup tajam. Dia meminta jajarannya menyiapkan diri dengan berbagai skenario. Indonesia, katanya, harus tetap berikhtiar untuk melakukan pemulihan, baik di bidang kesehatan maupun ekonomi.

Kementerian Keuangan merilis skenario pertumbuhan ekonomi 2020 dalam paparannya yang berjudul Pandemi Covid-19, Perkembangan Ekonomi dan Langkah Kebijakan Fiskal. Meskipun melambat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pemerintah masih optimistis ekonomi tumbuh positif di tengah kondisi pandemi virus corona (Covid-19). Ekonomi Indonesia 2020 diproyeksikan tumbuh 2,3%. Covid-19 awalnya dilaporkan pada akhir Desember 2019 oleh Tiongkok. Tiongkok merupakan mitra dagang Indonesia terbesar. Sementara di Indonesia melaporkan kasus pertama corona pada 2 Maret 2020. Pemerintah optimistis pada kuartal I 2020, ekonomi Indonesia masih tumbuh hingga 4,7%. Pada kuartal II 2020 turun hingga menjadi 1,1%. Di kuartal IV 2020, mulai bangkit kembali menjadi 2,4%.

D. Dampak Covid-19 Bisa Ganggu Agenda Pembangunan

Pengamat ekonomi dari Indonesian Development of Economy and Finance (Indef) Dradjad Wibowo meminta pemerintah bersungguh-sungguh menanggulangi penyebaran covid-19. Sebab, pengaruh pandemi tersebut amat besar bagi laju pertumbuhan perekonomian nasional. Wabah covid-19 ini bukan hanya terjadi di Indonesia dan Tiongkok, tapi juga di seluruh dunia. Semakin lama dan luas wabah covid-19 menular, semakin berdampak negatif bagi perekonomian nasional, semakin banyak pula orang yang kehilangan pekerjaan dan mata pencaharian. Dampak

yang ada di depan akibat pandemi ini adalah menurunnya penerimaan keuangan negara. Hal ini akan mengganggu agenda pembangunan, belanja negara, serta belanja pegawai di samping banyaknya perusahaan swasta yang merumahkan karyawannya. Ujung-ujungnya, angka pengangguran makin meroket. Karena itu pemerintah harus membuat stimulus perekonomian yang tepat. Sektor industri yang masih bagus dan beroperasi serta memberikan penghasilan keuangan dan menyerap tenaga kerja harus terus dioptimalkan dan dilindungi. Salah satu industri yang menyerap tenaga kerja banyak dan mampu menggerakkan ekonomi sektor riil adalah industri hasil tembakau. Sektor industri ini juga dinilai dapat memberikan pemasukan keuangan bagi negara lewat cukai dan pajak-pajak lainnya.

Dalam rangka penyelamatan ekonomi, pemerintah harus menjunjung asas keadilan dengan tidak membedakan pemberian bantuan dan perlindungan demi menangkal covid-19. Jika pemerintah memberikan bantuan pada sektor industri lainnya, maka industri rokok perlu mendapat perlindungan dan perhatian pemerintah pula. Saya rasa industri rokok akan terkena dampak negatif (covid-19) karena sangat padat karya. Jadi saya rasa untuk fair-nya, kalau industri lain itu dibantu, industri rokok juga dibantu. Jangan industri rokok ini dipukuli terus. Di sisi lain, Indef pada beberapa waktu lalu telah membuat proyeksi pertumbuhan ekonomi hingga dua persen untuk skenario wabah yang minimal. Bila skenario wabahnya lebih besar seperti di Italia, pertumbuhan ekonomi bisa mencapai angka minus.

Ini sudah terbukti dengan Tiongkok yang mengalami pertumbuhan minus. Jadi dampaknya akan sangat besar sekali. Lebih lanjut Ketua Dewan Pakar Pengurus Pusat Partai Amanat Nasional (PAN) ini menyampaikan, jika pertumbuhan ekonomi RI minus hanya sesaat, maka efeknya tidak terlalu banyak. Hanya menyerang secara psikologis. Tapi kalau minus pertumbuhan ekonominya dalam jangka panjang, satu

hingga dua bulan akan membahayakan perekonomian nasional kita.

E. COVID-19 dan pembangunan infrastruktur

Ekonomi Indonesia dihantui berbagai “jurang infrastruktur”. Banyak tempat hanya memiliki infrastruktur fisik dan digital di bawah standar atau bahkan tidak sama sekali, biasanya karena kurangnya investasi. Misalnya, banyak rumah sakit dan puskesmas di daerah-daerah tertinggal yang masih belum memiliki pasokan air bersih dan listrik selama 24 jam sehari. Pertumbuhan, industrialisasi, dan urbanisasi Indonesia yang cepat selama 20 tahun terakhir menyebabkan kebutuhan infrastruktur-infrastruktur tersebut pun meningkat. Berbagai lapis pemerintahan di Indonesia selama beberapa periode kesulitan membangun infrastruktur sesuai dengan laju tersebut. Hal ini mengakibatkan pertumbuhan ekonomi dalam negeri dan integrasi perdagangan dengan kawasan Indo-Pasifik menjadi tidak maksimal.

Mengestimasi investasi yang diperlukan untuk menutup jurang tersebut bukan hal mudah. Salah satu estimasi yang cukup diterima adalah estimasi dari Bank Dunia yang menyebutkan Indonesia memerlukan investasi sebesar US\$500 miliar untuk fasilitas-fasilitas dasar selama lima tahun ke depan untuk mendukung kesinambungan pertumbuhannya. Rencana pemerintah pusat untuk membangun Ibu Kota baru di Kalimantan Timur menambah sekitar US\$33 miliar ke dalam estimasi tersebut. Mendapatkan anggaran untuk mengurangi jurang infrastruktur tersebut menjadi semakin sukar seiring tekanan ekonomi dan finansial yang dirasakan akibat pandemi COVID-19. Ini jelas akan berdampak pada pembangunan infrastruktur. Anggaran belanja untuk infrastruktur tahun ini sekitar US\$29 miliar. Sebesar 40% dari total anggaran, atau sekitar US\$164,8 miliar dari total investasi US\$412 miliar untuk proyek-proyek infrastruktur antara tahun 2020 hingga 2024 akan didanai langsung oleh pemerintah. Sisa pendanaan akan berasal dari BUMN

(25%) dan swasta (35%). Pandemi ini akan membuat pemerintah mengalihkan dana tersebut, sementara sumber pendanaan lain akan kehilangan uangnya akibat resesi yang akan menyusul.

F. Tantangan dalam pembangunan infrastruktur

Perth USAsia Centre telah mengembangkan Peta Infrastruktur Indonesia untuk membantu menggambarkan tantangan infrastruktur yang dihadapi Indonesia. Peta tersebut juga mengidentifikasi proyek-proyek utama di Indonesia per sektor. Ada 206 proyek infrastruktur sejauh ini dan akan terus diperbarui seiring dengan perkembangan di lapangan. Peta tersebut menunjukkan Indonesia memiliki tantangan konektivitas yang unik dan tidak seperti negara lain dengan status ekonomi dan populasi yang serupa. Satu tantangan yang tak terpisahkan dari geografinya sebagai negara kepulauan: 17.000 pulau tidak terhubung dengan baik antara satu sama lain. Anda dapat melihatnya pada persebaran proyek tersebut dalam peta yang dimaksud di atas. Kebanyakan proyek berada di kawasan padat penduduk di barat – Sumatera dan Jawa. Menurut Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), Jawa dan Sumatera memiliki 154 proyek sementara wilayah lainnya hanya memiliki total 79 proyek.

Sebagai perbandingan, Indonesia timur tidak begitu dilirik oleh proyek infrastruktur baru. Di Provinsi Papua dan Papua Barat, nyaris tidak ada proyek baru. Di pulau-pulau besarnya, bahkan pusat-pusat ekonominya tidak terhubung dengan baik. Misalnya, belum ada jaringan kereta api cepat atau semi cepat (baru ada kereta konvensional dengan waktu tempuh 9 jam) yang menghubungkan dua kota terbesarnya – Jakarta dan Surabaya. Kurangnya infrastruktur utama bisa juga disebabkan oleh kebijakan seperti subsidi BBM. Kebijakan tersebut memakan sekitar US\$9 miliar per tahun dari APBN. Subsidi tersebut juga mengubah pasar, mengakibatkan posisi rupiah menjadi rawan dan mendukung ketergantungan pada kendaraan bermotor.

Rencana Ibu Kota baru dapat dilihat sebagai upaya untuk membangun sebuah pusat ekonomi baru di luar Sumatera dan Jawa. Di sekitar kawasan Ibu Kota baru terdapat pengerjaan beberapa proyek infrastruktur. Jalan tol Balikpapan-Samarinda sudah hampir selesai dan Presiden Jokowi sendiri mengatakan bahwa jalan tol tersebut akan terhubung dengan Ibu Kota baru. Selain tantangan geografis, Indonesia saat ini juga harus berhadapan dengan perlambatan ekonomi dan menurunnya pendapatan negara akibat pandemi COVID-19. Respons fiskal pemerintah terdiri atas paket sebesar US\$2 miliar pada tahap pertama disusul dengan paket rangsangan sebesar US\$26 miliar. Hal ini dapat tercapai karena adanya realokasi dana dari proyek-proyek yang seharusnya dikerjakan saat ini, tapi dana tersebut akan semakin langka seiring dengan menyusutnya pendapatan negara akibat pelambatan ekonomi. Pemerintah telah menaikkan batas defisitnya menjadi 5% agar dapat meminjam lebih banyak dana untuk keadaan darurat ini.

Pinjaman asing juga akan menipis. Pertanyaan terkait seberapa berkesinambungkah pinjaman asing sejauh ini, termasuk pinjaman dari Cina, harus dijawab. Krisis pasar kredit mulai menunjukkan batang hidungnya. Indonesia sangat rawan terhadap meningkatnya biaya pinjaman. Nilai tukar rupiah telah jatuh, menambah beban pembayaran utang dalam mata uang asing.

G. Kepekaan Pemerintah

Seiring dengan semakin ganasnya krisis ekonomi akibat pandemi menyerang, Indonesia kemungkinan memerlukan uang yang sangat banyak untuk menjalankan paket-paket stimulusnya. Ini akan berdampak pada kemampuan Indonesia untuk membiayai proyek-proyek infrastrukturnya. Namun Indonesia harus melihat pembangunan infrastruktur sebagai bagian dari pemulihannya, karena proyek-proyek tersebut mencetak lapangan kerja, membuka pangsa pasar baru, dan meningkatkan efisiensi. Memanfaatkan jatuhnya harga

minyak untuk memangkas subsidi bahan bakar dan mengalihkannya untuk pemulihan ekonomi dan pembangunan infrastruktur akan menjadi langkah yang tangkas bagi Jokowi. Indonesia harus lebih memanfaatkan dana dari berbagai inisiatif infrastruktur dan konektivitas (I&C) yang telah diluncurkan oleh berbagai negara di Asia-Pasifik sejak 2010. Ini termasuk Inisiatif Sabuk dan Jalan Cina, Kemitraan untuk Infrastruktur Berkualitas (PQI) Jepang, dan Bank Investasi Infrastruktur Asia yang baru-baru ini didirikan. Total dana yang ditawarkan oleh inisiatif-inisiatif tersebut melebihi US\$1 triliun. Namun mengikatkan diri pada inisiatif tersebut juga bermakna ikut terlibat dalam isu geopolitik di baliknya. Pasca-COVID-19, Indonesia harus berhati-hati menimbang peran infrastruktur dalam pemulihan ekonominya.

BAB 10

PERILAKU SOSIAL MASYARAKAT DALAM MASA PANDEMIC COVID 19

A. Wabah Virus COVID – 19 dan Perilaku Sosial Masyarakat

Wabah virus corona kini menjadi realitas sosial yang harus dihadapi masyarakat dunia, khususnya bagi bangsa Indonesia. Tidak dipungkiri bahwa dengan beredarnya kabar virus corona yang telah menjangkiti Indonesia berdampak pada sikap masyarakat yang menjadi lebih over-protektif terhadap lingkungan sekitarnya. Ketakutan terhadap virus corona akan memberikan pengaruh terhadap sikap sosial masing-masing individu. Kita akan lebih mudah menaruh curiga pada orang yang batuk, bersin, atau terlihat pucat di sekitar lingkungan kita. Kita akan lebih cenderung memutuskan menjauh ketimbang menanyakan kabar atau sekadar menunjukkan bentuk kepedulian kecil lainnya. Asumsi-asumsi ini sifatnya memang masih spekulatif, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa ancaman virus corona ini tidak hanya akan merenggut kesehatan seseorang tetapi juga merenggut rasa sosial kita terhadap sesama.

Ketidakmampuan kita dalam mengelola rasa curiga, takut, sikap over-protektif dalam merespons isu corona ini memiliki potensi untuk merusak hubungan sosial dengan individu lain. Apalagi, jika kita hidup dan aktif dalam lingkungan pergaulan di kantor, sekolah, masyarakat, bahkan keluarga. Adalah hal yang manusiawi ketika kita mulai memberikan respons antisipatif dalam melihat situasi. Namun, ada etika sosial yang perlu dijunjung tinggi dan dipelihara agar hubungan dengan sesama tetap terjaga. Sebagai contoh, jika kita tengah mengalami kondisi badan yang kurang fit segera berobat ke dokter. Segera gunakan alat proteksi diri seperti masker jika hendak bersosialisasi

kendati dokter tidak memberi diagnosis positif corona atau penyakit parah lainnya. Selain itu, kita juga perlu memiliki inisiatif untuk mengurangi interaksi bersentuhan dengan orang lain seperti berjabat tangan dan berpelukan.

Hal ini dilakukan sebagai upaya “sadar diri” dan memastikan orang lain aman dan nyaman bersama kita. Lain halnya jika kita dalam kondisi sehat dan menemukan orang di sekitar kita yang terlihat tidak baik-baik saja. Etika sosial kita terhadap mereka bisa ditunjukkan dengan membujuk mereka untuk pergi ke klinik atau rumah sakit terdekat untuk diperiksa, atau sekadar bertanya kabar dan memberikan nasihat secara baik untuk menjaga kesehatan. Tindakan-tindakan sederhana tersebut kita lakukan dengan tetap menjaga kehati-hatian. Hal ini dilakukan sebagai wujud antisipasi kolektif, tindakan melindungi diri dengan memastikan orang-orang di sekitar kita juga terlindungi. Sikap seperti ini adalah cermin dari etika sosial kita terhadap sesama, bahkan dalam kondisi genting sekalipun.

Wabah corona menjadi ketakutan kita bersama. Namun, jangan sampai wabah ini merenggut cara kita memanusiaikan sesama. Selain mengedepankan aspek materiil seperti menjaga perilaku hidup sehat, mengenakan masker, berolahraga rutin, dan asupan bergizi, aspek non materiil juga perlu dipelihara seperti etika sosial kita terhadap sesama yang tercermin dari sikap peduli, saling pengertian, dan aware dengan lingkungan sosial kita. Corona mungkin bisa merenggut nyawa manusia, tetapi ada satu hal yang tidak bisa direnggut olehnya; kemanusiaan. Sebenarnya rasa cemas dan ketakutan pada diri masyarakat atas wabah virus corona adalah hal yang manusiawi. Namun hal ini jika tidak diatasi, secara sosiologis akan menimbulkan disorganisasi dan disfungsi sosial di masyarakat.

Perlu dipahami, ciri otentik dari masyarakat adalah kedinamisan dalam perubahan di tatanan sosialnya saat mendapat stimulus tertentu dalam hal ini rasa takut atas wabah virus corona. Kondisi perubahan ini bersifat interpenden. Artinya, sulit untuk dapat membatasi

perubahan – perubahan pada masyarakat karena masyarakat merupakan mata rantai yang saling terkait. Oleh karena itulah, diorganisasi dan disfungsi sosial menjadi suatu keniscayaan.

Disorganisasi pada masyarakat akan mengarah pada situasi sosial yang tidak menentu. Sehingga dapat berdampak pada tatanan sosial di masyarakat. Wujud nyata berupa prasangka dan diskriminasi. Hal ini bisa kita lihat bagaimana reaksi masyarakat saat ada warga Indonesia positif terjangkit virus corona. Misalnya, ada masyarakat yang mulai membatasi kontak sosialnya untuk tidak menggunakan angkutan umum, transportasi online, dan menghindari berinteraksi di ruang sosial tertentu (seperti pasar dan mall) karena khawatir tertular virus corona. Prasangka masyarakat ini tentu memiliki alasan logis. Sebab dalam perspektif epidemiologi, terjadinya suatu penyakit atau masalah kesehatan tertentu disebabkan karena adanya keterhubungan antara pejamu (host) dalam hal ini manusia atau makhluk hidup lainnya, penyebab (agent) dalam hal ini suatu unsur, organisme hidup, atau kuman infeksius yang dapat menyebabkan terjadinya suatu penyakit, serta lingkungan (environment) dalam hal ini faktor luar dari individu yang dapat berupa lingkungan fisik, biologis, dan sosial. Kondisi keterhubungan antara pejamu, penyebab dan lingkungan adalah suatu kesatuan yang dinamis yang jika terjadi gangguan terhadap keseimbangan hubungan di antaranya, inilah yang akan menimbulkan kondisi sakit. (Kenneth J. Rothman, dkk, dalam buku *modern epidemiology*)

Berawal dari prasangka, akhirnya dapat muncul sikap diskriminasi. Sikap diskriminasi yang paling nyata terjadi berupa kekerasan simbolik. seperti tidak mau menolong orang lain secara kontak fisik langsung dengan orang yang diduga terjangkit virus corona. Selain disorganisasi sosial, disfungsi sosial juga terjadi akibat rasa takut atas wabah virus corona. Disfungsi sosial membuat seseorang atau kelompok masyarakat tertentu tidak mampu menjalankan fungsi sosialnya. individu sebagai makhluk

sosial mulai membatasi kontak sosialnya dengan tidak mau menolong orang yang belum tentu positif terjangkit virus corona.

Disfungsi sosial membuat individu justru mengalami gangguan pada kesehatannya. Dalam perspektif sosiologi kesehatan, kondisi sehat jika secara fisik, mental, spritual maupun sosial dapat membuat individu menjalankan fungsi sosialnya. Jika kondisi sehat ini terganggu – dalam kasus ini terganggu sosialnya. Tentu individu ini dinyatakan sakit. Kondisi sakit di sini sebagaimana yang dikemukakan Talcott Parsons (1951) dalam bukunya “*The Social System*”, bahwa ia tidak setuju dengan dominasi model kesehatan medis dalam menentukan dan mendiagnosa individu itu sakit. Bagi Parsons, sakit bukan hanya kondisi biologis semata, tetapi juga peran sosial yang tidak berfungsi dengan baik. Parsons melihat sakit sebagai bentuk perilaku menyimpang dalam masyarakat. Alasannya karena orang yang sakit tidak dapat memenuhi peran sosialnya secara normal dan karenanya menyimpang dari norma merupakan suatu yang konsensual. Lalu apa wujud kondisi sakit secara sosial ini? Diorganisasi dan disfungsi sosial.

Terjadinya diorganisasi dan disfungsi sosial akan memicu efek bola salju (*snowball effect*) pada sektor kehidupan lainnya. Efek paling nyata adalah bidang ekonomi. Dampak dari diorganisasi dan disfungsi sosial karena wabah virus corona, membuat individu atau kelompok masyarakat mengalami penurunan produktivitas kegiatan ekonominya. Mulai dari kegiatan produksi, hingga kegiatan konsumtif. Penurunan produktivitas kegiatan ekonomi warga negara akan berdampak pada tingkat pertumbuhan ekonomi negara. Maka untuk itu, perlu upaya yang terintegrasi dalam pendekatan penanganan wabah virus corona ini. wabah virus corona yang mempunyai dampak, menciptakan kematian, penyakit, kekurangnyamanan, kurang-puasan, serta kemelaratan.

Dengan dampak yang ditimbulkan oleh wabah Virus ini yang sangat lah serius, Oleh karena itulah untuk

menanggulangi wabah virus corona tidak hanya dilakukan dengan intervensi dibidang kesehatan saja, tetapi harus dilakukan secara terpadu (lintas sektoral), seperti melakukan Intervensi sosial. Intervensi sosial dilakukan sebagai upaya mengantisipasi kondisi masyarakat yang disorganisasi dan disfungsi sosial. Dengan adanya intervensi sosial, diharapkan dapat memperbaiki fungsi sosial atau mencegah individu atau kelompok masyarakat tertentu mengalami disfungsi akibat fenomena wabah virus corona. Intervensi sosial yang dapat dilakukan oleh negara, antara lain: memberikan pelayanan sosial, pelayanan fisik, pelayanan psikososial, pelayanan ketrampilan dalam mencegah agar tidak terjangkit virus corona atau ketrampilan hidup sehat, pelayanan spiritual, pelayanan pendampingan, pelayanan advokasi.

B. Perubahan Perilaku sebagai Respon terhadap Wabah COVID-19

Jumat, 29 Mei 2020 adalah hari yang cukup bersejarah bagi kalangan psikologi di Indonesia dengan diresmikannya logo ulang tahun Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) ke-61 yang berbentuk kupu-kupu dengan slogan Perubahan Perilaku untuk Kenormalan Baru. Slogan tersebut diharapkan dapat menjadi semangat dan penggerak bagi setiap perangkat HIMPSI juga seluruh komponen bangsa dalam melawan penyebaran dan menghadapi dampak wabah COVID-19. Perubahan perilaku atau behavioral changes merupakan bisnis utama psikologi, yaitu dengan cara memahami perilaku melalui asesmen dan mengubah atau memodifikasinya melalui intervensi. Tentunya dalam melakukan asesmen dan intervensi, berdasarkan konsep teoretis sebagai dasar berpikir dan bertindak.

C. Kenormalan Baru

Istilah New Normal mungkin saja sudah dari dulu digunakan untuk menjelaskan fenomena perubahan di dunia. LaBarre tahun 2003 mengulas pendapat Roger

McNamee, bahwa New Normal selalu akan terjadi di sepanjang kehidupan manusia. Oleh karenanya manusia harus secara sabar belajar dan terus beradaptasi untuk mengembangkan respon yang tepat dalam menghadapi tuntutan perubahan yang terjadi. McNamee menambahkan, pengertian “normal” dari new normal berkaitan dengan skala waktu, dimana manusia akan berupaya mengembangkan perilaku yang sesuai untuk membuat kehidupan menjadi lebih baik dalam jangka panjang. Sedangkan pengertian “new” dari new normal erat kaitannya dengan perkembangan teknologi. Hal ini misalnya terlihat dari buku yang ditulis Peter Hinssen, *The New Normal*, yang menggambarkan dampak teknologi digital terhadap perubahan proses dan perilaku bisnis. Rich Miller dan Matthew Benjamin juga menyinggung tentang new normal untuk menjelaskan dampak krisis ekonomi dunia 2007-2008 dan kemudian menjadi populer untuk menjelaskan dampak resesi global dan wabah COVID-19. Di dalam new normal hal-hal yang terkesan tidak normal atau belum menjadi kebiasaan menjadi kenormalan baru akibat situasi-situasi tersebut.

Terlepas dari makna dan asal usul istilah *new normal*, atau kenormalan baru, merupakan keniscayaan bahwa kita sedang mempraktekkan perilaku yang tidak biasa kita lakukan sebelum era COVID-19. Perilaku yang kita praktekkan tersebut tidak hanya berupa respon jangka pendek terhadap wabah COVID-19 tetapi lebih luas lagi merupakan respon adaptif yang berjangka panjang. Apabila mengacu pada konsep new normalnya McNamee, Miller dan Matthew Benjamin, dan Hinssen, konsep new normal yang dirancang pemerintah lebih banyak mencakup perubahan perilaku jangka pendek sebagai respon kedaruratan terhadap wabah COVID-19. Perilaku tersebut berkaitan dengan menjaga jarak fisik, menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, menggunakan hand sanitizer, dan menjaga daya tahan tubuh. Apakah semua perilaku tersebut menjadi sasaran perubahan perilaku dalam rangka kenormalan baru? Tentu saja iya dan penting, tetapi

hanya sebagian kecil, berjangka pendek, dan mungkin bertahan sambil menunggu terbentuknya imunitas dan ditemukannya obat atau vaksin penangkal COVID-19.

Menurut Hongyue dan Rajib, dampak pandemik terhadap perekonomian, sosial, keamanan, serta politik akan mempengaruhi kondisi psikologis dan perubahan perilaku yang sifatnya lebih luas dalam jangka waktu yang lebih panjang. Perubahan perilaku tersebut mencakup perilaku hidup sehat, perilaku menggunakan teknologi, perilaku dalam pendidikan, perilaku menggunakan media sosial, perilaku konsumtif, perilaku kerja, dan perilaku sosial keagamaan.

D. Perubahan Perilaku Hidup Sehat dan Terkait Penggunaan Teknologi (Digital)

Wabah COVID-19 membuat masyarakat lebih sadar tentang rentannya manusia terhadap penyakit. Oleh karenanya perilaku hidup sehat akan menjadi berubah lebih baik, dengan mengkonsumsi makanan sehat secara seimbang, berolah raga dan jam tidur yang teratur, lebih rutin memeriksakan kondisi kesehatan, mencari asuransi kesehatan yang terpercaya, menjaga kebersihan, dan menggunakan alat atau mengkonsumsi suplemen untuk terhindar dari penyakit. Perilaku hidup sehat tidak terbatas pada kesehatan fisik tetapi juga kesehatan mental.

Adapun kelompok masyarakat yang belum sadar tentang pentingnya perilaku hidup sehat secara fisik dan mental, perlu terus didorong dengan kampanye yang misalnya mengkombinasikan gain-loss framed messages, konsep dari Tversky & Kahneman. Prinsipnya, perubahan perilaku dapat terjadi apabila ada keseimbangan informasi yang diberikan terkait keuntungan kalau menjalankan perilaku hidup sehat dan kerugian kalau tidak menjalankannya

Selain perilaku hidup sehat, perilaku masyarakat juga berubah di era COVID-19 dalam penggunaan teknologi, terutama teknologi digital. Teknologi digital untuk komunikasi online, teknologi robot, dan peralatan

teknologi berbasis tanpa sentuhan (non-contact) menjadi sama pentingnya dengan listrik, air, dan bahkan oksigen. Penggunaan teknologi yang tadinya lebih banyak sebagai pendukung kerja sekunder atau malah rekreasi, berubah menjadi fasilitas kerja utama. Dalam sektor pendidikan misalnya, pengajar dan peserta didik akan lebih banyak menggunakan mesin pencari dan Massive Open Online Courses (MOOC) seperti Udemy, Coursera, Ruang Guru. Pengajar dan peserta didik juga akan terbiasa melakukan interaksi pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan fasilitas seperti Google Meet, Microsoft Teams, Cisco Webex, Zoom, google classroom, WAG, dan email.

Setelah wabah COVID-19 berakhir, blended learning atau kombinasi antara pembelajaran tatap muka dan online akan berkembang lebih pesat dari kondisi sebelumnya, yang mungkin membuat biaya pendidikan menjadi lebih terjangkau sehingga pendidikan dapat dinikmati oleh kalangan yang lebih luas. Pemberitaan tentang COVID-19 begitu masif baik di media *mainstream* maupun di media sosial. Informasi yang belum tentu kebenarannya tersebar sedemikian banyaknya karena orang-orang cenderung menyebarkan informasi tanpa mempertimbangkan akurasi. Menurut Pennycook dan kawan-kawan, hal ini terutama terjadi pada orang-orang yang kurang memiliki kemampuan berpikir kritis dan kurang berpendidikan.

Eksperimen Pennycook dan kawan-kawan menunjukkan penyebaran informasi yang bias tersebut dapat diatasi hanya dengan mengingatkan (*nudging*) orang untuk mempertimbangkan dahulu keakuratan informasi yang akan disebar. Masyarakat dilatih menjadi kritis dengan terus mengingatkan mereka untuk senantiasa mempertimbangkan keakuratan informasi. Sumber informasi yang tidak jelas, klaim yang berlebihan dan tidak logis, menyalahkan pihak tertentu, adanya ajakan untuk menyebarkan, dan kata-kata yang tidak konsisten, menurut Sellors merupakan indikasi-indikasi informasi yang tidak akurat.

E. Perilaku Konsumen, Perilaku Kerja, dan Perilaku Sosial

Menurut Kotler, wabah COVID-19 akan membuat masyarakat mengadopsi perilaku anti konsumerisme. Mereka akan memilih hidup lebih sederhana (Life Simplifiers), dengan hanya membeli barang-barang yang dibutuhkan dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan. Masyarakat juga akan mulai mendukung gerakan degrowth, yang memandang konsumsi penduduk dalam berbagai sektor sudah lebih besar dari yang bisa disediakan oleh bumi. Selain mempertimbangkan untuk menjadi vegetarian, masyarakat juga akan lebih ramah lingkungan dan sebisa mungkin mendaur ulang atau memperbaiki atau mendekorasi ulang atau mendonasikan barang-barang atau makanan yang masih layak.

Sebagai konsekuensi lanjutannya, keberhasilan suatu bangsa tidak lagi hanya diukur dari Growth Domestic Product (GDP) tetapi juga Growth Domestic Happiness (GDH) atau Growth Domestic Well-being (GDW). COVID-19 berdampak signifikan terhadap dunia usaha sehingga karyawan diberhentikan/dirumahkan atau bekerja dari rumah. Yang pasti mereka akan membutuhkan penyesuaian perilaku bahkan sekalipun mereka mendapatkan kembali pekerjaan mereka dan beraktivitas seperti biasa. Selama bekerja mereka harus tetap patuh dan menjalankan perilaku sesuai protokol Kesehatan. Karyawan yang berada pada kelompok middle income ke atas biasanya melakukan saving sebelum dan selama masa pandemik. Apabila kelompok ini kehilangan pekerjaan, mereka akan mencari peluang untuk pengembangan diri, misalnya dengan ikut kursus/pelatihan, mendapatkan brevet dan sertifikasi, atau bahkan melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Yang jadi masalah adalah sekelompok orang yang sama sekali tidak lagi menerima gaji dan saving (tabungan) mulai menipis atau bahkan habis.

Satu hal yang pasti, selalu ada jalan untuk semua masalah, asal mau berusaha dan tidak menjaga gengsi.

Kelompok ini akan berusaha melakukan sesuatu untuk setidaknya memenuhi kebutuhan pokok. Perilaku entrepreneurial (kewirausahaan) berkembang lebih banyak di masyarakat. Mereka secara kreatif menjual berbagai jenis barang atau jasa yang memang dibutuhkan orang lain. Banyak yang menawarkan sayuran, buah-buahan, dan bahan pokok lainnya, serta jasa pengantaran, bahkan jasa wisata virtual. Ini hanya segelintir dari banyak perilaku inovatif yang tiba-tiba muncul selama wabah COVID-19.

Perilaku menolong, seperti memberikan pinjaman lunak dan donasi juga sumbangan lainnya cukup berkembang di masyarakat selama wabah COVID-19. Tidak hanya pada kalangan menengah ke atas, tetapi masyarakat biasa juga menyadari pentingnya menolong sesama, misalnya menyediakan makanan gratis atau bahan-bahan pokok lainnya. Perilaku sosial lainnya juga berkembang, seperti kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan keseimbangan antara kerja dengan kehidupan sosial dan keluarga akan menjadi kebiasaan baru.

Masyarakat akan memberikan nilai yang lebih tentang pentingnya kehidupan berkeluarga, berteman, dan komunitas. Wabah COVID-19 juga menggugah kesadaran akan kerentanan kehidupan manusia secara keseluruhan sehingga perilaku beragama dan spiritualitas menjadi lebih berkualitas. Masyarakat menjadi lebih sadar tentang makna ritual keagamaan dan kaitannya dengan kematangan spiritual dengan memandangnya sebagai proses mencari sesuatu yang lebih utama dan bermakna.

F. Tantangan ke Depan

Berdasarkan paparan di atas dapat dilihat bahwa wabah COVID-19 tidak hanya memberikan dampak negatif tetapi juga mengindikasikan dampak positif terhadap perubahan perilaku. Dalam jangka pendek untuk menghadapi ancaman COVID-19, protokol kesehatan dan kebijakan pemerintah menjadi panduan untuk berperilaku. Sedangkan untuk jangka panjang justru banyak perilaku yang terbentuk secara konstruktif yang membuat kehidupan

manusia ke depan akan lebih baik. Perilaku yang diharapkan antara lain seperti yang sudah disebutkan di atas berkaitan dengan perilaku hidup sehat, penggunaan teknologi, kebiasaan baru di sektor Pendidikan, perilaku dalam media sosial, perilaku kerja, perilaku konsumen, dan perilaku sosial keagamaan akan berubah menjadi lebih baik dan efisien. Perubahan perilaku untuk kenormalan baru, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, perlu di pelihara, dikembangkan, dan dimodifikasi.

Terdapat sembilan upaya yang dapat dilakukan untuk merancang dan mengevaluasi perubahan perilaku, menurut Michie dan kawan-kawannya, yaitu edukasi, persuasi, insentif, penerapan aturan, pelatihan, pembatasan, restrukturisasi lingkungan, modeling, dan pemberdayaan. Kesembilan upaya tersebut dapat digunakan oleh kalangan psikologi, baik sebagai individu maupun organisasi, serta pemerintah untuk menimbang intervensi yang paling sesuai dalam rangka perubahan perilaku untuk kenormalan baru sebagai dampak dari wabah COVID-19.

G. Perubahan Perilaku Masyarakat Kelas Atas dan Kelas Bawah Dalam Menghadapi COVID-19: Class Solidarity dan Potensinya Bagi Indonesia

Pandemik *COVID-19* (juga disebut sebagai *Wuhan Flu* dan *Coronavirus*) merupakan wabah global yang menjamuri kurang lebih 209 negara, dengan total infeksi selama artikel ini ditulis yang mencapai lebih dari 640.000 orang. Pandemi ini terbukti efektif dalam menghentikan perkembangan dan arus globalisasi, dengan berbagai kota dan negara (seperti *New York* dan Italia) memberlakukan *shutdown/quarantine* dan mewajibkan karantina atau jam malam kepada warga-warganya. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Indonesia telah beberapa kali mengeluarkan *statement* di fase-fase awal pandemi *COVID-19*, terutama di bulan Januari dan Februari 2020, bahwa Indonesia aman dan tidak mungkin terkena pandemi. Tentu, hal tersebut menjadi sebuah ironi tersendiri ketika Indonesia “mengalami” kasus pertamanya di awal Maret 2020, dan

infeksi terus menyebar hingga mencapai 5000-an kasus pada 16 April 2020.

Bagaimana dengan respon pemerintah dalam menghadapi pandemik ini? Apakah sudah mencukupi dengan pemberlakuan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) di daerah Jabodetabek (yang merupakan *epicenter COVID 19* di Indonesia)? Walaupun sudah diberlakukan (dan sejak artikel ini ditulis, di-*enforce* oleh pemerintah), terjadi semacam tindakan *non-compliance* dari masyarakat umum Indonesia dalam bentuk tidak menaati PSBB yang telah ditetapkan dan tetap bersosialisasi meskipun hal tersebut sebenarnya berbahaya bagi mereka. Melihat ini, penulis merasa perlu menerapkan pendekatan behavioralis dalam melihat sisi perilaku masyarakat Indonesia yang sulit berubah ketika menghadapi dengan kondisi baru. Sebelum melihat ke dalam situ, penulis merasa bahwa lebih tepat untuk menjelaskan apa yang dimaksud dari pendekatan behavioralis. Dikutip dari John Guy (salah seorang *proponents* dari pendekatan ini), behavioralis merupakan pendekatan yang melihat bahwa perilaku (atau *behavior*) dalam masyarakat adalah hasil dari pola dan sejarah yang terkait dengan masyarakat tersebut[4]. Dalam arti ini, pola membentuk perilaku dari masyarakat, terutama apabila terdapat dukungan dari pemerintah dalam mempromosikan perilaku tertentu ini.

Perilaku yang harus diubah adalah kebiasaan (atau *folkways*) masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan untuk berkumpul, bersosialisasi, dan bercengkerama dalam sebuah tatanan sosial yang cenderung berupa keramaian (seperti pasar, hajatan, dan kondangan). Kebiasaan ini harus diubah dalam arti melakukan hal tersebut tetapi secara daring (*online meeting*, *online shopping*, dan *online events*). Perilaku yang harus diubah juga adalah pemberian jarak antar orang sekitar 1 meter atau lebih. Hal ini agar membantu mengurangi kemungkinan terjadinya infeksi antar orang. Walaupun begitu, diperlukan waktu agar masyarakat dapat menyesuaikan diri terhadap perubahan-

perubahan ini, yang dapat dipercepat apabila terdapat insentif dari pemerintah.

Insentif dari pemerintah ini dapat berupa *advertisement*, bantuan langsung tunai (BLT) kepada pekerja yang terdampak, dan pemberian sosialisasi dan wawasan terhadap masyarakat luas, terutama mereka yang berada di dalam zona merah Infeksi *COVID-19*. Perubahan perilaku masyarakat umum tersebut juga tentu akan membantu menyelamatkan nyawa dari mereka yang terancam terinfeksi dan tentunya, sesuai dengan inisiatif dari berbagai negara di dunia, *flatten the curve* (mengurangi jumlah infeksi sehingga total orang sakit berada di dalam kemampuan sistem kesehatan negara) sehingga mengurangi beban di rumah sakit (akibat keterbatasan *beds* dan *ventilator* dalam setiap Rumah Sakit) dan menyelamatkan nyawa.

Namun, melihat bahwa argumen sebelumnya cenderung mengarah ke masyarakat kelas menengah ke bawah yang perlu mengubah perilakunya, hal ini tentulah kurang atau bahkan tidak mencukupi dalam rangka menghadapi pandemik; masyarakat kelas atas dan *elit* tentu juga harus merubah perilakunya. Dalam hal ini, penulis mengutip *Class Solidarity* (yang merupakan lawan dari *Class Conflict*-nya Marx) sebagai bentuk perlawanan universal masyarakat dari berbagai kelas. *Class Solidarity* merupakan konsep dimana muncul kesadaran antar kelas untuk saling membantu dalam menghadapi *common enemy*, dimana di dalamnya muncul pengorbanan dan solidaritas antar kelas dalam mencapai tujuan tersebut. Konsep ini lebih menggunakan contoh dari *Battle of Britain* (1940), ketika masyarakat kelas atas berbaur dengan kelas bawah untuk bersembunyi dari serangan Angkatan Udara Jerman. Mengapa diperlukan *Class Solidarity* di Indonesia? Cenderung (atau mungkin *personal bias* dari penulis) kelas atas Indonesia, selama musim pandemik ini, bertindak tidak peduli terhadap pandemik yang tengah menyerang penduduk Indonesia. Entah itu korporasi, perusahaan, sosialita, dan elit-elit lainnya, sedikit menganggap serius

infeksi *COVID-19*. Sebagai contoh, berbagai perusahaan (terutama yang terkenal dengan perusahaan *sweatshops* atau pekerja kasar) tidak menerapkan *WFH* (atau *Work From Home*) dengan alasan hal tersebut mengganggu “produktivitas” walaupun berisiko terkena infeksi.

Seharusnya, mereka, para pemilik modal dan perusahaan, mempunyai *CSR* (*Corporate Social Responsibility*) untuk menangani keamanan pekerjaannya dan bertanggung-jawab terhadap lingkungan di sekitarnya. Dengan menerapkan pekerjaan secara langsung, memaksa pekerja untuk terus datang di tengah musim infeksi, melepas tangan ketika memang beberapa pekerja tersebut terinfeksi *COVID-19*, sementara petinggi-petingginya menikmati *WFH* dari rumah dan tidak terkena resiko tertular penyakit infeksius tersebut. Idealnya, *Class Solidarity* ini dapat diwujudkan dengan perubahan perilaku kelas atas terhadap situasi *COVID-19* di Indonesia. Perubahan perilaku ini adalah seperti dengan pemberian bantuan, aktivitas-aktivitas *philanthropic*[9] seperti donasi pembelian APD (Alat Pelindung Diri) Rumah Sakit, meminimalisir jam kerja buruh untuk mengurangi keramaian, dan pemberian sedikit tunjangan bagi pekerja yang berada di zona merah infeksi untuk membantu kehidupan mereka (secara *general*, merefleksikan kepedulian elit terhadap *COVID-19*). Walaupun begitu, argumen terhadap perilaku ideal ini adalah berkurangnya insentif perusahaan, penurunan omzet perusahaan, dan berkurangnya *yearly income* yang berdampak pada pertumbuhan perusahaan tersebut. Akan tetapi, perlu disadari bahwa terdapat beban moral yang bukan *capital* dalam menghadapi krisis, dan ini adalah salah satu momen tersebut. Sehingga, kelas atas harus mengerti bahwa sudah menjadi tugas mereka untuk membantu menopang kehidupan kelas bawah sebagai bentuk tanggung jawab dan bukan hanya menjadi beban negara.

Penulis melihat bahwa sebenarnya terdapat kesempatan buat *improvement* bagi Republik Indonesia pasca situasi *COVID-19*. Paralel dengan apa yang terjadi di

Inggris sebelumnya di tahun 1940, masa krisis ini dapat dijadikan Indonesia sebagai tahap dalam mewujudkan *Class Solidarity* dan bukan *Class Conflict* melalui perubahan perilaku masyarakat umum dan kelas atas. Keberadaan *Class Solidarity* ini sangat menguntungkan karena dapat membawa Indonesia selangkah lebih maju secara stabilitas politik (mengurangi kemungkinan terjadinya *Class Conflict* di masa depan). Pada akhirnya, kita harus yakin bahwa Indonesia dapat keluar dari masa *COVID-19* lebih baik dibandingkan sebelum masa *COVID-19*, dengan stabilitas politik yang lebih terkendali dan “kepekaan” elit yang meningkat terhadap situasi masyarakat umum.

H. Perilaku dan Persepsi Masyarakat Menghadapi Pandemi Covid-19

Isu terkini dan menggemparkan selalu mendapatkan perhatian publik dengan beragam reaksi persepsi dan tingkah lakunya, termasuk dengan isu wabah virus corona atau Covid-19 ini. Pada awal tahun 2020 ini dunia dikejutkan dengan wabah virus corona atau Covid-19 yang menginfeksi hampir seluruh negara di dunia. Semenjak Januari 2020, WHO telah menyatakan dunia masuk ke dalam darurat global terkait virus ini. Ini merupakan fenomena luar biasa yang terjadi di bumi pada abad ke 21, yang skalanya mungkin dapat disamakan dengan Perang Dunia II. Hal ini bisa dilihat dari event-event skala besar, seperti pertandingan-pertandingan olahraga internasional hampir seluruhnya ditunda bahkan dibatalkan. Kondisi ini pernah terjadi hanya pada saat terjadi perang dunia saja, tidak pernah ada situasi lainnya yang dapat membatalkan acara-acara tersebut.

Khusus di Indonesia sendiri Pemerintah telah mengeluarkan status darurat bencana terhitung mulai tanggal 29 Februari 2020 hingga 29 Mei 2020 terkait pandemi virus Covid-19 ini dengan jumlah waktu 91 hari. Langkah-langkah telah dilakukan oleh pemerintah untuk dapat menyelesaikan kasus luar biasa ini, salah satunya

adalah dengan mensosialisasikan gerakan *Social Distancing*. Konsep ini menjelaskan bahwa untuk dapat mengurangi bahkan memutus mata rantai infeksi Covid-19, seseorang harus menjaga jarak aman dengan manusia lainnya minimal 2 meter, dan tidak melakukan kontak langsung dengan orang lain, serta menghindari pertemuan massal.

Tetapi banyak masyarakat yang tidak menyikapi hal ini dengan baik, seperti contohnya pemerintah sudah meliburkan para siswa dan mahasiswa untuk tidak berkuliah atau bersekolah ataupun memberlakukan bekerja dari rumah, namun kondisi ini malah dimanfaatkan oleh banyak masyarakat untuk berlibur. Selain itu, walaupun Indonesia sudah dalam keadaan darurat masih saja akan dilaksanakan tabligh akbar, dimana akan berkumpul ribuan orang di satu tempat, yang jelas dapat menjadi mediator terbaik bagi penyebaran virus corona dalam skala yang jauh lebih besar. Selain itu masih banyak juga masyarakat Indonesia yang menganggap enteng virus ini, dengan tidak mengindahkan himbauan-himbauan pemerintah.

Yang harus dipikirkan dan disadari bersama sekarang ini adalah resiko tingkat mortalitas (kematian) akibat hadirnya faktor-faktor penghambat penanganan wabah ini. Salah satu faktor yang dapat memperlambat, bahkan memperburuk penanganan persebaran Covid-19 adalah anakronisme perspektif yang beredar luas di masyarakat. Yang dimaksud anakronisme perspektif di sini adalah cara pandang yang kurang tepat dalam menyikapi dan merespons persebaran virus ini, yang pada gilirannya turut menghambat penanganan pandemi Covid-19 ini.

Di antara sekian banyak anakronisme perspektif yang beredar di masyarakat, sekurangnya ada dua contoh yang paling mencolok. Pertama, anakronisme sosial-budaya. Sebagaimana dimaklumi, masyarakat kita dicirikan oleh budaya komunitarian-komunalistik dalam sebuah unit sosial yang saling berjejaring. Masyarakat kita dikenal memiliki ikatan sosiologis yang kuat melalui pola hidup gotong-royong sebagai bentuk kepedulian dan empati sosial

kita kepada sesama. Ikatan sosiologis tersebut seringkali dimanifestasikan melalui sentuhan fisik seperti bersalaman, berpelukan, cium pipi, dan semacamnya.

Menghentikan, setidaknya untuk sementara waktu saja manifestasi komunitarian tersebut demi mencegah persebaran Covid-19 tentu saja bukan persoalan mudah bagi masyarakat kita. Tentu saja ada perasaan ganjil, kikuk, dan tidak lazim ketika harus mengabaikan “ritual sosial” sebagaimana biasanya. Pasti ada sesuatu yang hilang ketika masyarakat kita dipaksa menanggalkan kebiasaan sosial tersebut karena ada kontradiksi kognitif antara nalar kesehatan seperti menjaga jarak sosial (*social distancing*) dengan nalar komunitarian tersebut, yaitu kebiasaan bersosialisasi.

Pengabaian terhadap norma-norma sosial di atas tentu saja dapat menimbulkan gangguan sosial-budaya karena norma-norma tersebut telanjur membentuk gugusan kebermaknaan eksistensial di kalangan masyarakat kita. Dari sinilah sebagian masyarakat kita cenderung mengacuhkan protokol medis pencegahan Covid-19 sebagaimana dikeluarkan oleh lembaga-lembaga otoritatif. Bagi sebagian mereka, protokol medis dimaknai sebagai upaya mereduksi kebermaknaan sosial yang telah menancap kuat di masyarakat.

Anakronisme kedua adalah konstruksi pemahaman keagamaan masyarakat kita yang berlawanan dengan protokol pencegahan Covid-19. Melalui beragam media sosial, kita disuguhi berbagai macam narasi keagamaan yang mengacuhkan, mereduksi, bahkan “melawan” protokol medis pencegahan Covid-19. Diantara narasi keagamaan yang cukup populer di masyarakat adalah menyangkut teologi kematian sebagai hak prerogatif Tuhan, pandemi Covid-19 sebagai adzab (hukuman) Tuhan atas dosa-dosa manusia, tidak perlu takut kepada siapapun termasuk kepada Covid-19, kecuali hanya kepada Tuhan. *Social distancing* merupakan strategi mendangkalkan iman, dan seterusnya. Padahal jika kita bisa berpikir lebih bijak, memang kematian hak prerogatif Tuhan, ajal sudah

ditakdirkan oleh-Nya, tetapi untuk menyikapi pandemi Covid-19 ini, kita sebagai manusia juga harus berusaha agar tidak terjangkit virus Covid-19 ini dengan tetap menjaga kesehatan sesuai protokol medis pencegahan Covid-19.

Jika dibiarkan, dua contoh anakronisme perspektif di atas menjadi penghambat penanganan persebaran pandemi Covid-19 yang pergerakannya semakin liar, masif, dan eksponensial. Wajar saja jika tingkat mortalitas akibat persebaran virus ini di Indonesia termasuk yang tertinggi di Asia Tenggara (8,46%) akibat “kengototan” sikap-sikap non-ilmiah tersebut. Sikap semacam ini telanjur menciptakan zona nyaman bagi mereka yang tidak terbiasa dengan pola hidup disiplin dan taat-asas (*compliance*), dua syarat utama untuk mempercepat penanganan Covid-19.

Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah kerendahhatian dari seluruh elemen masyarakat untuk menyerahkan penanganan pandemi Covid-19 kepada pihak-pihak yang memiliki otoritas terkait seperti WHO, Kemenkes dan Pemerintah (via Satgas Pencegahan Covid-19). Selebihnya, lembaga-lembaga non-otoritatif harus “tahu diri” untuk tidak mengintervensi lembaga-lembaga otoritatif dan memperburuk situasi. Ada sebuah ungkapan populer, jika Anda tidak dapat membantu menyelesaikan masalah maka jangan menjadi bagian dari masalah tersebut. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat tidak membebani negara dalam penanganan Covid-19. Sekali lagi, jika tidak bisa menjadi solusi, maka kita jangan menjadi bagian dari persoalan itu sendiri. Mari bersama-sama kita berpikir cerdas, bersikap bijak dan menyelaraskan persepsi untuk mendukung langkah Pemerintah dalam menghadapi dan menangani Covid-19 ini.

Menganalisa Masalah Sosial Ekonomi Masyarakat Terdampak Covid-19

Sejak kasus Covid-19 meningkat di Indonesia, berbagai permasalahan sosial dan ekonomi muncul di tengah masyarakat. Tak dapat dipungkiri jika Covid-19 telah hampir melumpuhkan kondisi sosial ekonomi masyarakat Indonesia, khususnya di beberapa daerah dengan tingkat penyebaran tertinggi seperti Jabodetabek. Per tanggal 1 April 2020, total jumlah pasien positif Covid-19 di Indonesia menjadi sebanyak 1.677 orang. Dari 1.677 kasus positif Covid-19 tersebut, 1.417 pasien saat ini menjalani perawatan dan 103 pasien dinyatakan berhasil sembuh dari penyakit Covid-19 (Tirto, 1 April 2020). Sementara itu, WNI di luar negeri juga sudah terdampak Corona dengan jumlah korban sebanyak 133 WNI yang positif terinfeksi Covid-19 (Tirto, 31 Maret 2020).

Akibat kasus Corona ini, pemerintah Indonesia mulai melakukan berbagai kebijakan seperti mengeluarkan himbauan *social distancing*, mengeluarkan himbauan untuk *Work From Home* bagi pegawai, memberlakukan pembatasan wilayah, membangun RS khusus untuk penanganan Covid-19, dan lain-lain. Dengan adanya kebijakan pemerintah ini serta situasi yang semakin genting, tentunya memberikan dampak bagi masyarakat, baik masyarakat menengah ke bawah hingga kalangan elit. Berbagai masalah sosial ekonomi muncul dan dampaknya langsung terasa oleh masyarakat.

Masalah sosial sendiri merupakan suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial atau menghambat terpenuhinya keinginan-keinginan pokok warga kelompok sosial tersebut sehingga menyebabkan kepincangan ikatan sosial (Soekanto, 2013). Masalah sosial timbul dari kekurangan-kekurangan dalam diri manusia atau kelompok sosial yang bersumber pada faktor-faktor ekonomis, biologis, biopsikologis, dan kebudayaan. Semakin hari permasalahan sosial ekonomi yang ditimbulkan akibat Covid-19 semakin terlihat nyata bagi masyarakat. Beberapa masalah sosial ekonomi yang terjadi akibat Covid-19 diantaranya :

1. Kelangkaan Barang

Sejak jumlah korban Covid-19 terus meningkat di Indonesia, beberapa barang menjadi langka di pasaran. Bukan hanya langka namun barang tersebut dijual berkali-kali lipat dari harga semula sebelum adanya kasus Corona di Indonesia. Beberapa barang yang menjadi langka seperti masker, handsanitizer, cairan pembunuh kuman, dan APD. Barang-barang tersebut kini dijual dengan harga yang jauh lebih mahal dibandingkan harga semula. Hal ini sesuai dengan hukum ekonomi dimana ketika permintaan meningkat namun barang semakin menipis, maka harga akan semakin meningkat. Bahkan masyarakat dengan kondisi ekonomi menengah keatas ada kecenderungan memborong barang-barang tersebut sehingga adanya penumpukan barang namun bagi masyarakat menengah ke bawah justru tidak bisa mendapatkannya.

Bukan hanya terjadi pada alat-alat pelindung diri, masyarakat juga berbondong-bondong membeli barang-barang kebutuhan pokok dengan jumlah banyak, seiring dengan adanya isu *lockdown* di Indonesia. Penimbunan barang akibat terjadi sesuatu yang darurat ini disebut dengan *panic buying*. Direktur Eksekutif *Institute for Development of Economics and Finance* (INDEF) Enny Sri Hartanti mengatakan bahwa perilaku *panic buying* disebabkan oleh faktor psikologis terjadi akibat informasi tidak sempurna atau menyeluruh yang diterima oleh masyarakat (Tirto, 25 Maret 2020). Kurangnya informasi tersebut menyebabkan masyarakat panik sehingga merespon dengan belanja secara masif dalam upaya penyelamatan diri. Kekhawatiran yang dirasakan oleh masyarakat yaitu khawatir harga naik jika tidak segera belanja dan khawatir barang akan segera habis.

2. Disorganisasi dan disfungsi sosial

Jika mengamati berita yang beredar belakangan ini, ada fakta sosial menarik yang terjadi di masyarakat. Fakta menarik tersebut yaitu adanya prasangka dan diskriminasi terhadap korban Covid-19. Prasangka dan diskriminasi ini disebabkan oleh ketakutan masyarakat terhadap situasi yang tidak menentu akibat penyebaran virus Corona. Hal ini terlihat jelas dari sikap masyarakat yang menjaga jarak saat berinteraksi dengan orang lain, menghindari salaman, menghindari perkumpulan, dan lain-lain. Sikap masyarakat ini berawal dari adanya prasangka sehingga kemudian memunculkan sikap diskriminatif. Prasangka dan diskriminasi ini merupakan perwujudan dan disorganisasi sosial(Syaifudin, 2020).

Kasus Covid-19 ini bukan hanya menyebabkan disorganisasi sosial, namun juga menyebabkan disfungsi sosial. Disfungsi sosial terjadi ketika seseorang tidak mampu menjalankan fungsi sosial yang sesuai dengan status sosial akibat rasa takut terhadap Covid-19. Contoh nyata disfungsi sosial dapat terlihat pada sikap masyarakat yang mulai membatasi jarak dengan orang lain serta tidak mau menolong orang lain karena khawatir terkena Covid-19. Salah satu contohnya yaitu masyarakat di daerah Sawangan, Kota Depok, menolak penggunaan pemakaman umum di daerahnya untuk kuburan korban Covid-19 (Tempo, 30 Maret 2020). Masyarakat sangat khawatir jika mayat yang dikuburkan tetap dapat menyebarkan virus Corona di daerahnya. Padahal jenazah yang sudah diproses dengan baik di rumah sakit dengan menggunakan berbagai pelindung seperti desinfektan dan peti khusus tidak akan menyebabkan penyebaran virus Corona.

Disfungsi sosial ini membuat individu justru mengalami gangguan pada kesehatannya. Dalam perspektif sosiologi kesehatan, seseorang disebut sehat jika kondisi fisik, mental, spritual maupun sosial dapat membuat individu tersebut menjalankan fungsi sosialnya. Namun jika kondisi ini terganggu maka seseorang tersebut dinyatakan sakit. Dalam

kasus Covid-19, sakit yang dimaksud adalah sakit secara sosial. Menurut Talcott Parsons dalam bukunya "*The Social System*", sakit bukan hanya kondisi biologis saja, tetapi juga peran sosial yang tidak berfungsi dengan baik. Parsons melihat sakit sebagai bentuk perilaku menyimpang dalam masyarakat karena orang yang sakit tidak dapat memenuhi peran sosialnya secara normal (Syaifudin, 2020). Disorganisasi dan disfungsi sosial inilah yang merupakan wujud nyata dari sakit secara sosial.

3. Tindakan Kriminal

Masalah Covid-19 juga dikhawatirkan berdampak pada peningkatan tindakan kriminal. Tindakan kriminal yang dilakukan bisa beragam seperti pencurian alat pelindung diri yang tengah langka saat ini, pembuatan handsanitizer atau desinfektan palsu yang justru membahayakan kesehatan, penipuan harga bahan pokok, dan lain-lain. Salah satu contohnya yaitu kasus PNS di Cianjur yang tertangkap mencuri 20.000 masker (Kompas, 26 Maret 2020). Tindakan kriminal yang lebih besar lainnya seperti perampokan, pembunuhan, penjarahan, mungkin bisa saja terjadi jika situasi semakin tidak terkendali.

4. Melemahnya sektor pariwisata

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang berkontribusi besar bagi pendapatan daerah maupun bagi peningkatan lapangan kerja bagi masyarakat. Sektor pariwisata ini terkait dengan hotel, restoran, tempat wisata, dan lain-lain. Namun sejak kasus Covid-19 meningkat, berbagai tempat wisata harus ditutup dalam waktu yang belum ditentukan demi mencegah penyebaran Corona. Dengan ditutupnya berbagai tempat wisata, otomatis akan mempengaruhi pada pendapatan daerah dan khususnya pendapatan masyarakat. Bagi daerah yang mengandalkan sektor pariwisata sebagai penyumbang pendapatan daerah terbesar maka harus waspada dengan penurunan pendapatan daerah akibat ditutupnya tempat-tempat wisata (Fadjarudin, 2020). Selain itu, penutupan tempat wisata

juga berpengaruh pada para pekerja yang juga mengandalkan pemasukan dari sektor pariwisata, terutama pekerja sektor informal yang penghasilannya tidak tetap.

5. Angka Kemiskinan dan Pengangguran Meningkat

Kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga, mental, maupun fisiknya dalam kelompok tersebut (Soekanto, 2013). Kasus Corona di Indonesia telah hampir melumpuhkan kegiatan ekonomi masyarakat. Sejak pemerintah menerapkan berbagai kebijakan seperti *Work From Home*, pembatasan wilayah, dan penutupan berbagai tempat publik seperti tempat wisata, banyak perusahaan atau perkantoran yang meliburkan pegawainya. Para pengusaha UMKM juga bahkan ada yang memutihkan karyawan (PHK) sebagai antisipasi dampak penutupan usaha dalam waktu yang belum ditentukan.

Tidak hanya itu, pekerja sektor informal juga sangat dirugikan akibat kasus Corona ini. Para pekerja informal yang biasanya mendapatkan pendapatan harian kini kesulitan untuk memenuhi kebutuhannya. Mereka adalah pekerja warung, toko kecil, pedagang asongan, pedagang di pasar, pengendara ojek online, hingga pekerja lain yang menggantungkan hidup dari pendapatan harian termasuk di pusat-pusat perbelanjaan. Akibatnya mereka memilih pulang kampung ke daerah masing-masing karena tidak sanggup menanggung beban kehidupan tanpa adanya kepastian pemasukan. Selama delapan hari terakhir, tercatat 876 armada bus antar provinsi yang membawa kurang lebih 14.000 penumpang dari Jabodetabek, menuju Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Yogyakarta. Sebagian besar dari mereka adalah pekerja informal yang mencari nafkah di ibu kota (BBC Indonesia, 30 Maret 2020).

Hal ini tentu bisa menyebabkan angka kemiskinan dan pengangguran di Indonesia meningkat. Per Maret 2019 saja,

penduduk golongan rentan miskin dan hampir miskin di Indonesia sudah mencapai 66,7 juta orang atau hampir tiga kali lipat jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan (golongan miskin dan sangat miskin). Ironisnya sebagian besar dari golongan ini bekerja di sektor informal, khususnya yang mengandalkan upah harian. Apabila penanganan pandemi berlangsung lama, periode pembatasan dan penurunan mobilitas orang akan semakin panjang. Akibatnya, golongan rentan miskin dan hampir miskin yang bekerja di sektor informal dan mengandalkan upah harian akan sangat mudah kehilangan mata pencaharian dan jatuh ke bawah garis kemiskinan (CNBC Indonesia, 29 Maret 2020).

Dengan berbagai masalah sosial ekonomi tersebut, pemerintah Indonesia berupaya untuk memulihkan kondisi, salah satunya dengan memberikan insentif sebagai stimulus bagi masyarakat. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah tengah menyiapkan stimulus ekonomi Jilid III yang akan difokuskan untuk sektor kesehatan dan menjangkau jaring sosial. Aliran bantuan ini akan disalurkan melalui program-program pemerintah seperti program keluarga harapan, kredit usaha rakyat, kredit ultra mikro, kartu sembako, hingga program bantuan pangan non tunai (Tempo, 18 Maret 2020). Namun, pemerintah juga bukan hanya perlu memperhatikan kesejahteraan masyarakat dalam hal ekonomi saja, pemerintah juga harus memperhatikan sisi sosial dan psikologis masyarakat. Hal ini karena kesejahteraan sosial bukan hanya menyangkut pemenuhan kebutuhan ekonomi, namun juga kebutuhan sosial dan psikologis berupa ketenangan dan keamanan bagi masyarakat. Salah satunya dengan terus membatasi informasi tidak benar (hoaks) yang dapat meresahkan masyarakat dan memberikan informasi yang dapat memberikan semangat dan energi positif bagi masyarakat. Dengan demikian, kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia, baik yang terdampak Corona maupun yang tidak, akan tetap terjamin hingga kasus Corona ini selesai.

BAB 11

PEMERINTAH DAN ANTISIPASI WABAH COVID 19

A. Upaya Menghadapi Pandemi COVID-19?

Pemerintah daerah (pemda) maupun pemerintah pusat sama-sama memiliki andil untuk mengatasi situasi pandemi COVID-19. Namun, pada beberapa situasi, keduanya memiliki perbedaan cara pandang dan kepemimpinan yang membuat masyarakat bingung. Per 1 April 2020 sebagai contoh, Presiden Joko Widodo meminta pemerintah daerah untuk mengikuti peraturan yang tertera dalam PP No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dengan meminta izin dari Menteri Kesehatan.

Jika mengacu pada uraian Presiden, tugas pemda menghadapi pandemi hanyalah untuk mengimplementasikan PSBB. Padahal, peran pemda bisa lebih sentral lantaran mereka berhadapan langsung dengan rakyat dalam menghadapi pandemi. Karenanya, mereka dituntut untuk selalu mengambil kebijakan yang tangkas dan bisa memberi rasa aman kepada rakyat. Lantas, seperti apa peran yang bisa diupayakan pemda menghadapi pandemi sesuai dengan undang-undang? Pertama, perlu dipahami bahwa sesuai dengan Keppres No. 12/2020, Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 merupakan pelaksana penanggulangan bencana nasional pandemi COVID-19.

Di sisi lain, pemerintah daerah yang terdiri dari gubernur, bupati, dan wali kota berperan sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di tingkat provinsi, kota, dan kabupaten. Mereka memiliki wewenang untuk menetapkan kebijakan di daerah masing-masing dengan memperhatikan kebijakan pemerintah pusat. Kedua, pandemi COVID-19 perlu diketahui sebagai

persoalan kesehatan masyarakat, bukan peristiwa kebencanaan belaka. Dengan kondisi itu, sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, persoalan pandemi merupakan urusan pemerintah daerah. Sesuai mandat itu pula, persoalan sektor kesehatan menjadi salah satu aspek dalam wewenang pemda. Dua Asas Pemda juga bergerak dalam dua asas, yakni asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya. Pemda memegang kendali untuk mengatasi situasi pandemi di wilayah masing-masing dan mempunyai kuasa untuk menyelenggarakan kebijakan yang disesuaikan dengan kemampuan dan sumber daya masing-masing. Untuk mengatasi situasi pandemi, ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh pemda.

Pertama, pemerintah daerah perlu memperkuat peran kepemimpinan daerah. Dalam situasi pandemi pemerintah daerah harus lincah mengikuti kebutuhan secara cepat tanpa melalui aturan birokrasi yang berbelit. Di satu sisi, pemerintah pusat idealnya berperan mengeluarkan panduan teknis dan strategi nasional untuk daerah. Di sisi lain, pemda perlu menjadi pelaksana mandiri dan panglima dalam menyelenggarakan upaya yang diperlukan di daerahnya berdasarkan panduan yang telah diberikan.

Kedua, pemerintah daerah perlu merencanakan pembiayaan untuk penanggulangan bencana. Berdasarkan UU No. 24 Tahun 2007, dana untuk penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Meski dalam situasi normal saja alokasi anggaran tetap bermasalah, upaya ini perlu tetap diberdayakan. Pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan berupaya mendorong pemerintah daerah melakukan realokasi dan *refocusing* anggaran daerah untuk menangani COVID-19. Sumber pembiayaan ini bisa berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) pemerintah. Di samping itu, Dana Desa, Dana Siap Pakai, serta perangkat pembiayaan lainnya juga bisa digunakan. Pemerintah pusat juga seharusnya membantu pemda secara

kreatif mencari sumber-sumber pendanaan lain, seperti mobilisasi dana swasta maupun masyarakat.

Ketiga, pemda perlu mengupayakan strategi pemutusan rantai pandemi. Bersesuaian dengan rekomendasi WHO, strategi pemutusan terdiri atas upaya tes, lacak, rawat, dan isolasi. Keempat tahapan itu sejatinya terfasilitasi dalam upaya pencegahan wabah. Puskesmas yang menjadi garda terdepan daerah bisa membantu dalam upaya promotif dan preventif.

Oleh karena itu, pemda perlu memfasilitasi komponen tes yang diperlukan tersedia, salah satu caranya ialah dengan bekerja sama dengan pemerintah pusat. Adapun, pelaksanaan tes bisa disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing. Di sisi lain, pemerintah daerah juga harus terus mendorong upaya surveilans yang dilakukan oleh puskesmas untuk memastikan wabah tidak menyebar dengan cepat. Dalam tahapan rawat dan isolasi, pemda perlu memastikan fasilitas kesehatan tersedia dan memadai dalam layanan-layanan fasilitas kesehatan. Ditambah lagi, pemda juga perlu memastikan adanya proses isolasi dalam tataran individu ataupun populasi, baik melalui imbauan ataupun melalui penetapan peraturan dan pemberian sanksi.

Peran pemerintah daerah bukan hanya sebagai pelaksana tugas pemerintah pusat. Lebih dari itu, mereka memiliki fungsi strategis untuk menekan penularan wabah dalam masyarakat. Dengan memperkuat peran kepemimpinan daerah, menetapkan anggaran daerah, dan memastikan berjalannya tahapan tes, lacak, rawat, dan isolasi menurunkan laju penularan COVID-19 di setiap daerah bukanlah hal yang mustahil.

B. “Relasi Pusat dan Daerah dalam Mengatasi COVID-19”

Era desentralisasi dan Otonomi Daerah telah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya di bidang kesehatan. Sehubungan

dengan kondisi yang terjadi saat ini, penyebaran COVID-19 di seluruh wilayah Indonesia tentu membutuhkan respons cepat dari pemerintah, khususnya pemerintah daerah. Beberapa kepala daerah telah melakukan inisiatif lebih dulu untuk mengantisipasi terjadinya persebaran virus yang semakin meluas, misalnya dengan penerapan kebijakan karantina wilayah (lockdown) dan pembatasan sosial berskala besar (social distancing, physical distancing). Kebijakan ini membatasi pergerakan masyarakat dengan meliburkan sekolah, meminta karyawan bekerja dari rumah atau dikenal dengan work from home (WFH), membatasi kegiatan keagamaan hingga membatasi penggunaan transportasi publik. Namun dalam perkembangannya, kebijakan pemerintah daerah tersebut dinilai tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat. Inisiatif yang dilakukan kepala daerah justru dianulir oleh pemerintah pusat karena dianggap telah melangkahi kewenangan pusat. Padahal menurut UU Pemerintahan Daerah (UU No. 23/2014), daerah-daerah memiliki tanggung jawab dalam memberikan pelayanan dasar, khususnya dalam meningkatkan pelayanan kesehatan. Urusan yang menjadi kewenangan daerah sangat jelas diatur dalam UU ini di mana pemerintah pusat memiliki kewenangan dalam enam urusan yaitu politik luar negeri; pertahanan; keamanan; yustisi; moneter dan fiskal nasional; dan agama. Selain keenam urusan tersebut, tentu menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Merespons silang sengkabut relasi tersebut, Pusat Penelitian Politik di bawah Kedeputan Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan (IPSK) LIPI mengadakan Webinar bertajuk “Relasi Pusat dan Daerah dalam Mengatasi COVID-19” pada hari Rabu, 22 April 2020. Dengan menggunakan aplikasi Zoom, acara ini juga disiarkan secara langsung melalui kanal Youtube P2P-LIPI. Ada tiga tujuan utama dari kegiatan webinar ini, yaitu untuk mendapatkan gambaran/respons yang jelas dari keragaman daerah dalam mengatasi COVID-19;

mendapatkan masukan penting tentang praktik koordinasi, bimbingan dan pengawasan (korbinwas) antara eksekutif (pusat-daerah) dan legislatif (DPR dan DPD-RI) dalam mengatasi COVID-19; dan mendapatkan masukan tentang pola relasi yang ideal antara pusat dan daerah terkait dengan wewenang, kebijakan, etika, dan norma dalam mengatasi COVID-19.

Kegiatan Webinar ini menghadirkan delapan orang pembicara, yaitu Prof. Dr. R. Siti Zuhro (Profesor Riset Pusat Penelitian Politik LIPI); Drs. Akmal Malik, M.Si (Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri); Anies Baswedan, Ph.D (Gubernur DKI Jakarta); Ir. H. Ruksamin, S.T., M.Si. (Bupati Konawe Utara, Sulawesi Tenggara); Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung (Ketua Komisi II DPR RI); Dr. Agustin Teras Narang (Ketua Komite I DPD RI); Prof. Dr. Eko Prasajo (Dekan Fakultas Ilmu Administrasi UI); dan Prof. Dr. Djohermansyah Djohan (Presiden Institut Otonomi Daerah/Guru Besar IPDN). Dimoderatori oleh Prof. Dr. Firman Noor (Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI), acara ini diikuti peserta dari berbagai profesi baik dari dalam negeri (Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, NTT, Maluku) dan luar negeri (Rusia dan Amerika). Prof. Dr. R. Siti Zuhro mengawali pemaparan dengan mengetengahkan topik terkait “Tarik-Menarik Kewenangan Pusat-Daerah dalam Mengatasi COVID-19”. Menurutnya, pemerintah pusat perlu meluruskan kembali desentralisasi dan Otonomi Daerah karena masing-masing sudah mempunyai tugas pokok dan fungsinya. Dalam hal ini, tidak hanya tingkatan pemerintahan saja yang perlu direformasi, tetapi juga pola korbinwasnya. Siti Zuhro mengingatkan bahwa praktik sistem multipartai tidak boleh berpengaruh negatif terhadap birokrasi pemerintahan karena birokrasi sulit netral secara politik sehingga birokrasi menjadi partisan. Lebih jauh Siti Zuhro menegaskan bahwa sifat birokrasi pada dasarnya hierarkis, mulai pusat sampai daerah, sehingga tidak perlu dibenturkan dengan realitas warna-warni partai yang memimpin birokrasi. Birokrasi harus terjaga dan tidak

boleh dijadikan lahan tarik-menarik kepentingan. Apalagi dalam melawan COVID-19, siapapun yang memimpin birokrasi harus taat pada etika pemerintahan dan profesional dalam menjalankan tugasnya sehingga konflik antartingkatan pemerintahan tidak perlu terjadi saat ini. Di akhir paparannya, Siti Zuhro mengajak bahwa sudah saatnya kita semua untuk menunjukkan *wisdom* baik bagi pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota yang bekerja secara kontinum untuk kepentingan nasional.

Pembicara kedua, Drs. Akmal Malik, M.Si membahas tentang “Wewenang dan Kebijakan Pemerintah Pusat dalam Mengatasi COVID-19”. Menurutnya, terkait dengan penanganan COVID-19, pemerintah pusat telah menyiapkan pedoman manajemen dan dampaknya bagi pemerintah daerah. Dalam konteks korbinwas umum, langkah-langkah yang dilakukan oleh pusat telah diinfokan kepada pemerintah daerah melalui dokumen tertulis (pedoman). Tujuannya tentu agar pemerintah daerah mendapatkan pemahaman terkait COVID-19. Menurutnya, ini bukan pandemi biasa tetapi perang terhadap COVID-19. Oleh karena itu, Kemendagri telah menyiapkan lima strategi, yaitu (a) strategi pencegahan penyebaran COVID-19; (b) peningkatan sistem kekebalan tubuh; (c) peningkatan kapasitas kesehatan; (d) peningkatan ketahanan pangan dan industri alat kesehatan; dan (e) memperkuat jaring pengaman sosial (*social safety net*). Untuk membangun pola hubungan pusat dan daerah, Kemendagri memiliki prinsip, yaitu (1) melindungi kesehatan masyarakat dari penyakit dan/atau faktor resiko kesehatan masyarakat merupakan tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah (urusan konkuren); (2) penentuan pelaksana urusan berbasis kriteria eksternalitas (dampak yang dirasakan), efektivitas dan akuntabilitas; (3) kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah; dan (4) Presiden sebagai komandan tertinggi dari seluruh urusan eksekutif. Untuk itu, saat ini telah dibuat gugus tugas untuk menangani pandemi COVID-19.

Selanjutnya pembicara ketiga ialah Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan, Ph.D. Dalam paparannya berjudul “Wewenang dan Kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta”, Anies menegaskan bahwa dalam menghadapi COVID-19 ini masalahnya bukanlah pada kewenangan pusat dan daerah mengingat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara struktur, tugas, dan wewenang sudah sesuai dengan peraturan yang ada. Tantangan utamanya justru terletak pada cara pandang terhadap masalahnya, apakah ini masalah pusat dan daerah ataukah masalah kita sebagai bangsa yang harus menangkal agar pandemi ini tidak muncul. Dalam hal kewenangan, ungkap Anies, Pemprov DKI Jakarta (dalam hal ini Dinas Kesehatan) telah melakukan komunikasi dengan Kementerian Kesehatan sejak Januari 2020. Tetapi, pada kenyataannya kasus ini terus berkembang dan tidak ada pemberitahuan dari pemerintah nasional kepada publik untuk hati-hati dan waspada terhadap COVID-19. Menyikapi hal tersebut, Pemprov DKI Jakarta pada akhir Februari-awal Maret menyampaikan kepada masyarakat untuk waspada terhadap COVID-19 ini. Pada 3 Maret 2020 muncul dua kasus pertama di DKI Jakarta, namun melonjak tajam pada 22 April 2020 menjadi 3.351 kasus positif dan 301 meninggal karena COVID-19. Mengingat hal ini juga bisa terjadi di tempat lain, Anies mengingatkan perlunya langkah-langkah kewaspadaan dan tanggung jawab bersama sebagaimana yang tercantum di pasal 4 UU No.6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Dengan demikian, tegas Anies, yang seharusnya menjadi garda terdepan adalah kita bersama (negara, pemerintah, dan rakyat), bukan tenaga medis. Tenaga medis merupakan pertahanan terakhir untuk menyelamatkan.

Pembicara keempat ialah Bupati Konawe Utara, Ir. H. Ruksamin, ST, M.Si yang memaparkan tentang “Wewenang dan Kebijakan Pemerintah Daerah (Kabupaten) dalam Mengatasi COVID-19: Pengalaman Konawe Utara”. Menurutnya, COVID-19 merupakan ujian

desentralisasi. Artinya, pusat mengeluarkan kebijakan tetapi intinya ada di daerah. Terkait penanganan pandemi ini, pada 16 Maret 2020 Pemkab Konawe Utara membentuk gugus tugas penanganan COVID-19. Kebijakan yang dilakukan ialah (a) menyediakan fasilitas kesehatan dan SOP penanganan pasien COVID-19; (b) menyelenggarakan edukasi bahaya COVID-19 kepada seluruh masyarakat; (c) memobilisasi seluruh *stakeholders* (Forkominda, swasta, ASN, karang taruna, aparat desa, LSM, dll) untuk berpartisipasi menghadapi COVID-19; (d) menyediakan jaring pengaman sosial; dan (e) menangani dampak ekonomi. Selain itu, Pemkab juga menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Kebijakan ini diakui Ruksamin memiliki dampak positif bagi Konawe Utara sehingga sejauh ini tidak ada masyarakatnya yang terdampak COVID-19.

Memasuki sesi kedua, hadir pembicara kelima, yaitu Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung yang memaparkan tentang “Pengawasan DPR-RI terhadap Kebijakan Mengatasi COVID-19”. Menurutnya, sepanjang sejarah ini merupakan pandemi terburuk yang membutuhkan penanganan cepat dari pemerintah. Berkenaan dengan hal tersebut, DPR-RI telah membentuk gugus tugas untuk melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. Terhitung 13 Maret sampai dengan 13 April 2020, ada sembilan kebijakan (4 Keppres, 1 Inpres, 1 Perppu, 1 PP, dan 2 Perpres) yang diambil oleh pemerintah pusat untuk mengendalikan pandemi ini. Selain itu, DPR-RI juga membentuk Satgas Lawan COVID-19 di luar fungsi pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Sehubungan dengan pola relasi pusat dan daerah, Ahmad Doli mengingatkan bahwa ke depannya kebijakan yang diambil oleh pemerintah tidak boleh berhenti mengingat dinamisnya virus ini. Artinya, kebijakan-kebijakan ini harus terus dievaluasi untuk menemukan pola-pola baru, termasuk perlunya juga proses preventif dan represif. Oleh karena itu, menurutnya, hal berikut yang perlu dikoordinasikan antara pemerintah pusat

dan daerah adalah bagaimana pemerintah pusat mempunyai pemetaan yang jelas sehingga setelah kebijakan PSBB dapat dirumuskan tindak lanjut apa yang perlu dilakukan oleh daerah-daerah yang belum menetapkan kebijakan ini. Di akhir paparan, Ahmad Doli mengingatkan bahwa pandemi ini bisa diatasi dan dikendalikan jika pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat bisa solid, serta penegakan hukum bagi yang melanggar. Untuk itu, pemerintah pusat dan daerah diharapkan melakukan pola hubungan yang semakin baik. Pemerintah pusat harus memberi keleluasaan bagi pemda untuk melakukan kebijakan taktis.

Pembicara keenam adalah Dr. Agustin Teras Narang yang memaparkan tentang “Keragaman Daerah dalam Merespons COVID-19”. Menurutnya, masih terdapat problem sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah dalam merespons pandemi COVID-19 ini. Selain itu, juga terjadi ketidakseragaman dalam merespons pandemik ini. Beragam peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan pemerintah, masih belum direspons baik secara nasional, termasuk belum terlihat adanya manajemen krisis pelayanan publik yang terpadu antara pusat dan daerah. Padahal penting untuk melakukan optimalisasi anggaran bersama dalam mengatasi COVID-19 maupun mengelola sinergis modal sosial dengan melibatkan tokoh nasional, agama, adat, masyarakat setempat, untuk berpartisipasi aktif melakukan edukasi publik. Beberapa daerah termasuk kelompok masyarakat menggunakan modal sosial dan tradisi gotong royong untuk menghadapi pandemi. Prinsipnya, menurut Narang, saat ini kita harus bersikap *business as not usual* karena kita sedang menghadapi sesuatu yang *extraordinary*. Untuk itu, dibutuhkan sumber daya yang tinggi guna menyelesaikan pandemi ini.

Prof. Dr. Eko Prasjo sebagai pembicara ketujuh memaparkan tentang “Menyoal Koordinasi, Komunikasi, dan Sinergi antar-Kementerian/Lembaga dalam Mengatasi COVID-19”. Prof. Eko Prasjo mengakui adanya permasalahan terkait dengan kewenangan dalam

penanganan COVID-19 ini. Terdapat lima isu pokok menurut Prof. Prasajo, yaitu (a) banyaknya sumber regulasi; (b) tidak ada kejelasan apakah penanganan wabah COVID-19 merupakan urusan bidang kesehatan sebagaimana diatur dalam UU No. 23/2014 dan UU No. 6/2018, atau urusan bencana sebagaimana diatur dalam UU No. 23/2014 dan UU No. 24/2007; (c) lemahnya koordinasi kelembagaan; dan (d) gugus tugas dalam penanganan wabah COVID-19 tanpa disertai kewenangan untuk membuat keputusan dan tindakan administrasi pemerintahan. Hal ini terjadi karena penanganan wabah COVID-19 melibatkan banyak sekali urusan yang menjadi kewenangan Kementerian/Lembaga/Pemda. Keppres No. 7/2020, Keppres No. 9/2020, dan UU No. 24/2007 tidak cukup menjangkau tugas-tugas yang dibebankan. Selain itu, juga karena banyaknya norma hukum dan ketidakjelasan *top of champion* dalam penanganan wabah COVID-19 di tingkat pusat, serta berkaitan dengan kewenangan provinsi dan kabupaten/kota. Dari kelima isu tersebut, masalah Pemerintahan Umum masih belum digarap terkait dengan pandemi ini. Oleh karena itu, Prasajo menegaskan perlunya diperkuat Urusan Pemerintahan Umum sebagaimana diatur dalam UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan demikian, sinergi antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam penanganan wabah dapat dilaksanakan dengan baik. Selain itu, perlu ada Perpres baru tentang manajemen penanganan kedaruratan kesehatan COVID-19 sebagai bencana nasional.

Pembicara terakhir, Prof. Dr. Djohermansyah Djohan memaparkan tentang “Pola Hubungan Pusat-Daerah: Etika dan Norma dalam Mengatasi COVID-19”. Menurutnya, konsep relasi pusat-daerah dibagi dua tipe, yaitu untuk negara federal dan negara kesatuan. Dalam sistem negara federal, penanggulangan wabah di daerah dipegang oleh pemda masing-masing. Sedangkan pemerintah pusat (federal) lebih memberikan dukungan, misalnya dana korban terdampak, APD, dan tenaga medis. Ini menurutnya merupakan *weak type*. Sementara itu untuk

negara kesatuan, relasi pusat-daerah merupakan *strong type* di mana pemerintah pusat memegang kendali manajemen penanggulangan bencana nasional wabah, misalnya pembuatan regulasi, pengorganisasian, dan penyediaan kebutuhan dasar korban. Pemda memberikan dukungan dalam bentuk, misalnya SDM, dana/pembiayaan, dan sumber daya lokal lainnya. Norma dalam menghadapi COVID-19 berdasarkan UU Pemda No. 23/2014 bahwa pemerintah pusat memberikan penyediaan kebutuhan dasar korban terdampak COVID-19 di Indonesia; membuat regulasi, pedoman dan petunjuk pelaksanaan; dan melakukan korbinwas. Pemerintah provinsi memberikan dukungan penyediaan kebutuhan dasar korban terdampak COVID-19 dengan Gubernur menjadi ketua satgas percepatan dan melakukan korbinwas. Sementara pemkab/pemkot memberikan dukungan penyediaan kebutuhan dasar korban terdampak COVID-19 dan Bupati/Walikota menjadi ketua satgas percepatan.

Terkait etika dalam menangani COVID-19, Prof. Djohermansyah mengingatkan bahwa tidaklah elok bagi pemerintah pusat selaku pemegang kewenangan bencana nasional menangani sendiri beban pandemik COVID-19 ini. Pemerintah pusat seyogianya merangkul daerah untuk berkolaborasi dan berbagi beban yang berat ini di bawah kepemimpinan presiden, misalnya menerima masukan dari pemda yang mengetahui lapangan, mendorong pemda merealokasi APBD, membujuk pemda untuk bersedia tunda bayar Dana Bagi Hasil (DBH), dan menggeser jadwal Pilkada 2020. Sementara itu, pemda tidak boleh tinggal diam, lalai atau abai, sekalipun tidak mempunyai wewenang dalam mengatasi COVID-19. Dalam hal ini, pemda harus kooperatif, memberikan saran, dan masukan kepada pemerintah pusat, dan juga mensosialisasikan dan mengedukasi masyarakatnya untuk mematuhi garis kebijakan.

Menutup kegiatan webinar ini ada beberapa hal yang dapat disimpulkan. Pertama, masalah relasi pusat dan daerah bersifat multidimensional terkait dengan masalah

mindset, regulasi, keberadaan lembaga koordinasi, hingga masalah pengawasan, norma, dan etika. Masalah koordinasi, komunikasi dan sinergi di awal pandemi ini diakui masih kurang. Meski demikian, terkait masalah *mindset*, pemerintah harus merespons cepat pandemi yang pada akhirnya berpengaruh terhadap seluruh proses penanganan. Pemerintah semakin hari semakin *concern* dan menyadari bahwa koordinasi penting. Salah satunya dicerminkan dengan keberadaan gugus tugas. Pemda sendiri telah melakukan penafsiran beberapa kebijakan dan sedapat mungkin melakukan respons cepat demi kepentingan bersama tanpa bermaksud melakukan pelanggaran aturan.

Kedua, terkait dengan pengawasan oleh DPR, disarankan untuk tidak boleh longgar. Namun demikian, perlu juga dilakukan diskresi kebijakan agar tercipta akselerasi respons yang taktis oleh pemda terkait pandemi ini. Untuk itu, diharapkan ke depannya pola hubungan pusat dan daerah semakin taktis dan harmonis. Ketiga, urusan Pemerintahan Umum merupakan salah satu kunci bagi penguatan dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Untuk itu, tindak lanjutnya dapat dituangkan dalam Perpres terkait dengan Manajemen Kedaruratan Kesehatan Masyarakat terkait COVID-19 sebagai bencana nasional. Keempat, dalam penanganan COVID-19, hubungan pusat dan daerah tetap harus dalam norma dan etika. Baik pemerintah pusat maupun daerah harus memahami benar kewenangan yang dimilikinya, di sisi lain, keduanya harus saling mengapresiasi dengan membagi beban dan semangat terus sinergi serta kerja sama demi kepentingan bangsa. Menutup acara webinar, panitia memberikan *pooling* kepada peserta terkait dengan pertanyaan “Bagaimana Relasi Pusat Daerah dalam Mengatasi COVID-19 sejauh ini? Terdapat 13% yang menyatakan sangat baik; 54% cukup baik; 30% buruk; dan 3% sangat buruk

C. Tarik Menarik Penanganan Covid 19

Jika berbicara tentang Covid-19, maka sesungguhnya kita tengah berbicara tentang kesehatan sebagai fokus utama, bukan berbicara tentang ekonomi, sosial, politik, maupun budaya, walaupun secara langsung pasti berdampak pada beberapa aspek tersebut. Covid-19 dan kesehatan tentu dua hal yang tidak dapat dipisahkan, karena Covid-19 adalah virus yang menyerang imun tubuh manusia, bahkan dapat berujung pada kematian. Terlebih lagi angka konfirmasi positif Covid-19 di Indonesia yang semakin hari semakin tinggi. Menyikapi hal ini, pemerintah baik pusat maupun daerah tengah mencari cara terbaik untuk bencana non-alam ini.

Nampaknya terkait persoalan Covid-19, pemerintah daerah bergerak lebih dulu dibanding pemerintah pusat. Hal ini terlihat dari langkah pemerintah pusat yang agak lambat dalam mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 (PP PSBB) pada 31 Maret 2020. Padahal jumlah konfirmasi positif Covid-19 telah mencapai seribu dua ratusan orang. PP tentang PSBB ini dikeluarkan untuk memastikan agar pemerintah daerah tak berjalan sendiri-sendiri, sehingga langkah penanganan Covid-19 dapat seirama dengan pemerintah pusat. Secara garis besar, PP PSBB mengatur peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan pembatasan kegiatan di tempat umum. Padahal hal tersebut telah dilakukan oleh beberapa pemerintah daerah. Misalnya kebijakan 'lockdown' lokal yang diambil Bupati Tegal sejak 23 Maret 2020 dengan cara menutup akses masuk kota dengan beton *movable concrete barrier* (MBC). Kebijakan Gubernur Papua yang melakukan penutupan akses keluar-masuk dari pelabuhan, bandara, darat, termasuk Pos Lintas Batas Negara sejak 26 Maret 2020. Kebijakan Gubernur Bali sejak 27 Maret 2020, telah menegaskan kepada masyarakat untuk tidak berkumpul, bekerja, belajar dan beribadah dari rumah. Begitu pun dengan beberapa daerah lainnya, yang tentu

saja tujuan utamanya adalah melindungi masyarakat dari penyebaran Covid-19.

D. Konstitusionalitas Langkah Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah yang lebih dahulu mengambil langkah antisipasi dan penanganan Covid-19 tentu saja tak bermaksud mendahului atau membangkang pada pemerintah pusat. Secara umum, pastinya mempunyai maksud baik, yaitu untuk melindungi masyarakat yang telah memberikannya mandat secara konstitusional melalui pemilihan umum sebagaimana Pasal 18 Ayat 4 UUD 1945. Secara sadar, tentu pemerintah daerah merasa mempunyai tanggung jawab atas kondisi wabah yang terjadi di masyarakat, yang bahkan menyebabkan korban jiwa. Karena kesehatan merupakan salah satu kewajiban pemerintah daerah kepada masyarakatnya, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Sehingga jika pemerintah daerah berdiam diri, tentu akan mendapatkan serangan aksi dari masyarakat untuk menagih tindakan konkrit atas problem yang terjadi ini, akan menjadi beban pemerintah daerah ketika tidak mengambil langkah dengan cepat.

Beragamnya respon dan tindakan pencegahan dan penanganan Covid-19 oleh pemerintah daerah tentu merupakan respon dari kurang sigapnya pemerintah pusat merespon kondisi penyebaran Covid-19 di daerah. Hal ini yang mendorong pemerintah daerah, yang menganggap dirinya mempunyai otoritas terhadap daerah secara teritorial dan tahu persis kondisi riil masyarakatnya, mengambil langkah cepat untuk menanggulangi dan mencegah bertambahnya korban jiwa. Hal ini nampak jelas dari apa yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta misalnya, yang telah mengajukan PSBB kepada Menteri Kesehatan per 1 April 2020, namun kemudian ditolak karena belum sesuai dengan petunjuk pengajuan dalam PMK Nomor 9 Tahun 2020 yang baru dibuat tanggal 3 April 2020. Sehingga mau tak mau, pengajuan Pemprov DKI harus dilengkapi ulang agar disetujui oleh Menteri Kesehatan.

Boleh jadi yang dipikirkan pemerintah daerah saat menerapkan langkah antisipasi, baik berupa lockdown lokal ataupun mengajukan permohonan penetapan PSBB kepada Menteri Kesehatan adalah rasa tanggungjawab yang tinggi terhadap keselamatan warganya. Bahkan mungkin saja pemerintah daerah diliputi rasa ketakutan Covid-19 akan semakin banyak menelan korban jiwa, sedangkan pemerintah daerah tidak bisa menghidupkan kembali orang yang merengang nyawa. Hal ini sempat tergambar dari langkah *lockdown* lokal yang diberlakukan Bupati Tegal. Selain itu, juga semakin bertambahnya kepala daerah yang mengajukan penetapan status PSBB kepada Menteri Kesehatan. Pemerintah daerah juga sadar betul terhadap konsekuensi lain yang harus disandang atas status PSBB, yakni bertanggungjawab menyediakan kebutuhan pangan bagi masyarakat. Namun nampaknya ini tak menjadi masalah berarti bagi pemerintah daerah, karena pemerintah daerah masih mempunyai cara untuk memastikan masyarakatnya tak kekurangan bahan pangan, untuk bertahan selama status PSBB diberlakukan.

E. Proses 'Rumit'

Secara legalitas, kewenangan untuk menentukan kedaruratan kesehatan masyarakat memang menjadi kewenangan pemerintah pusat sebagaimana Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018. Dimana salah satu bentuk tindakan mitigasi terhadap kedaruratan kesehatan tersebut adalah PSBB, yang kemudian didelegasi menjadi kewenangan menteri. Namun, di tengah semangat pemerintah daerah untuk melindungi masyarakatnya dan mengambil bermacam upaya untuk selamat dari penyebaran wabah Covid-19, Menteri Kesehatan justru mengeluarkan PMK Nomor 9 Tahun 2020 yang dianggap terlalu prosedural. Dikatakan demikian, karena jika pemerintah daerah hendak mengajukan status PSBB, maka kepala daerah harus menyusun empat hal secara rinci, mulai dari peningkatan jumlah kasus menurut waktu, penyebaran kasus menurut waktu, kejadian transmisi lokal,

serta kesiapan daerah tentang aspek ketersediaan kebutuhan hidup dasar masyarakat, sarana dan prasarana kesehatan, anggaran dan operasionalitas jaringan pengamanan sosial, dan aspek keamanan.

Melihat detail data yang diminta oleh Menteri Kesehatan tersebut, sebenarnya merupakan hal penting agar penetapan PSBB dapat dipertanggungjawabkan dan tak terkesan asal. Namun dalam konteks kemendesakan penyebaran Covid-19, tentunya fokus pemerintah daerah akan terbagi. Terbagi untuk menangani kasus Covid-19, dan menyiapkan segala administrasi yang diminta menteri agar dapat ditetapkan status PSBB. Pemerintah daerah seakan berkejar-kejaran dengan waktu. Di satu sisi ingin cepat menyelamatkan masyarakatnya, di sisi lain harus cepat menyiapkan data yang cukup detail tersebut. Hal ini tentu kurang relevan jika harus diterapkan di tengah pandemi yang semakin meluas. Jika pemerintah pusat dalam hal ini Menteri Kesehatan, ingin menjalankan fungsi kontrol pemberian status PSBB, agar pemerintah daerah tak terkesan berdiri sendiri-sendiri, padahal kita adalah negara kesatuan. Maka mengapa tugas tersebut tak didelegasikan kepada Ketua Gugus Tugas di masing-masing daerah? Bukankah unsur pembentukan Gugus Tugas ditentukan oleh pemerintah pusat sebagaimana Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2622/SJ? Tidak dapatkah tugas tersebut diemban oleh Ketua Gugus Tugas? Atau dalam rangka memperpendek birokrasi dan mempercepat proses, mengapa pemerintah pusat tidak memfungsikan Gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah? Penulis merasa jika dua opsi tersebut diterapkan, maka proses pengajuan PSBB akan semakin mudah, karena pada dasarnya Ketua Gugus Tugas dan Gubernur lah yang bersentuhan langsung dan memahami kondisi riil daerah masing-masing.

F. Dampak Pelayanan Publik

Kurang sigapnya pemerintah pusat yang menimbulkan beragamnya respon pemerintah daerah, secara nyata berdampak pada penyelenggaraan pelayanan publik di daerah. Misalnya pada daerah yang lebih dahulu menyatakan '*local lockdown*', padahal belum ada ketentuan mengenai PSBB dari pemerintah pusat. Hal ini menyebabkan layanan publik menjadi sedikit terhambat karena pemerintah daerah menginstruksikan bekerja dari rumah, sementara instansi penyelenggara pelayanan publik belum menyiapkan instrumen dan cara untuk melayani masyarakat dari rumah. Masyarakat pun kebingungan untuk mengakses layanan, karena belum ada sosialisasi masif atas perubahan cara layanan yang dialihkan kepada sistem *online* (daring), baik melalui sistem aplikasi yang tersedia di masing-masing instansi penyelenggara, maupun melalui whatsapp/sms/telepon, mengingat sebagai upaya mengurangi proses tatap muka dalam memberikan layanan.

Beragamnya sistem pengalihan layanan publik karena kondisi penyebaran Covid-19 menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat sebagai pengguna layanan publik. Tentunya hal ini akan berdampak pada tertunda atau terkendalanya pelayanan publik bagi masyarakat. Padahal pada saat itu (sebelum terbitnya Peraturan Pemerintah tentang PSBB), belum ada satu ketentuan pun yang membolehkan bekerja dari rumah kepada semua instansi pelayanan publik (yang digunakan hanya himbauan dari kepala daerah masing-masing). Juga belum ada ketentuan dan pemberitahuan mengenai pengalihan sistem pelayanan publik secara daring, karena kantor tak lagi memberikan pelayanan secara tatap muka langsung. Sehingga tak sedikit masyarakat yang kecewa karena mendapati kantor layanan publik tutup, namun belum disediakan sarana untuk mengakses layanan dengan cara lain. Hal ini tentu saja bertentangan dengana asas kepastian dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Semoga kedepannya, kondisi penyebaran pandemik Covid-19 dapat menjadi referensi kita dalam konteks

korelasi hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta penyelenggaraan pelayanan publik. Tak dapat dipungkiri dalam kondisi mengurus sebuah negara kesatuan yang gemuk seperti Indonesia, pemerintah pusat butuh waktu untuk mempertimbangkan setiap kebijakan. Namun tak secara otomatis hal tersebut dapat menjadi alasan pemaaf dalam kurang sigapnya mengambil kebijakan, hingga menyebabkan beragamnya respon pemerintah daerah dalam penanganan Covid-19, dan terganggunya penyelenggaraan pelayanan publik di daerah.

G. Kebijakan Di Masa Wabah

Hari ini seluruh masyarakat Indonesia masih menghadapi wabah covid-19/corona. *World Health Organization* (WHO), covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona dan paling baru ditemukan. Virus dan penyakit baru ini tidak diketahui sebelum wabah dimulai di Wuhan, Cina, pada bulan Desember 2019. Untuk menjaga terbatasnya wabah covid-19 di Indonesia, pemerintah pusat dan pemerintah daerah di masing masing provinsi dan kabupaten/kota telah mengambil langkah antisipasi atau kesiapsiagaan agar wabah tidak menelan korban yang lebih besar. Catatannya, langkah demikian harus dibangun secara baik dan sinergis oleh pemerintah.

H. Skema Pengendalian

Seperti yang beredar di media sosial dan media masa, penanganan wabah covid-19 antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah kurang berjalan baik dan sinergis. Contohnya seperti yang terjadi di Papua yang telah menerapkan *lockdown*. Contoh lain, Presiden Joko Widodo menolak usulan Gubernur Anies Baswedan agar DKI Jakarta dikarantina atau *lockdown* untuk menghentikan laju penyebaran wabah covid-19.

Presiden Joko Widodo sedari awal sudah menekankan untuk tidak memberlakukan *lockdown* atau karantina wilayah. Presiden bahkan menegaskan sesuai

amanat undang-undang, *lockdown* atau tidak, adalah sepenuhnya kewenangan pemerintah pusat bukan pemerintah daerah. Resiko *lockdown* mungkin saja menurut pemerintah pusat tidak kecil, keadaan bisa jauh lebih buruk, tidak terkendali hingga korban tetap saja berjatuhan. Alih-alih mengatasi wabah covid-19, contoh *lockdown* di Italia, Prancis, Denmark, dan belakangan India malah menimbulkan masalah baru. Dalam kondisi tersebut pemerintah menyiapkan skema pengendalian dengan menggunakan beberapa peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang tentang Bencana, Undang-Undang tentang Kekarantinaan Kesehatan, dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu Nomor 23 Tahun 1959) tentang Penetapan Keadaan Bahaya. Dalam Perppu yang diterbitkan oleh Presiden Soekarno itu terletak serangkaian peraturan yang memberikan kewenangan kepada Presiden untuk menetapkan status darurat sipil, darurat militer, dan darurat perang. Dalam Perppu itu juga diatur, bahwa penguasa keadaan darurat sipil adalah Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang selaku penguasa Darurat Sipil Pusat. Presiden dapat mengumumkan darurat sipil kalau terjadi situasi-situasi amat genting sebagaimana disebut dalam Pasal 1, "...sehingga dikhawatirkan tidak dapat diatasi oleh alat-alat perlengkapan secara biasa atau ada gejala-gejala yang dapat membahayakan hidup Negara". Masalahnya, mengumumkan darurat sipil sebagaimana disebut dalam Perppu itu kalau situasinya karena kerusakan-kerusakan atau akibat bencana alam, sedangkan wabah covid-19 terkategori bencana non alam. Hukuman atas pelanggaran status darurat sipil dalam Perppu itu tergolong ringan, yakni pidana penjara selama sembilan bulan atau denda Rp. 20.000,-. Bandingkan dengan ancaman hukuman atas pelanggaran serupa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, yakni pidana penjara selama satu tahun atau denda Rp. 100 juta.

Skema pengendalian dengan Perppu itu telah menuai kritik karena dianggap akan menghindarkan pemerintah dari tanggung jawab terhadap warga negaranya. Sebab, jika darurat sipil diberlakukan pemerintah tidak bertanggung jawab atas kebutuhan dasar masyarakat. Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, disebutkan bahwa selama dalam Karantina Wilayah, kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat. Penerapan Darurat Sipil juga bertentangan dengan asas hukum *lex specialis derogat legi generalis*, yakni hukum yang khusus dapat mengenyampingkan hukum yang umum. Undang-Undang tentang Kekarantinaan Kesehatan lebih khusus membahas tentang kesehatan dan lebih sesuai dengan bencana yang dihadapi sekarang dibandingkan dengan Perppu Penetapan Keadaan Bahaya. Belakangan, sebagai pilihan pengendalian, pemerintah menerbitkan PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). PP ini berisi pelaksanaan sebagian isi Undang-Undang tentang Kekarantinaan Kesehatan, khususnya mengenai PSBB, tidak mengenai materi yang lain. Artinya, seperti kebutuhan hidup orang dan makanan hewan ternak masih menjadi tanggung jawab sendiri.

I. Stimulus dan Perlindungan Sosial

Dari pilihan pengendalian tersebut serta memperhatikan kondisi perekonomian masyarakat, Presiden Joko Widodo menggulirkan penundaan cicilan selama setahun dan penurunan bunga untuk kredit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di bawah Rp 10 miliar. Penundaan cicilan selama setahun juga berlaku untuk kredit motor/mobil oleh ojek *online* dan sopir taksi, serta kredit perahu oleh nelayan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sendiri telah menerbitkan Peraturan OJK Nomor 11 Tahun 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019. Namun, isi aturan yang terbit pertengahan Maret lalu ini tidak spesifik seperti yang

disampaikan Presiden Joko Widodo. Dalam aturan itu, bank disebut bisa terlibat dalam memberikan stimulus perekonomian di tengah wabah covid-19, lewat kebijakan penilaian kualitas kredit dan restrukturisasi kredit. Kebijakan ini dapat dilakukan dengan tetap mempertimbangkan prinsip kehati-hatian.

Sedangkan restrukturisasi bisa diberikan kepada debitur, tanpa batasan plafon, setelah maupun sebelum terdampak wabah covid-19. Bentuk restrukturisasi antara lain penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan pokok, pengurangan tunggakan bunga, penambahan fasilitas kredit, dan atau konversi kredit menjadi "Penyertaan Modal Sementara". Kredit berstatus lancar setelah restrukturisasi. Beberapa contoh sektor yang terdampak karena wabah covid-19, seperti pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pertanian, dan pertambangan. Begitu juga mengenai tagihan listrik, Presiden Joko Widodo dikabarkan juga akan memberikan bantuan kepada konsumen 450*Volt Ampere* (VA) berupa pembebasan biaya tagihan. Sedangkan kepada konsumen bersubsidi 900 VA diberikan keringanan tagihan sebesar 50 persen. Kebijakan pemberian keringanan tagihan listrik tersebut sebagai bagian dari perlindungan sosial untuk masyarakat lapisan bawah di tengah wabah covid-19 yang di sebut sebut mulai berlaku selama tiga bulan, yakni bulan April, Mei, dan Juni 2020.

Sama halnya terhadap penundaan cicilan kredit kepada nasabah, pelaksanaan pembebasan dan keringanan tagihan listrik kepada konsumen sepatutnya dilakukan dengan baik, mudah diakses, bebas pungli, transparan, tidak diskriminasi, dan wajar. Caranya, mekanisme yang dibuat tidak mempersulit nasabah dan konsumen, mudah dilaksanakan oleh petugas, dan dilengkapi dengan standar pelayanan. Jika tidak, pelaksanaan yang terjadi bisa sebaliknya, sulit diakses, marak pungli, tertutup, diskriminatif, dan manipulatif. Kalau demikian, maka publik menghadapi kerugian yang lebih besar. Sebab, tidak diterapkannya Undang-Undang tentang Kekarantinaan

Kesehatan, atau berjalannya model *lockdown* ala Indonesia selama ini telah membuat banyak masyarakat mengurung diri di rumah atau sulit produktif. Sudah sewajarnya pemerintah melalui pengawasan terkait ikut mengoptimalkan kebijakan stimulus dan perlindungan sosial agar tepat sasaran dan menyerap banyak pihak yang perlu dibantu. Jangan sampai kebijakan di masa "corona" ini hanya bagus dalam opini namun rendah manfaat. Begitu juga dengan kebijakan lainnya, seperti dana bantuan pra kerja dan bantuan sosial sembako kepada masyarakat

J. Pentingnya Kerja Sama Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Penanganan Covid-19

Menghadapi dampak pandemi global Covid-19, Presiden Joko Widodo mengajak kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah. Sinergi erat antara keduanya amat dibutuhkan untuk mencegah penyebaran lebih lanjut dari Covid-19 hingga ke daerah-daerah. Yang paling penting bagaimana kerja sama antara pemerintah pusat sampai pemerintah daerah yang paling bawah. Dari yang paling atas, presiden, sampai nanti di kepala desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan disebut Presiden dapat dijadikan acuan dan pedoman bagi pemerintah pusat dan daerah agar berada dalam satu garis visi yang sama. Sebelumnya, pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Keppres (Keputusan Presiden) Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang menjadi aturan pelaksanaan dan landasan kebijakan bagi pemerintah dalam menangani dampak Covid-19. Bekerja berdasarkan aturan undang-undang yang ada. Kita bekerja juga karena amanat konstitusi. Jadi pegangannya itu saja. Kalau ada Undang-Undang mengenai Kekarantinaan Kesehatan yang dipakai. Presiden memastikan bahwa langkah-langkah yang kini ditempuh oleh pemerintah merupakan langkah yang sebelumnya telah diperhitungkan dan disesuaikan dengan kondisi yang ada di Indonesia, baik kondisi geografis, demografi, karakter budaya, kedisiplinan, maupun kemampuan fiskal.

Pemerintah bahkan juga telah mempelajari langkah-langkah dan kebijakan yang ditempuh sejumlah negara dalam menangani kasus Covid-19. Kita tidak mengambil jalan yang itu (*lockdown*). Kita aktivitas ekonomi tetap ada, tetapi semua masyarakat harus menjaga jarak. Jaga jarak aman yang paling penting. Disampaikan sejak awal, *social distancing* atau *physical distancing* itu yang paling penting.

BAB 12

RESPON DAN TANTANGAN PENCEGAHAN WABAH COVID 19 DI IDONESIA

A. Respons Berbasis Masyarakat terhadap COVID-19: Ketahanan Indonesia

Pandemi COVID-19 adalah krisis sosial dan ekonomi global terbesar dalam beberapa generasi terakhir. Selama krisis, pemimpin masyarakat dan pemerintah daerah menghadapi tuntutan yang sangat besar. Di saat seperti ini, mereka membutuhkan sistem yang sudah teruji dalam hal dukungan darurat dan bantuan cepat. Program pembangunan berbasis masyarakat (*Community-driven Development Programs* atau CDD), yang menempatkan warga sebagai pusat perancangan terhadap solusi mereka sendiri, memberikan cara cepat dan fleksibel dalam penyediaan dana dan layanan dasar kepada masyarakat paling miskin dan rentan.

Sejumlah organisasi, termasuk *Centers for Disease Control and Prevention* (CDC) dan *World Health Organization*, mengakui peran penting masyarakat dalam merespons pandemi. Pelajaran dari pandemi sebelumnya, termasuk wabah Ebola 2014-2016, menyoroti pentingnya respons sosial terhadap manajemen dan pemulihan krisis untuk melengkapi upaya medis. Dalam kasus COVID-19, kemitraan di antara masyarakat, sistem pelayanan kesehatan, pemerintah daerah, dan sektor swasta berperan penting dalam memperlambat penyebaran, memitigasi dampak, dan mendukung pemulihan warga setempat. Kemitraan ini mendukung perubahan komunikasi dan perilaku untuk pencegahan, menyediakan respons darurat yang cepat dalam jangka pendek, dan mengurangi dampak ekonomi serta membangun ketahanan di masa depan.

Pelaksanaan program CDD Bank Dunia saat ini menyediakan *platform* yang siap mendukung aksi cepat dalam membantu masyarakat paling miskin dan rentan, seiring dengan pemulihan dan ketahanan jangka panjang. Program ini memiliki rekam jejak yang kuat dalam mengirimkan dana dengan cepat dan fleksibel sebagai respons terhadap bencana dan konflik, seperti yang terjadi di Indonesia setelah Tsunami 2004, Filipina setelah Topan Yolanda 2013, dan Afghanistan pasca-2002. Di banyak negara, program CDD merupakan satu-satunya jaring pengaman yang bisa menjangkau kelompok-kelompok terpencil dan rentan secara cepat dan kredibel. Untuk merespons berbagai tantangan mendesak akibat pandemi COVID-19, pemerintah Indonesia menggunakan program operasional yang telah teruji secara cepat mengatasi kebutuhan yang paling krusial.

Indonesia merupakan kekuatan ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan memiliki sejarah selama 21 tahun menggunakan pendekatan CDD, seperti Proyek Pengembangan Kecamatan (KDP) dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Pada tahun 2014, sistem CDD dilembagakan dalam pemerintahan di bawah Undang-undang Desa, memberikan kewenangan transfer dana ke desa-desa dengan tujuan mengurangi kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup melalui pembangunan dan pemberdayaan berbasis masyarakat. Dampaknya, desa berhasil meningkatkan anggaran, otonomi, dan wewenang untuk membiayai pembangunan infrastruktur lokal, memberikan layanan dasar, dan melaksanakan proyek-proyek untuk kesejahteraan masyarakat. Sebagai negara kepulauan yang beraneka ragam, dengan lebih dari 300 kelompok etnis, Indonesia telah mencapai banyak kemajuan dalam pengurangan kemiskinan. Indonesia berhasil menurunkan tingkat kemiskinan lebih dari setengahnya sejak 1999, menjadi 9,4% pada 2019. Meskipun telah membuat kemajuan, masih terdapat tantangan yang signifikan dalam mencapai tujuan pembangunan Indonesia. Dari sekitar 267 juta penduduk,

kira-kira 25,1 juta di antaranya masih hidup di bawah garis kemiskinan. Berdasarkan data Maret 2019, sekitar seperlima dari seluruh penduduk masih rentan jatuh miskin.

Saat Indonesia masih menghadapi tantangan-tantangan tersebut, pandemi COVID-19 memunculkan beberapa tantangan baru. Pertama, pengangguran di daerah perkotaan meningkat sehingga terjadi perpindahan massa ke daerah perdesaan yang bertepatan dengan liburan Idul Fitri. Hal ini dapat menyebabkan penyebaran virus dan dampak ganda bagi ekonomi perdesaan. Daerah perdesaan juga mengalami berkurangnya pengiriman uang dari perkotaan akibat migrasi tersebut. Semua hal tersebut mengakibatkan hilangnya layanan dasar yang mengarah pada memburuknya kesehatan, pendidikan, kematian ibu, dan stunting. Untuk merespons berbagai tantangan mendesak akibat pandemi COVID-19, pemerintah Indonesia menggunakan program operasional yang telah teruji secara cepat mengatasi kebutuhan yang paling krusial. Bekerja sama dengan pemerintah, Bank Dunia mendukung proyek Penguatan Kelembagaan untuk Peningkatan Layanan Desa yang telah diadaptasi untuk memitigasi dampak sosial-ekonomi dari pandemi COVID-19 dan membantu meminimalkan penyebaran virus.

Tim pembangunan sosial Bank Dunia mendukung pemerintah untuk meningkatkan implementasi Undang-undang Desa. Dukungan ini akan membantu meningkatkan efektivitas pengeluaran anggaran hampir \$ 8 miliar melalui transfer fiskal ke desa-desa, yang dilaksanakan di 74.954 desa dan menjangkau hampir 176 juta penduduk Indonesia. Penggunaan sistem untuk merespons pandemi COVID-19 ini, merupakan prioritas utama dalam kemitraan dengan pemerintah. Saat ini, desa-desa sedang beradaptasi untuk memenuhi tuntutan sosial akibat COVID-19. Respons tersebut bertujuan untuk menggunakan dana desa sebagai dukungan pendapatan, informasi kesehatan, bantuan penargetan masyarakat untuk mengidentifikasi “orang miskin baru” dan rentan, serta pemantauan daerah terpencil. Program baru mengenai transfer dana tunai tanpa

syarat ini menggunakan mekanisme penargetan berbasis masyarakat. Program ini akan menjangkau sekitar 12 juta rumah tangga, yang mana jika tidak menggunakan program tersebut, tidak akan tercapai.

Selain dana, desa-desa di garis depan perlu dilengkapi dengan informasi dan sistem untuk meningkatkan respons berbasis masyarakat. Dengan informasi palsu yang menjadi hambatan nyata, desa akan kewalahan jika tidak tersedia sistem pemantauan yang efektif. Pemerintah juga menghadapi kesulitan dalam menyebarkan informasi tentang COVID-19 karena panduan dan program yang berubah dengan cepat. Untuk merespons beberapa tantangan ini, digunakan piranti digital baru, yaitu aplikasi *Villages Against COVID-19* untuk mendukung desa-desa di garis depan. Aplikasi ini berfungsi sebagai alat pengumpulan data dan pelacakan di desa-desa untuk memantau data kesehatan, kehilangan pekerjaan, kemiskinan, dan bantuan sosial berbasis mingguan dan bulanan. Aplikasi ini juga akan membantu menunjukkan tren, mengidentifikasi secara tepat terhadap wabah, dan membantu menginformasikan respons masyarakat.

Untuk mengatasi tantangan seputar pengangguran, program ini juga mendukung skema *cash for work* yang dikembangkan seiring dengan investasi infrastruktur, seperti jalan lokal, air bersih, dan bangunan. Dana desa juga akan terus mendukung investasi lokal dan pemberian layanan, seperti sanitasi ruang publik, mendukung ruang isolasi lokal dan distribusi masker, serta memastikan keberlanjutan layanan kesehatan dan pendidikan di lapangan. Untuk mengatasi tantangan perkotaan terkait dampak COVID-19, Program National Slum Upgrading (NSUP), yang menargetkan 6.000 permukiman kumuh melalui hibah infrastruktur primer dan infrastruktur masyarakat, juga telah disesuaikan. Proyek ini dibangun berdasarkan pengalaman CDD lebih dari dua dekade di daerah perkotaan melalui Proyek Kemiskinan Perkotaan dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Perkotaan (PNPM - Perkotaan), termasuk jaringan

sekitar 11.000 lembaga masyarakat di lapangan. Hingga saat ini, proyek ini menerapkan "pekerjaan padat karya," menciptakan 1,2 juta hari kerja dan membantu lebih dari 1 juta penduduk di 400 wilayah masyarakat termiskin. Sumber daya proyek yang tersisa sedang dialokasikan kembali sebagai respons terhadap COVID-19, yang akan membantu menghasilkan tambahan 2 juta hari kerja, memperluas layanan air bersih, sanitasi, kebersihan, dan menciptakan aset infrastruktur produktif.

Dalam NSUP, pengambilan keputusan akan dilakukan di tingkat masyarakat dan pendekatan baru berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK) akan memperkuat sistem pemantauan jarak jauh untuk melacak efektivitas program *cash for works*; dan mengkaji dampak sosial dan ekonomi COVID19 di daerah perkotaan. Program ini dapat membantu menginformasikan keputusan tentang pelokalan wabah dan memberikan respons dengan cepat. Ini adalah beberapa cara Bank Dunia mengadaptasi program pembangunan berbasis masyarakat untuk membantu Indonesia merespons COVID-19. Cara-cara ini tidak hanya berperan penting dalam tahap awal respons, tetapi juga meletakkan dasar untuk masa depan yang lebih kuat dan tangguh.

B. Saling Memperkuat Menghadapi Covid-19

Pemerintah telah menyatakan wabah virus corona sebagai bencana nasional. Maka, harus ada upaya gotong royong, sinergi sumber daya dan strategi dari semua komponen bangsa menghadapi rasa cemas yang dirasakan masyarakat internasional dan tentu masyarakat Indonesia. Apalagi, dari hari ke hari, jumlah kasus positif Covid-19 terus meningkat signifikan. Catatan ini telah menimbulkan kepanikan dan silang pendapat yang ditimbulkan di luar konteks penanganan virus itu sendiri, bahkan menjadi komoditas politik dan ekonomi. Mari hilangkan pertikaian, politisasi, dan saling nyinyir seperti saat menghadapi konstitusi politik. Perang melawan virus corona adalah arena perjuangan kemanusiaan, bukan arena politik

maupun ekonomi. Kita kecam oknum dari unsur mana pun yang menjadikan bencana Covid-19 sebagai komoditas politik maupun komoditas ekonomi, seperti yang dilakukan oleh oknum yang tidak memiliki empati kemanusiaan dengan memanfaatkan kepanikan masyarakat. Mari belajar dari China dan Italia dalam perang melawan Covid-19. Ketika dihantam badai Covid-19, masyarakat China saling menguatkan patuh pada instruksi pihak otoritas. Dan, setelah berhasil melokalisasi virus corona, masyarakat China khususnya Wuhan memberi penghormatan yang tulus kepada tenaga medis, petugas keamanan dan para relawan yang telah berjuang bersama dalam melawan virus corona. Mereka memberikan bermacam-macam hadiah dengan tulus. Bagaimana dengan Italia dalam kondisi krisis pangan, krisis alat kesehatan, dan obat-obatan melawan corona? Mereka juga bersemangat dari rumahnya masing-masing menyanyikan lagu lagu heroik dan mengibarkan bendera negara lewat jendela rumahnya. Masyarakat Italia berusaha saling menguatkan dengan pemerintahnya sekaligus memberikan pesan pada dunia bahwa "Kami bersama pemerintah melawan virus corona". World Health Organization (WHO) sendiri telah menetapkan penyakit akibat virus ini sebagai pandemi global. Artinya, penularan dan ancamannya telah melampaui batas-batas antarnegara. Kewaspadaan berbagai negara dan masyarakat internasional pun semakin memuncak. Secara global, total kasus virus corona telah melampaui 500.000 kasus. Di Indonesia, jumlah pasien Covid-19 hingga 27 Maret 2020 sudah menembus seribu kasus. Mari jadikan musibah meluasnya pandemi virus corona sebagai momentum untuk memperkuat solidaritas sosial sesama anak bangsa dalam menghadapi beragam bencana. Indonesia adalah negara yang memiliki kekayaan alam dan keanekaragaman budaya yang harus disyukuri. Sekaligus menjadi negara paling rawan terhadap bencana di dunia berdasar data yang dikeluarkan oleh badan PBB untuk Strategi Internasional Pengurangan Risiko Bencana (UN-ISDR). Tingginya posisi Indonesia ini dihitung dari jumlah manusia yang terancam

risiko kehilangan nyawa ketika terjadi bencana alam, non-alam dan bencana sosial, sementara pemahaman dan kemampuan mitigasinya masih terbatas. Pemerintah pusat dan daerah telah mengeluarkan banyak kebijakan demi mencegah penyebaran Covid-19. Salah satu kebijakan yang dapat diambil adalah meliburkan sementara proses belajar-mengajar di sekolah dan universitas serta mengimbau mereka belajar di rumah. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo, yang ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, mendesak semua pihak bekerja sama dalam mempercepat upaya penanganan virus corona. Sebab, virus corona saat ini adalah musuh bersama yang perlu ditekan penyebarannya. Saat ini adalah waktu yang tepat melakukan aksi bela negara. Memandang virus ini sebagai musuh bersama yang harus dihadapi bersama-sama. Saat ini tak perlu saling hujat karena hal tersebut tak ada manfaatnya dan hanya buang energi, imunitas tubuh pun berkurang. Ancaman lain yang dihadapi oleh pemerintah adalah merebaknya hoaks terkait virus corona yang semakin banyak beredar di media sosial. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah menemukan 196 hoaks dan disinformasi seputar virus corona di Indonesia yang telah menimbulkan kepanikan masyarakat. Menjadi relawan kemanusiaan Sejalan dengan arahan Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid19, saat ini adalah momentum kita sebagai warga negara yang memiliki kemampuan kesehatan fisik, pengetahuan, dan keterampilan untuk menjadi relawan kemanusiaan. Ini merupakan wujud aksi bela negara, minimal di lingkungannya masing-masing. Marilah bersatu-padu bersama pemerintah untuk saling memberikan semangat dan membantu memutus mata rantai penyebaran virus, khususnya pada kelompok rentan, seperti lansia, balita, wanita hamil, dan penderita penyakit bawaan. Caranya antara lain dengan memberikan sosialisasi yang tepat, membagikan masker dan makanan bergizi bagi yang membutuhkan. Kita juga dapat membagikan masker kepada

warga yang mengalami gejala flu dan demam, berbagai makanan ke masyarakat yang kurang sejahtera, agar imunitas diri meningkat. Saat ini saatnya kita semua untuk hadirkan empati, terutama kepada sekeliling kita yang mengalami kepanikan, dengan memberi informasi yang akurat. Perkuat silaturahmi dengan warga sekitar yang pada saat tertentu sulit karena kesibukan masing-masing. Momentum anjuran kerja dari rumah bisa dimanfaatkan untuk saling sapa menyapa, yang dihayati sebagai suatu kebajikan yang harus dihadirkan saat kita semua terutama saat menghadapi bencana. Relawan adalah pembangun solidaritas untuk mewujudkan rasa kebersamaan untuk saling menguatkan. Relawan atau *volunteer*, yaitu orang yang memiliki keterpanggilan hati untuk mengambil peran yang konstruktif pada kegiatan yang dikoordinasikan oleh institusi yang memiliki otoritas. David G Myers memaknai pengertian relawan dalam bukunya berjudul *Social Psychology*, yaitu orang yang memiliki hasrat membantu sesama tanpa mengharapkan imbalan. Ini sejalan dengan konsep altruisme atau biasa kita sebut sebagai "ikhlas" dan "rela". Kita harus percaya bahwa bencana Covid-19 akan mudah diatasi jika ada lebih banyak lagi relawan kemanusiaan yang terlatih dan mau bergerak secara kolaboratif dengan pihak-pihak terkait, tidak jalan sendiri.

Dunia saat ini sedang menghadapi pandemi yang disebabkan oleh SARS-CoV-2 (virus Corona) dan infeksi yang disebut COVID-19. Infeksi virus ini awalnya ditemukan di Wuhan, Cina pada Desember 2019 dan telah menyebar dengan cepat ke berbagai belahan dunia. Pandemi ini mempengaruhi berbagai perubahan di sektor sosial ekonomi seluruh wilayah yang terjangkau, dan bukan hanya Cina saja. Berdasarkan data yang dilansir dari Satgas COVID-19, tertanggal 21 April 2020, sudah terkonfirmasi bahwa COVID-19 telah menginfeksi 6760 orang di Indonesia dengan angka kematian sebesar 590 orang dan 747 orang dinyatakan telah berhasil sembuh.

Di awal kemunculannya, virus ini mendapat beragam respons yang muncul dari masyarakat Indonesia.

Sebagian mulai berhati-hati dan menerapkan pola hidup sehat, tetapi lebih banyak yang tidak peduli dan terkesan meremehkan; bahkan menjadikan virus ini sebagai bahan candaan. Bukan hanya masyarakat biasa, pejabat-pejabat pun banyak yang meremehkan keberadaan virus ini dan tidak melakukan persiapan maupun antisipasi munculnya wabah ini di Indonesia. Bahkan ketika COVID-19 mulai menyebar dengan cepat ke berbagai daerah dan beberapa negara telah menutup akses keluar masuk, pemerintah dan warga Indonesia masih terkesan santai dan kurang melakukan tindakan pencegahan terhadap virus ini.

Sebenarnya, orang-orang yang bersikap masa bodoh dengan kemunculan virus Corona jumlahnya lebih sedikit daripada orang yang peduli dengan pencegahan virus ini. Tetapi, ketidakpedulian mereka itulah yang kemudian mempercepat penyebaran virus. Orang-orang dalam kelompok ini biasanya adalah orang-orang yang merasa dirinya kebal dan orang yang menganggap bahwa sains tidak sepenuhnya benar (Ghaemi, 2020).

Ketidakpastian, kebingungan, dan keadaan darurat yang diakibatkan oleh virus Corona dapat menjadi stressor bagi banyak orang. Ketidakpastian dalam mengetahui kapan wabah akan berakhir membuat banyak golongan masyarakat terutama golongan menengah ke bawah bingung memikirkan nasib mereka. Kehidupan yang berjalan seperti biasa tanpa adanya mata pencaharian membuat mereka kesulitan memenuhi kebutuhan hidup. Keberadaan virus Corona yang mengancam setiap orang berpeluang menjadi stressor bagi sebagian besar orang, dan dampaknya bisa jadi sama parahnya dengan dampak yang ditimbulkan jika terinfeksi virus Corona itu sendiri (Taylor, 2019).

Ketakutan akan kematian merupakan konflik psikologis dasar pada manusia (Knoll, 2020) dan sesuai dengan Teori Manajemen Teror, ketakutan akan kematian yang tidak pasti datangnya membuat manusia melakukan berbagai hal untuk mempertahankan kehidupannya (Greenberg, Pyszczynski, Solomon, 1986). Adanya

COVID-19 tentu membuat teror yang dirasakan semakin intens. Tentunya, ada beberapa hal positif dan negatif yang dilakukan orang-orang untuk bertahan hidup.

Untuk mengurangi kecemasan di masyarakat, sudah sepatutnya kita melakukan berbagai hal untuk meningkatkan optimisme masyarakat di tengah pandemi ini. Masyarakat yang masih mampu mencukupi kebutuhan hidupnya banyak yang meningkatkan kepeduliannya dengan berkontribusi untuk membantu golongan yang tidak mampu dengan cara melakukan penggalangan dana, melakukan donasi. Ada juga kelompok-kelompok lain yang membantu menjahitkan APD untuk tenaga kesehatan serta memproduksi masker dalam jumlah besar untuk dibagikan kepada orang-orang yang masih harus bekerja di luar. Karena adanya virus Corona ini, masyarakat juga menjadi lebih peduli dan menjalankan pola hidup yang sehat. Hal-hal tersebut merupakan sebagian kecil upaya pertahanan diri yang dilakukan oleh masyarakat untuk menghindari infeksi COVID-19.

<https://www.bbc.com/indonesia/vert-cap-51887198>

COVID-19 juga mendorong sebagian orang untuk bertindak secara salah dalam rangka bertahan hidup. Fenomena panic buying merupakan salah satu contohnya. Tindakan panic buying dan menimbun barang-barang kebutuhan sehari-hari merupakan bentuk ketidakmampuan sebagian dari kita untuk mentoleransi stress yang timbul karena ketidakpastian yang muncul akibat adanya virus Corona. Isolasi diri yang dilakukan sebagai tindakan preventif terhadap infeksi COVID-19 juga merupakan faktor pendorong psikologis sebagian dari kita akhirnya melakukan penimbunan (Norberg & Rucker, 2020).

Seperti yang telah diketahui, alasan mereka melakukan penimbunan adalah untuk berjaga-jaga, tetapi mereka malah terdorong untuk membeli barang-barang yang tidak diperlukan. Padahal, tindakan seperti itu akan merugikan kelompok masyarakat lain yang tidak mampu untuk berbelanja dalam skala besar sehingga mereka akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Fenomena

panic buying juga kemudian dimanfaatkan oleh sebagian pihak yang hanya mencari keuntungan dengan cara menaikkan harga ke angka yang tidak rasional dan juga melakukan penipuan yang biasanya dilakukan melalui toko online.

Untuk mengontrol perilaku tersebut, kita harus berusaha untuk tetap berpikir rasional walaupun sulit dilakukan di saat seperti ini. Dalam situasi seperti ini, kita dapat menggunakan metode Cognitive Behavioural Therapy (CBT) untuk menghindari pengambilan keputusan yang didasarkan pada emosi sesaat dan tindakan yang terburu-terburu (Norberg & Rucker, 2020). Metode ini dapat membantu kita untuk meningkatkan kemampuan mengatur emosi, membantu kita untuk tidak terjebak dalam pemikiran yang salah, dan mengembangkan kemampuan kita dalam memecahkan suatu masalah (Beck, 2011 & Benjamin, dkk 2011). Metode CBT bisa membantu kita untuk mengurangi kecemasan serta rasa takut yang timbul karena adanya pandemi COVID-19 ini.

Contoh aplikasi metode ini dapat kita terapkan untuk menghindari panic buying dengan cara membuat daftar barang yang memang kita perlukan untuk bertahan hidup selama 2-3 minggu ke depan. Selain itu, kita bisa menggunakan metode ini untuk menganalisis berita-berita yang kita terima terkait COVID-19 ini, agar kita tidak mudah termakan hoax yang akan meningkatkan kecemasan kita.

Pandemi COVID-19 telah merubah berbagai aspek dalam keseharian kita. Kecemasan dan rasa tidak aman yang dialami sebagian besar dari kita harus bisa disikapi dengan rasional agar kita bisa bertahan hidup dan juga membantu orang lain bertahan. Penerapan pola hidup sehat dan mengikuti anjuran pemerintah juga harus kita lakukan sebagai upaya mencegah penyebaran COVID-19.

BAB 13

PERSOALAN YANG MUNCUL SEJAK WABAH CORONA

A. Jusuf Kalla: Ada Tiga Masalah yang Harus Diselesaikan Pemerintah Terkait Covid-19

Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) memberikan tiga catatan yang menjadi pokok permasalahan pemerintah dalam menangani penyebaran virus corona atau Covid-19 saat ini, ada tiga masalah pokok yang harus diselesaikan. Catatan pertama, mengenai waktu. Menurut Kalla, saat ini waktu menjadi sangat berharga untuk menyelamatkan bangsa. Kedua, koordinasi yang baik dalam menangani penyebaran corona. Ketiga, ketersediaan logistik yang teratur di tengah pandemi. Terkait ketersediaan logistik, kata Kalla, pemerintah dapat belajar dari peristiwa krisis 1998. Di mana tidak stabilnya situasi politik dibarengi dengan pergeseran ekonomi akan menimbulkan pergerakan massa. Kalla mengatakan, pemerintah bisa belajar dari pengalaman tersebut agar sigap menyediakan logistik dan tidak terjadi kekacauan. Jangan dilambat-lambat, jangan kalau terjadi chaos baru dibagikan, karena itu sudah terlambat, maka sebelum chaos kita harus membagikan.

Selain itu, JK menilai bahwa permasalahan saat ini bukan saja menjadi tanggung jawab pemerintah. Melainkan semua elemen bangsa harus turun tangan menangani permasalahan penyebaran corona. Karena itu, ketika pemerintah membuat sebuah aturan, maka masyarakat harus memahami, karena kebijakan yang dikeluarkan demi kebaikan bersama. Masyarakat harus patuh dengan yang dilakukan pemerintah. Adapun berdasarkan data pemerintah, terdapat 1.790 kasus positif corona. Jumlah ini bertambah setelah diketahui ada 113 kasus baru dalam 24 jam terakhir. Sedangkan jumlah kematian mencapai 170

kasus. Di mana jumlah kematian bertambah 13 kasus dalam 24 jam terakhir

B. Pandemi Covid-19 dan Masalah Sosial

Covid-19 atau yang lebih dikenal dengan virus korona saat ini telah menjadi ancaman global dan sudah cukup terlambat untuk diantisipasi karena penyebarannya yang sudah semakin masif. Di wilayah Sumatera Barat sendiri tercatat 17 kasus terkonfirmasi positif, dengan 73 orang pasien dalam pengawasan per tanggal 5 April 2020 (website pemantauan korona Pemprov Sumbar). Di media sosial, khususnya twitter, terjadi perdebatan antara kelompok yang menyerukan social distancing dengan lockdown. Social distancing adalah metode pencegahan penyebaran Covid-19 dengan membatasi interaksi sosial individu. Sedangkan metode lockdown berarti penguncian atau pengarangtinaan suatu wilayah dengan menutup akses masuk maupun keluar. Beberapa provinsi di Indonesia sudah menerapkan metode lockdown secara lokal.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah resmi mengubah istilah social distancing menjadi physical distancing. Hal ini dimaksudkan agar interaksi antar masyarakat tetap berlangsung walaupun berjauhan fisik. Tentu hal ini lebih baik, mengingat dalam konsep social distancing telah membatasi interaksi sosial masyarakat. Dalam penerapan physical distancing masyarakat diminta agar tetap terhubung menjalin interaksi sosial dengan cara yang lain. Permasalahan penyebaran virus Covid-19 tidak hanya terkait masalah kesehatan. Lebih dari itu Covid-19 juga merupakan masalah sosial. Masalah sosial merupakan suatu kondisi negatif yang dihadapi oleh masyarakat. Solusinya dapat diambil oleh negara dan juga oleh masyarakat itu sendiri yang di dalamnya terdapat tokoh masyarakat, cendekiawan, ataupun para ilmuwan. Namun, tidak semua masalah yang dihadapi oleh masyarakat dapat dikategorikan sebagai masalah sosial.

Ada empat pertimbangan suatu masalah dapat dikatakan sebagai masalah sosial. Pertama, bahwa masalah

itu berpotensi memantik api kerusakan di berbagai sektor, baik fisik maupun psikis individu atau pun kelompok masyarakat. Kedua, masalah itu melanggar satu atau lebih nilai/standar yang dimiliki oleh sebagian besar masyarakat. Ketiga, masalah itu terjadi dalam keadaan yang terus menerus. Keempat, masalah tersebut membutuhkan suatu solusi berdasarkan evaluasi dari berbagai pihak (Parillo, 2002).

Dalam menganalisis suatu permasalahan sosial ada beberapa perspektif yang dapat dijadikan sebagai pisau analisa, seperti patologi sosial, disorganisasi sosial dan konflik nilai. Ketiganya dapat kita gunakan dalam menganalisis permasalahan sosial yang timbul oleh penyebaran virus Covid-19 ini. Patologi sosial memposisikan masyarakat layaknya organisme hidup, sehingga bila salah satu bagian dari organisme hidup tersebut sakit maka kemungkinan besar akan terjadi pula penyakit pada organ lainnya. Berangkat dari perspektif tersebut, dengan adanya penyebaran virus Covid-19 telah mengakibatkan banyak struktur-struktur sosial yang berkurang bahkan hilang fungsinya. Misalnya kegiatan di sekolah, perguruan tinggi dan tempat ibadah ditiadakan karena dinilai mengumpulkan orang dan berpotensi menyebarkan virus. Di Sumatera Barat sendiri semua aktivitas belajar mengajar telah dihentikan sementara dan diganti dengan pembelajaran jarak jauh.

Pemerintah baik pusat maupun provinsi telah membuat peraturan agar masyarakat menerapkan physical distancing demi mencegah penularan, tetapi ironisnya, masih banyak masyarakat yang tidak mematuhi larangan tersebut. Masyarakat masih banyak yang berkeliaran untuk hal yang tidak penting dan mendesak. Hal ini adalah suatu pelanggaran yang kemudian dapat menjadi patologi dalam masyarakat. Kemudian kita dapat menggunakan perspektif disorganisasi sosial untuk melihat tidak berfungsinya aturan social di dalam masyarakat. Disorganisasi social telah mengakibatkan berkurangnya kekuatan mengikat baik bagi koordinasi antar bagian maupun dalam melakukan kontrol

terhadap perilaku individu (Soetomo, 2008). Pemahaman ini digunakan dalam konteks perubahan system. Fenomena banyaknya perantau yang bekerja di daerah zona merah yang kemudian pulang kampung ke wilayah Sumatera Barat berpotensi mengakibatkan terjadinya disorganisasi sosial. Tercatat para perantau yang sudah pulang kampung telah mencapai angka 19.000 dan terbanyak melalui jalur darat (ANTARA Sumbar).

Pemerintah Sumatera Barat sendiri sudah mengeluarkan edaran agar perantau tidak melakukan kegiatan mudik awal ini. Namun, edaran ini dianggap seperti angin lalu saja. Sampai kemudian ditemukan pasien positif korona meninggal yang ditengarai pulang dari Jakarta, yang merupakan zona merah penyebaran virus ini. Sejalan dengan edaran tersebut, pemerintah daerah juga telah membuat regulasi agar setiap Orang Dalam Pemantauan (ODP) melakukan isolasi diri. Isolasi diri tersebut tidak hanya secara mandiri tetapi juga pemerintah daerah menyiapkan sejumlah tempat sebagai isolasi. Namun faktanya di lapangan, telah terjadi disorganisasi sosial di Pasaman Barat dimana masyarakat menolak daerahnya dijadikan sebagai tempat isolasi. Berdasarkan pandangan ini, konflik sosial muncul di dalam hubungan kelompok sosial itu sendiri.

Pandangan yang terakhir menggunakan perspektif konflik nilai yang terjadi jika dua atau lebih kelompok masyarakat saling bertemu dan berkompetisi (Julian, 1986). Dalam hal ini, konflik nilai terjadi antara ODP, PDP dan bahkan orang yang positif dengan masyarakat yang sehat pada umumnya. Bibitnya sudah mulai tampak dengan adanya saling mencurigai antar anggota masyarakat. Pada tingkatan tertentu tanpa kita sadari telah mengakibatkan polarisasi di dalam masyarakat. Hal ini tentunya akan membahayakan bagi persatuan bangsa dalam menghadapi masa pandemi ini. Pada saat ini, semboyan “bersatu kita teguh” tidak lagi tepat digunakan, namun “bercerai justru kita akan teguh”. Marilah kita bersama menaati himbauan pemerintah untuk bersabar dan melakukan physical

distancing agar terhindar dari penyakit ini sehingga tidak menimbulkan lebih banyak lagi masalah sosial.

C. Pandemi Corona: Masalah Kesehatan, Sosial Dan Ekonomi

VIRUS Corona yang dikabarkan bermula dari Wuhan, Hubei, Tiongkok, telah menyebar ke lebih 200 negara, termasuk Indonesia. Pengumuman kasus virus corona pertama kali oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, 2 Maret 2020, di mana saat itu di Indonesia baru ada dua orang positif terjangkit corona virus disease (covid-19). Sejak diumumkan presiden, sampai saat ini pasien positif terjangkit covid-19 terus bertambah. Dua minggu setelah pengumuman, pasien positif corona 134 orang, meninggal 5 orang. Jumlah pasien positif bertambah menjadi 1.790 orang, 170 meninggal dan 112 sembuh, sebulan kemudian. Satu setengah bulan kemudian, pasien positif 4.472 orang, 496 meninggal dan 548 sembuh. Dengan bertambahnya pasien terjangkit virus corona, pemerintah menetapkan covid-19 sebagai bencana nasional. Itu dituangkan di Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Covid-19 Sebagai Bencana Nasional.

Setidaknya, ada tiga poin penting di Keppres yang mulai diberlakukan 13 April 2020 itu. Pertama, bencana nonalam yang diakibatkan penyebaran covid-19 adalah bencana nasional. Kedua, Keppres mengatur penanggulangan bencana nasional akibat covid-19 dan dilaksanakan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, sesuai Keppres Nomor 7/2020, sebagaimana diubah dalam Keppres Nomor 9/2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 melalui sinergi antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Gugus Tugas diketuai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo dibantu dua wakil, yakni Asisten Operasi Panglima TNI dan Asisten Operasi Kapolri. Ketiga, presiden menetapkan bahwa gubernur, bupati, dan

wali kota sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di daerah. Sehingga, dalam menetapkan kebijakan, kepala daerah harus memperhatikan kebijakan pemerintah pusat terkait penanganan covid-19.

Bencana nasional nonalam covid-19 berdampak pada keresahan, kekwatiran dan ketakutan masyarakat dari ancaman gangguan kesehatan karena terinfeksi covid-19 bahkan ancaman jiwa, di mana puluhan ribu jiwa berpotensi tertular. Kekawatiran dan ketakutan semakin bertambah setelah penetapan status covid-19 sebagai bencana nonalam yang ditindaklanjuti pemerintah dengan membuat kebijakan perlunya melakukan social distancing, physical distancing, dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang merupakan respon dari kedaruratan kesehatan masyarakat. PSBB dimaksudkan sebagai upaya mencegah meluasnya penyebaran penyakit, kedaruratan kesehatan masyarakat yang sedang terjadi antar orang di suatu wilayah tertentu, yang meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.

Di sisi lain, pemberlakuan social distancing, physical distancing, hingga PSBB berdampak pada masalah sosial dan ekonomi di masyarakat. Dimana, sebagian masyarakat kehilangan pendapatan, tidak dapat bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum, terutama rumah tangga miskin dan rentan serta sektor informal. Daya beli dan konsumsi masyarakat turun. Selain berdampak bagi rumah tangga, pandemi corona juga berdampak pada UMKM, yang tidak dapat melakukan kegiatan usaha dan terganggu kemampuannya dalam memenuhi kewajiban kredit sehingga kredit bermasalah atau NPL perbankan bagi UMKM bisa meningkat signifikan, yang berpotensi makin memperburuk kondisi perekonomian. Lebih luas lagi, pandemi corona juga berdampak pada korporasi, dimana sektor korporasi terganggu aktivitas ekonominya. Yang paling rentan adalah manufaktur, perdagangan, transportasi dan akomodasi (restoran dan perhotelan). Gangguan aktivitas bisnis akan

menurunkan kinerja bisnis, melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK), dan bahkan mengalami ancaman kebangkrutan. Dampak pandemi corona juga terlihat di sektor keuangan, dimana aktivitas ekonomi dan dunia usaha memburuk yang merembet ke sektor keuangan. Perbankan dan lembaga pembiayaan berpotensi mengalami persoalan likuiditas dan insolvency, depresiasi rupiah, volatilitas pasar keuangan dan *capital flight*.

Presiden Joko Widodo menegaskan, pandemi covid-19 tak hanya terkait kesehatan dan keselamatan masyarakat, namun juga dampak ekonomi yang mengikutinya. Bukan hanya jatuhnya nilai tukar dan pasar saham, ekonomi riil juga terdampak dari pandemi ini. Berbagai kebijakan pemerintah telah diluncurkan untuk mengatasi virus corona. Kebijakan di bidang kesehatan dituangkan dalam Keppres No. 7/2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), disusul Keppres No. 9/2020 tentang perubahan struktural. Melalui Keppres itu, Presiden Jokowi menyalurkan kewenangan pemberian izin edar dan impor alat kesehatan kepada Ketua Pelaksana Gugus Tugas, yakni Ketua Badan Nasional Penanggulangan Bencana Doni Monardo. Kewenangan berbentuk mandat pemberian pengecualian izin tata niaga impor alat kesehatan terkait covid-19.

Terkait dukungan pemerintah di bidang kesehatan, anggaran Rp 75 triliun dialokasikan untuk perlindungan tenaga kesehatan, seperti pengadaan alat pelindung diri (APD). Anggaran itu juga digunakan untuk pembelian alat-alat kesehatan yang dibutuhkan, seperti alat uji coba, reagen, ventilator, handsanitizer, dan lainnya. Selain itu anggaran juga untuk memperbaiki rumah sakit rujukan covid-19, termasuk Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta. Insentif dokter, santunan kematian tenaga medis sebesar Rp 300 juta, dukungan tenaga medis, serta penanganan kesehatan lainnya juga diambilkan dari anggaran itu. Dalam upaya mengatasi masalah sosial di masyarakat seperti pengangguran, PHK, dan daya beli yang rendah, berbagai

kebijakan pemerintah juga telah dinyatakan. Pemerintah telah memastikan jaring pengaman ekonomi selama pandemi virus corona. Kebijakan ini difokuskan untuk pekerja informal dan pemilik usaha mikro kecil menengah (UMKM). Sejumlah program ekonomi dilakukan, antara lain menambah penerima Program Keluarga Harapan dari Kementerian Sosial, dari 9,2 juta menjadi 10 juta orang. Besaran bantuan yang diterimakan naik 25%. Ibu hamil bakal menerima Rp 3 juta per tahun dari yang sebelumnya Rp 2 juta. Kartu sembako, jumlah penerimanya juga dinaikan dari 15,2 juta menjadi 20 juta orang. Nilainya naik 30 persen, dari Rp150 menjadi Rp200 ribu. Semua ini akan diberikan selama sembilan bulan. Kartu prakerja, anggarannya dinaikan dari Rp 10 triliun menjadi Rp 20 triliun. Jumlah penerima manfaat menjadi 5,6 juta orang, terutama pekerja informal serta pelaku UMKM yang terdampak. Nilai manfaat Rp 650 ribu sampai Rp 1 juta perbulan, selama empat bulan.

Untuk meringankan perekonomian masyarakat, pemerintah telah membebaskan biaya pelanggan listrik 400 VA selama 3 bulan ke depan yaitu April, Mei, dan Juni 2020, yang jumlahnya sekitar 24 juta pelanggan. Bagi pelanggan listrik 900 VA mendapat keringanan potongan harga sebesar 50 persen selama periode yang sama. Saat ini jumlah pelanggan listrik 900 VA sekitar 7 juta pelanggan. Selain itu pemerintah menambah insentif perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) hingga Rp 175.000. Pemerintah juga memberi dukungan logistik kebutuhan pokok (sembako) dengan alokasi anggaran Rp 25 triliun. Kebijakan perlindungan sosial yang lain, Presiden Jokowi memerintahkan seluruh menteri, gubernur dan wali kota memangkas rencana belanja yang bukan belanja prioritas di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Jokowi meminta pusat dan daerah untuk mengalokasikan ulang anggarannya guna mempercepat pengentasan dampak corona, baik dari sisi kesehatan maupun ekonomi. Hal ini ditindaklanjuti Presiden Jokowi

melakukan pengurangan anggaran terhadap sejumlah kementerian dan lembaga demi penanganan pandemi covid-19.

Pengurangan anggaran juga berlaku bagi lembaga pemerintah lainnya seperti KPK, Kepolisian, Kejaksaan Agung, hingga Mahkamah Agung. Kebijakan lain terkait alokasi anggaran dikemukakan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Dia menyatakan, ASN eselon I dan II, tak akan mendapatkan THR. THR hanya akan diberikan bagi ASN, TNI, dan Polri eselon III ke bawah serta pensiunan. Hal ini karena pemerintah mengalokasikan anggaran untuk penanganan wabah virus corona atau Covid-19. Keputusan berikutnya, Jokowi meminta pemerintah pusat serta pemerintah daerah menjamin ketersediaan bahan pokok, dan memastikan terjaganya daya beli masyarakat, terutama masyarakat bawah.

Pihaknya juga meminta, program padat karya tunai diperbanyak dan dilipatgandakan, dengan catatan harus diikuti kepatuhan terhadap protokol pencegahan virus corona. Yaitu menjaga jarak aman satu sama lain. Jokowi juga menyebut, pemerintah memberi tambahan sebesar Rp 50.000 pada pemegang kartu sembako murah selama enam bulan. Dengan demikian, peserta kartu sembako akan menerima Rp 200.000 per keluarga tiap bulan. Untuk menjalankan alokasi tambahan kartu sembako ini, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp 4,56 triliun. Jokowi juga memutuskan mempercepat implemmentasi kartu pra-kerja guna mengantisipasi pekerja yang terkena PHK, pekerja kehilangan penghasilan, dan penugusaha mikro yang kehilangan pasar dan omzetnya. Masyarakat yang terdampak corona virus diharapkan dapat meningkatkan kompetensi dan kualitasnya melalui pelatihan kartu prakerja. Pemerintah mengalokasikan Rp 10 triliun untuk kebutuhan itu. Keputusan lain bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang melakukan kredit kepemilikan rumah (KPR) bersubsidi, diberikan stimulus. Pemerintah memberikan subsidi bunga hingga masa angsuran 10. tahun. Jika bunga di atas 5 persen, maka selisih bunga

dibayar pemerintah. Selain itu, ada juga bantuan pemberian subsidi uang muka bagi kredit rumah bersubsidi, dengan alokasi anggaran yang disiapkan mencapai Rp 1,5 triliun. Sebagai dukungan terhadap industri, presiden Jokowi memutuskan pemerintah untuk membayar pajak penghasilan (PPH) Pasal 21 yang selama ini dibayar oleh wajib pajak karyawan di industri pengolahan. Alokasi anggaran yang disediakan Rp 8,6 triliun.

Otoritas Jasa Keuangan memberi relaksasi kredit di bawah Rp 10 miliar bagi UMKM. Relaksasi itu berupa penurunan bunga dan penundaan cicilan selama setahun baik dari perbankan dan industri keuangan non bank. Selain itu, penangguhan cicilan selama setahun juga berlaku bagi ojek, supir taksi dan nelayan yang memiliki cicilan kendaraan. Jokowi minta pihak perbankan dan keuangan non bank untuk tidak mengejar para debitur. Pandemi corona juga berdampak pada penurunan pertumbuhan ekonomi nasional dari semula diperkirakan tumbuh di atas 4% tahun ini diprediksi hanya akan tumbuh 2,5 %. Berbagai upaya untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi karena dampak pandemi corona dilakukah pemerintah, baik dari segi kesehatan, sosial dan ekonomi. Secara umum tujuan setiap kebijakan untuk mengatasi rendahnya daya beli masyarakat, untuk mengurangi risiko PHK dan mempertahankan produktivitas ekonomi, produktivitas masyarakat di seluruh wilayah di Indonesia.

Krisis Virus Corona

Survei SMRC: 92% Siswa Memiliki Banyak Masalah dalam Belajar Daring Dari responden yang belajar atau kuliah online, 92%, merasa cukup banyak masalah yang mengganggu dengan pembelajaran online. Image title Oleh Tri Kurnia Yunianto 18 Agustus 2020, 18:49 Survei SMRC: 92% Siswa Memiliki Banyak Masalah Belajar Daring. ANTARA FOTO/Seno/aww. Seorang mahasiswa Ahmad Ulul Arham mengikuti ujian skripsi secara daring menggunakan aplikasi Zoom di Jurusan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Jember, Jawa Timur, Rabu (8/4/2020). Sebanyak 92% responden mengaku

memiliki masalah selama belajar daring. Pantau Data dan Informasi terbaru Covid-19 di Indonesia pada microsite Katadata ini. Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) merilis data hasil survei yang dilakukan pada rentang waktu 5 - 8 Agustus 2020 terkait pendidikan online di masa pandemi Covid-19. Hasil survei tersebut menunjukkan, 92% peserta didik mengalami banyak masalah dalam mengikuti pembelajaran daring selama pandemi corona merebak. Manajer Kebijakan Publik SMRC Tati D. Wardi mengatakan, survei ini diikuti oleh responden dengan rentang usia 17 tahun ke atas. Dari jumlah tersebut, sebanyak 5% mengaku masih bersekolah atau kuliah. Sebanyak 87% dari jumlah responden tersebut mengatakan melakukan pembelajaran online, sedangkan yang tidak belajar berjumlah 13%. "Dari responden yang belajar atau kuliah online, 92%, merasa sangat banyak atau cukup banyak masalah yang mengganggu dengan pembelajaran online," kata Tati dalam diskusi daring di Jakarta, Selasa (18/8). Baca Juga Survei: 67% Masyarakat Terbebani Biaya Sekolah Daring Selama Pandemi 15 Kampus Masuk Klaster Pertama Kemendikbud, IPB Ungguli UI Praktik Pembelajaran Jarak Jauh yang Masih Kusut di Tengah Pandemi Hanya 8% yang menjawab sedikit dan 0% menjawab tidak ada masalah. Berdasarkan hasil survei ini juga ditemukan, 60% peserta didik menyatakan tetap pergi ke sekolah atau kampus selama masa pandemi merebak. Sedangkan 29% tidak ada sekolah atau kuliah karena diliburkan dan sisanya 11% tidak menjawab. Survei ini melibatkan 2.201 responden yang diambil secara acak dari sampel survei tatap muka sebelumnya dengan jumlah proporsional. Wawancara dilakukan pada 5-8 Agustus 2020. Survei dilakukan dengan wawancara melalui sambungan telepon. Batas kesalahan atau margin of error dalam survei ini yakni sebesar 2,1% dengan teknik sampel dipilih secara acak atau stratified multistage random sampling pada tingkat kepercayaan 95%. Pada kesempatan yang sama, Manager of Institutional Reasearch and Effectiveness Sampoerna University, Dorita

Setiawan mengatakan, kondisi yang serupa turut terjadi pada mahasiswa di kampusnya. Apalagi pembelajaran daring telah dilakukan hampir selama satu semester sehingga banyak mahasiswa luar daerah memilih kembali ke kampung halaman. Untuk mengatasi kendala pembelajaran daring, pihaknya telah membentuk sistem manajemen pembelajaran dalam kondisi darurat sehingga dapat meminimalisir kendala pembelajaran siswa. Sistem tersebut membantu memetakan siapa saja peserta didik yang mendapatkan kendala belajar hingga apa saja yang dibutuhkan. Pandemi yang datang secara tiba-tiba pun akhirnya memaksa semua tenaga pengajar pun terpaksa harus beradaptasi dengan cepat melalui sistem pembelajaran dan kurikulum baru. "Sebaik-baiknya kurikulum kalau tenaga pengajar tidak disiapkan ya percuma saja, jadi kami juga melakukan pelatihan berkala," kata dia. Sebelumnya, imbas pandemi virus corona yang merebak membuat pembelajaran terpaksa harus dilakukan secara jarak jauh. Beberapa kendala pun muncul, seperti kurangnya bimbingan guru hingga masalah akses internet. Detailnya,

DAFTAR PUSTAKA

- “Coronavirus Cases.” *Worldometer*,
www.worldometers.info/coronavirus/
- “Social Solidarity, Human Rights, and Collective Action: Considerations in the Implementation of the National Health Insurance in South Africa.” *Health and Human Rights Journal*, 4 Dec. 2018,
www.hhrjournal.org/2018/10/social-solidarity-human-rights-and-collective-action-considerations-in-the-implementation-of-the-national-health-insurance-in-south-africa
- Aida, N. R. (2020, Maret 19). Update Virus Corona di Dunia: 214.894 Orang Terinfeksi, 83.313 Sembuh, 8.732 Meninggal Dunia. Kompas.com. Diunduh dari <https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/19/081633265/update-virus-corona-di-dunia-214894-orang-terinfeksi-83313-semuh-8732>
- Barak, Y. (2006). The immune system and happiness. *Autoimmunity Reviews*. 5 (8): 523-527.
<https://doi.org/10.1016/j.autrev.2006.02.010>
- Blanchette, I (2010). "The influence of affect on higher level cognition: A review of research on interpretation, judgement, decision making and reasoning". *Cognition and Emotion*. 24 (4): 561–595.
doi:10.1080/02699930903132496
- Bonanno, G. A., & Keltner, D. (1997). Facial expressions of emotion and the course of conjugal bereavement. *Journal of Abnormal Psychology*, 106, 126-137.
- Bonauli, Panas Virus Corona, Presiden Jokowi Masih Cari Wisman?, <https://travel.detik.com/travel-news/d-4920661/panas-virus-corona-presiden-jokowi-masih-cari-wisman>, diakses pada 6 Mei 2020.
- Calhoun, L. G., Tedeschi, R. G., Cann, A., & Hanks, E. A. (2010). Positive outcomes following bereavement:

- Paths to posttraumatic growth. *Psychologica Belgica*. (50), 125-143. doi: <http://dx.org/10.5334/pb-50-1-2-125>
- Christi Mahatma Wardani, *Pemerintah Yogya Masih Menyisir Data Penerima Bansos*, <https://jogja.tribunnews.com/2020/05/05/pemkot-yogya-masih-menyisir-data-penerima-bansos>, diakses pada 10 Mei 2020.
- CNN Indonesia. (2020, Maret 14). Mengenal Social Distancing sebagai Cara Mencegah Corona. CNN Indonesia. Diunduh dari <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20200314102823-255-483358/mengenal-social-distancing-sebagai-cara-mencegah-corona>
- Damarjati, Danu. "Data Corona Terkait Indonesia, 16 April 2020 Pukul 18.00 WIB." *Detiknews*, 16 Apr. 2020, news.detik.com/berita/d-4979843/data-corona-terkait-indonesia-16-april-2020-pukul-1800-wib.
- Dimas Jarot Bayu, *Pemerintah Siapkan Rp 4,7 Triliun Selamatkan Pariwisata dari Corona*, <https://katadata.co.id/berita/2020/02/25/pemerintah-siapkan-rp-47-triliun-selamatkan-pariwisata-dari-corona>, diakses pada 8 Mei 2020.
- Dixon, Marc. "Racial Competition and Class Solidarity." *Contemporary Sociology*, vol. 36, no. 3, May 2007, pp. 231–232.
- Fitria Chusna Farisa, *Perppu Covid-19 Digugat, MK Minta Penggugat Bandingkan dengan Negara Lain*, <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/28/17113941/perppu-covid-19-digugat-mk-minta-penggugat-bandingkan-dengan-negara-lain>, diakses pada 10 Mei 2020
- Frankl, V. E. (1984). *Man's search for meaning: An introduction to logotherapy*. New York: Simon & Schuster.
- Friana, Hendra, and Vincent Fabian Thomas. "Buruh Masih Berangkat Kerja Saat PSBB, Pemerintah Harus Apa?" *Tirto.id*, Tirto.id, 20 Apr. 2020, tirto.id/buruh-masih-berangkat-kerja-saat-psbb-pemerintah-harus-apa-eYm.

- Friana, Hendra, and Vincent Fabian Thomas. "Buruh Masih Berangkat Kerja Saat PSBB, Pemerintah Harus Apa?" *Tirto.id*, Tirto.id, 20 Apr. 2020, tirto.id/buruh-masih-berangkat-kerja-saat-psbb-pemerintah-harus-apa-eEyM
- Good, Marie. (2011). Exploring The Development and Psychosocial Correlates of Spirituality/ Religiosity Across Adolescence (Doctoral dissertation). Retrieved from https://dr.library.brocku.ca/bitstream/handle/10464/4074/Brock_Good_Marie_2011.pdf?sequence=1
- Guy, John James. *People, Politics and Government: A Canadian Perspective*. Pearson Education Canada, 2000.
- Hariyadi, D. (2020, Maret 18). Pandemi Corona, Ribuan Orang Ikut Tabligh Akbar se-Asia di Gowa. *Tempo.co*. Diunduh dari <https://nasional.tempo.co/read/1321285/pandemi-corona-ribuan-orang-ikut-tabligh-akbar-se-asia-di-gowa>
- Haselton, M. G.; Nettle, D. & Andrews, P. W. (2005). The evolution of cognitive bias. In D. M. Buss (Ed.), *The Handbook of Evolutionary Psychology*: Hoboken, NJ, US: John Wiley & Sons Inc. pp. 724–746.
- <http://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20200316/4033408/lakukan-protokol-kesehatan-jika-mengalami-gejala-covid-19/> <https://kejatius-sulsel.go.id/sosialisasi-pencegahan-dan-penanggulangan-penularan-virus-corona/>
- <https://kumparan.com/kumparanmom/alasan-di-balik-kebijakan-belajar-di-rumah-selama-2-pekan-1t2L3yQoYNk/full>
- <https://news.detik.com/kolom/d-4969335/5-fakta-pendidikan-di-tengah-wabah-corona>
- <https://tirto.id/tips-belajar-online-jarak-jauh-selama-penyebaran-corona-covid-19-eFJL>
- <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200316135138-37-145175/apa-itu-virus-corona-dan-cirinya-menurut-situs-who>

- <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200317193707-37-145644/biar-paham-begini-cara-penyebaran-virus-corona-versi-who>
- <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200430132023-20-498858/update-corona-30-april-10118-positif-792-meninggal-dunia>
- Isfandiari, M.A. (2020). Corona Virus (Covid-19) *Hasil Kajian*. Dosen FKM Unair
- Kahneman, D. (2011). Thinking, fast and slow. New York: Farrar, Straus and Giroux.
- Kazuto Suzuki, *COVID-19 Strategy, The Japan Model Has Japan found a viable long-term strategy for the pandemic?*, <https://thediplomat.com/2020/04/covid-19-strategy-the-japan-model/>, diakses pada 10 Mei 2020
- Kendali Penanganan COVID-19 Milik Siapa? Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives*. 5 Mei 2020.
- Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran COVID-19 Sebagai Bencana Nasional
- Koesmawardhani, N. W. (2020, Maret 17). Pemerintah Tetapkan Masa Darurat Bencana Corona hingga 29 Mei 2020. Detiknews. Diunduh dari <https://news.detik.com/berita/d-4942327/pemerintah-tetapkan-masa-darurat-bencana-corona-hingga-29-mei-2020>
- Kruger, Justin; Dunning, David (1999). "Unskilled and Unaware of It: How Difficulties in Recognizing One's Own Incompetence Lead to Inflated Self-Assessments". *Journal of Personality and Social Psychology*. 77 (6): 1121–1134. CiteSeerX 10.1.1.64.2655.
- Liputan6.com. "PSBB Corona Sudah Berjalan Sepekan, Ini 6 PR Pemprov DKI Jakarta." *liputan6.Com*, Liputan6, 19 Apr. 2020, www.liputan6.com/news/read/4231737/psbb-corona-sudah-berjalan-sepekan-ini-6-pr-pemprov-dki-jakarta.
- Malik, D. (2020, Maret 14). Anies Tutup Lokasi Wisata di Jakarta, Wisatawan Pindah ke Puncak Bogor.

- Vivanews. Diunduh dari
<https://www.vivanews.com/berita/nasional/40497-anies-tutup-lokasi-wisata-di-jakarta-wisatawan-pindah-ke-puncak-bogor?medium=autonext>
- Marques, S.C., Lopez, S.J. & Mitchell, J. (2013) The Role of Hope, Spirituality and Religious Practice in Adolescents' Life Satisfaction: Longitudinal Findings. *J Happiness Stud* 14, 251–261.
<https://doi.org/10.1007/s10902-012-9329-3>
- Mascaro, N., & Rosen, D. H. (2006). The Role of Existential Meaning as a Buffer Against Stress. *Journal of Humanistic Psychology*, 46(2), 168–190.
<https://doi.org/10.1177/0022167805283779>
- Minh Vu and Bich T. Tran, The Secret to Vietnam's COVID-19 Response Success *A review of Vietnam's response to COVID-19 and its implications*.
<https://thediplomat.com/2020/04/the-secret-to-vietnams-covid-19-response-success/>, diakses pada 7 Mei 2020.
- Philanthropic* merupakan orang yang melakukan aktivitas bagi kebaikan manusia.
- Pratama Guitarra, *Pemerintah Bentuk Gugus Tugas Penangan Corona*, <https://nasional.kontan.co.id/news/pemerintah-bentuk-gugus-tugas-penanganan-corona>, diakses pada 12 Mei 2020
- Relasi Pusat-Daerah dan Korona*. *Koran Kompas*. 11 Mei 2020.
- Retia Kartika Dewi, Kebijakan Kontroversial Pemerintah Saat Pandemi Corona Apa saja?
<https://www.kompas.com/tren/read/2020/05/12/125401165/3-kebijakan-kontroversial-pemerintah-saat-pandemi-corona-apa-saja>, diakses 16 Mei 2020.
- Sebayang, R. (2020, Januari 31). Awas! WHO Akhirnya Tetapkan Corona Darurat Global. *CNBC Indonesia*. Diunduh dari
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20200131060856-4-134146/awas-who-akhirnya-tetapkan-corona-darurat-global>

- Sharot, T. (2011). "The optimism bias". *Current Biology*. 21 (23): 941–945. doi:10.1016/j.cub.2011.10.030
- Suryani, Y. (n.d.). *IMPLEMENTASI GAYA HIDUP KEROHANIAN MAHASISWA IAKN TORAJA DALAM MENYIKAPI PENCEGAHAN COVID 19*
- Telaumbanua, D. (2020). Urgensi Pembentukan Aturan Terkait Pencegahan Covid-19 di Indonesia. *QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Agama*, 12(01), 59–70.
- Tetapkan Kebijakan Covid-19, Pemda Perlu Perhatikan Pemerintah Pusat*. <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/14/21334871/tetapkan-kebijakan-covid-19-pemda-perlu-perhatikan-pemerintah-pusat>. 14 April 2020
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Uraian tentang Manajemen Krisis Negara (State Risk Management) dapat dilihat dalam beberapa artikel ; (1) OECD (The Organisation for Economic Co-operation and Development), *The Changing Face of Strategic Crisis Management*, OECD Reviews of Risk Management Policies, OECD Publishing, Paris, 2016, (2) OECD, *Scientific Advice During Crises: Facilitating Transnational Co-operation and Exchange of Information*, OECD Publishing, Paris, 2018, (3) Sandra K. Schneider, *Dealing with Disaster: Public Management in Crisis Situations*, Routledge, New York, 2014.
- van Leeuwen C.M. Post M.W. Westers P. et al. (2012) Relationships between activities, participation, personal factors, mental health, and life satisfaction in persons with spinal cord injury. *Arch Phys Med Rehabil*. 93 (1): 82-89.
- Beck, J. S., & Beck, A. T. (2011). *Cognitive behavior therapy*. New York: Basics and beyond. Guilford Publication.
- Benjamin C.L., Puleo C.M., Settiani C.A., et al. (2011). History of cognitive-behavioral therapy in youth. *Child and Adolescent Psychiatric Clinics of North America*. 20(2), 179–189, doi: 10.1016/j.chc.2011.01.011

Greenberg, J., Pyszczynski, T., & Solomon, S. (1986). The causes and consequences of a need for self-esteem: A terror management theory. In *Public self and private self* (pp. 189-212). Springer, New York, NY.

Ghaemi, N. (2020, March 24). The Psychology of Pandemic Denial: Why do some people reject the science of public health? [Blog post]. Retrieved from <https://www.psychologytoday.com/us/blog/mood-swings/202003/the-psychologypandemic-denial>

Knoll, J.L. (2020, March 30). Panic and Pandemics: The Return of the Absurd. [Blog post]. Retrieved from <https://www.psychiatrictimes.com/coronavirus/panic-and-pandemicsreturn-absurd>

Norberg, M., Rucker, D. (2020, March 20). Psychology can explain why coronavirus drives us to panic buy. It also provides tips on how to stop. [Blog post]. Retrieved from <https://theconversation.com/psychology-can-explain-why-coronavirus-drives-us-to-panicbuy-it-also-provides-tips-on-how-to-stop-134032>

Situasi Virus Corona (2020, April 21). Retrieved April, 21, 2020, from <https://www.covid19.go.id/situasi-virus-corona/>

Taylor, S. (2019). *The Psychology of Pandemics: Preparing for the Next Global Outbreak of Infectious Disease*. England: Cambridge Scholar Publishing.

Posted in Uncategorized Tagged fisip ub, lomba opini, Lomba opini informatif COVID-19

Sumber Referensi :

- BBC Indonesia, 30 Maret 2020. *Virus corona: Peta dan infografis terkait pasien terinfeksi, meninggal dan sembuh di Indonesia dan dunia*. Diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-51850113>
- BBC Indonesia, 30 Maret 2020. *Virus corona: Pendapatan usaha kecil 'pupus' akibat covid 19, pemerintah siapkan bantuan sosial untuk pekerja harian*. Diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-52059235>
- CNBC Indonesia, 29 Maret 2020. Karena Corona, Ekonomi RI Diprediksi -2%. Diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/market/20200329113617-17-148245/karena-corona-ekonomi-ri-diprediksi-2>
- Fadjarudin, Muchlis. *“Hasil Kajian INDEF Soal Penanganan Wabah COVID-19 dan Dampak Ekonominya”* Suara Surabaya tanggal 24 Maret 2020. Diakses dari <https://www.suarasurabaya.net/ekonomibisnis/2020/hasil-kajian-indef-soal-penanganan-wabah-covid-19-dan-dampak-ekonominya/>
- Kompas, 26 Maret 2020. *Parah! 20.000 Masker di RSUD Pagelaran Cianjur Dicuri 3 Pegawai, CCTV Dimatikan Sebelum Beraksi*. Diakses dari <https://www.kompas.tv/article/73179/20-000-masker-di-rsud-pagelaran-cianjur-ternyata-dicuri-3-pegawai-cctv-dimatikan-sebelum-beraksi>
- Soekanto, Soerjono. 2013. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.
- Syaifudin. 2020. *“Wabah Virus Corona dan Dampak Sosiologis”* Tempo.co tanggal 3 Maret 2020. Diakses dari <https://kolom.tempo.co/read/1314927/wabah-virus-corona-dan-masalah-sosiologis>

- Tempo, 18 Maret 2020. *Sri Mulyani Ingin Stimulus Corona Sentuh Rakyat Kecil***. Diakses dari <https://bisnis.tempo.co/read/1321168/sri-mulyani-ingin-stimulus-corona-sentuh-rakyat-kecil/full&view=ok>
- Tirto, 25 Maret 2020. *Yuk, Kolaborasi Lawan COVID-19 untuk Atasi Dampak Ekonomi*. Diakses dari <https://tirto.id/yuk-kolaborasi-lawan-covid-19-untuk-atasi-dampak-ekonomi-eHzg>
- Tirto, 31 Maret 2020. *WNI Positif COVID-19 di Luar Negeri Capai 133 Kasus, 3 Meninggal*. Diakses dari <https://tirto.id/wni-positif-covid-19-di-luar-negeri-capai-133-kasus-3-meninggal-eJXr>
- Tirto, 1 April 2020. *Update Corona 1 April: Sebaran 1.677 Kasus di 32 Provinsi Indonesia*. Diakses dari <https://tirto.id/update-corona-1-april-sebaran-1677-kasus-di-32-provinsi-indonesia-eKdu>